RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA JAYAPURA 2025–2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA JAYAPURA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI.....iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR.....viii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 6
1.3. Dasar Hukum..... 8
1.4. Sistematika Penulisan 11
1.5. Metode Penyusunan..... 12
BAB II KONDISI UMUM DAERAH.....14
2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah..... 14
2.2. Demografi..... 19
2.3. Kesejahteraan Ekonomi.....21
2.4. Kesehatan Untuk Semua 40
2.5. Pendidikan Berkualitas yang Merata.....43
2.6. Perlindungan Sosial yang Adaptif.....48
2.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....50
2.8. Perkotaan dan Perdesaaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi..52
2.9. Stabilitas Ekonomi Makro.....57
2.10. Aspek Pelayanan Umum.....59
2.11. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....60
BAB III PROFIL KEMISKINAN KOTA JAYAPURA.....88
3.1. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah.....88
3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan Konsumsi 91
3.3. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan 96
3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan 101
3.5. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan 108
3.6. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar..... 125
3.7. Kemiskinan Ekstrem Kota Jayapura 132
BAB IV PROGRAM PRIORITAS.....140

BAB V LOKASI PRIORITAS.....161

5.1. Latar Belakang dan Kontesk Pembangunan 161
5.2. Lokasi Prioritas.....179
5.3. Rekomendasi dan Rencana Aksi.....183

BAB VI P E N U T U P.....186

6.1. Kesimpulan..... 186

6.2. Rekomendasi..... 187

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan RPKD 9
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Jayapura 11
Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2018-2020..... 13
Gambar 2.3. PDRB Atas Dasar Harga Belaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kota Jayapura (milyar Rupiah), Tahun 2017 – 2021 18
Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Tahun 2017-2021 19
Gambar 2.5. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Jayapura Tahun 2016-2020 21
Gambar 2.6. Harapan Lama Sekolah Kota Jayapura Tahun 2016-2020..... 22
Gambar 2.7. Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Kota Jayapura Tahun 2017-2020 22
Gambar 2.8. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Kota Jayapura Tahun 2017-2020 23
Gambar 2.9. Angka Usia Harapan Hidup di Kota Jayapura Tahun 2017-2020..... 23
Gambar 2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jayapura Tahun 2017-2021 24
Gambar 2.11. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jayapura Tahun 2017-2020 24
Gambar 2.12. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Rumah Tangga Tahun 2017-2019 25
Gambar 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Jayapura Tahun 2014-2021 29
Gambar 3.2. Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) di Kota Jayapura Tahun 2014-2021 29
Gambar 3.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Kota Jayapura Tahun 2014-2021 30
Gambar 3.4. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Papua Tahun 2021 32
Gambar 3.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Jayapura Tahun 2014-2021 32
Gambar 3.6. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Papua 2021 33

Gambar 3.7. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Jayapura Tahun 2014-2021 33
Gambar 3.8. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Papua 2021 34
Gambar 3.9. Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Jayapura Tahun 2014–2021 35
Gambar 3.10. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Papua 2021 35
Gambar 3.11. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) 36
Gambar 3.12. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Papua 2020 36
Gambar 3.13. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Papua 2020 37
Gambar 3.14. Posisi Relatif Angka Morbiditas (%) Provinsi Papua 2020 38
Gambar 3.15. Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Papua 2020 38
Gambar 3.16. Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Papua 2020 39
Gambar 3.17. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Papua 2020 40
Gambar 3.18. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Papua 2020 40
Gambar 3.19. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Papua 2020 41
Gambar 3.20. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Papua 2020 42
Gambar 3.21. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Papua 2020 42
Gambar 3.22. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Papua 2020 43
Gambar 3.23. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Papua 2020 44
Gambar 3.24. Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Papua 2020 44
Gambar 3.25. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Provinsi Tahun 2022 48
Gambar 3.26. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022 48

Gambar 3.27. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Jayapura Tahun 2020-2022 49
Gambar 3.28. Kabupaten Dengan Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) Dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tertinggi (jiwa) Provinsi Papua, 2020 55
Gambar 3.29. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem dan Derajat Otonomi Fiskal 56
Gambar 3.30. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Ruang Fiskal 56
Gambar 3.31. Distribusi Kabupaten/Kota di Papua Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Belanja Kesejahteraan 57
Gambar 3.32. Prevalensi Balita Kerdil (Stunting) Berdasarkan Provinsi, 2013-2018 59
Gambar 3.33. Peta Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Sumber Air Minum Terlindungi di Papua Menurut Kabupaten/Kota..... 63
Gambar 3.34. Peta Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Listrik di Papua Menurut Kabupaten/Kota..... 63
Gambar 3.35. Peta Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang air Besar di Papua Menurut Kabupaten/Kota..... 64
Gambar 3.36. Peta Sebaran Rumah Tangga 40% Terbawah yang Tidak Memiliki Septic Tank di Papua Menurut Kabupaten/Kota..... 64
Gambar 5.1. Indeks Kemiskinan Multideminsi dengan Berbagai Dimensi . 75
Gambar 5.2 Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan Tenaga Medis (Dokter)..... 78
Gambar 5.3. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan Tenaga Medis (Bidan) 79
Gambar 5.4. Lokasi Prioritas dengan Indikator Jumlah Stunting 81
Gambar 5.5. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses Poliklinik 82
Gambar 5.6. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses Puskesmas..... 84
Gambar 5.7. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses Rumah Sakit 85
Gambar 5.8. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses SD 87
Gambar 5.9. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses SMP..... 88
Gambar 5.10. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses SMA..... 89
Gambar 5.11. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketesediaan Akses dan Kualitas Jalan..... 92

Gambar 5.12. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan dan Angkutan Umum 94

Gambar 5.13. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses Pasar (indeks Dimensi Pelyanan Dasar) 95

Gambar 5.14.Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan Listrik98

Daftar Tabel

Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura	5
Tabel 2.1.	Nama Distrik dan Luas Wilayah di Kota Jayapura	12
Tabel 2.2.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Rinci Per Distrik di Kota Jayapura Tahun 2020	14
Tabel 2.3.	Distribusi Persentase masing-masing Sektor terhadap PDRB Kota Jayapura Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran Tahun 2017 – 2021	16
Tabel 2.4.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut pengeluaran Kota Jayapura (juta Rupiah) Tahun 2017 – 2021	18
Tabel 2.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Jayapura Tahun 2016 – 2020	19
Tabel 2.6.	Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Jayapura Tahun 2020	26
Tabel 3.1.	Kemiskinan dan Ketimpangan Berdasarkan Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2020	28
Tabel 3.2.	Rincian data 40% dengan tingkat kesejahteraan Kota Jayapura	50
Tabel 3.3.	Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Ekstrem Kota Jayapura, 2020	50
Tabel 3.4.	Karakteristik Pendidikan Kepala Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem, Kota Jayapura, 2020	51
Tabel 3.5.	Kondisi Demografi Rumah Tangga Miskin Ekstrem, Kota Jayapura 2020	51
Tabel 3.6.	Status Bekerja Penduduk Miskin Ekstrem (Usia 15+), Kota Jayapura 2020	52
Tabel 3.7.	Akses Transportasi dan Fasilitas Dasar Kota Jayapura 2020	52
Tabel 3.8.	Kondisi Perumahan Rumah TanggaMiskin Ekstrem Kota Jayapura Tahun 2020	53
Tabel 3.9.	Kondisi Rumah Tangga Berdasarkan Akses Terhadap Keuangan, Tahun 2020	53
Tabel 3.10.	Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia, Provinsi Papua dan Kota Jayapura, Tahun 2020	54

Tabel 3.11. Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Papua dan Kota Jayapura, Tahun 2020 58
Tabel 3.12. Karakteristik Pendidikan Miskin Ekstrem Kepala Rumah Tangga Provinsi Papua dan Kota Jayapura, Tahun 2020..... 59
Tabel 3.13. Kemudahan Akses Fasilitas Kesehatan Pada Desa/Kelurahan di Provinsi Papua dan Kota Jayapura, Tahun 2020 60
Tabel 3.14. Prevalensi Balita Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2018 60
Tabel 3.15. Kondisi Demografi Rumah Tangga Miskin Ekstrem Provinsi Papua dan Kota Jayapura Tahun 2020 61
Tabel 3.16. Status Bekerja Penduduk Miskin Ekstrem (Usia 15+) Berdasarkan Provinsi Papua dan Kota Jayapura Tahun 2020..... 61
Tabel 3.17. Akses Transportasi dan Fasilitas Dasar Berdasarkan Provinsi Papua dan Kota Jayapura Tahun 2020 62
Tabel 3.18. Kondisi Perumahan Rumah Tangga Miskin Ekstrem Berdasarkan Provinsi Papua dan Kota Jayapura Tahun 2020..... 62
Tabel 3.19. Akses Terhadap Keuangan/Perbankan Berdasarkan Provinsi Papua dan Kota Jayapura Tahun 2020 65
Tabel 4.1. Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran, serta Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan di Kota Jayapura Tahun 2023-2026 66
Tabel 4.2. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Jayapura Tahun 2023-2026 68
Tabel 5.1. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan Tenaga Medis (Dokter)..... 79
Tabel 5.2. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan Tenaga Medis (Bidan)..... 80
Tabel 5.3. Lokasi Prioritas - Indikator Jumlah Stunting 82
Tabel 5.4. Lokasi Prioritas - Indikator Kesejahteraan dan Ketersediaan Akses Poliklinik..... 83
Tabel 5.5. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses Puskesmas 84
Tabel 5.6. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses Rumah Sakit..... 85
Tabel 5.7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan 86
Tabel 5.8. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses SD..... 88
Tabel 5.9. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses SMP Akses ke SD 89
Tabel 5.10. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses SMA..... 90

Tabel 5.11. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Urusan Pendidikan 90
Tabel 5.12. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketesediaan Akses dan Kualitas Jalan 93
Tabel 5.13. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Urusan Pekerjaan Umum 93
Tabel 5.14. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan dan Operasional Angkutan Umum 94
Tabel 5.15. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Urusan Perhubungan 95
Tabel 5.16. Lokasi Prioritas dengan Indikator Akses Pasar 96
Tabel 5.17. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Urusan Perdagangan dan Industri 96
Tabel 5.18. Lokasi Prioritas dengan Indikator Ketersediaan Listrik..... 99
Tabel 5.19. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Urusan Tenaga Kelistrikan 99

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi segenap warga negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, serta akses terhadap pelayanan dasar. Dalam konteks Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah timur Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan memiliki tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, berbasis data, dan sensitif terhadap karakteristik wilayah serta kearifan lokal.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

RPKD ini memuat gambaran umum kondisi daerah, profil dan karakteristik kemiskinan, analisis permasalahan serta faktor penyebab kemiskinan, penetapan lokasi prioritas penanganan, hingga arah kebijakan dan program prioritas penanggulangan kemiskinan di Kota Jayapura. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan intervensi kebijakan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kota Jayapura menyadari bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, lembaga keagamaan, tokoh adat, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura Tahun 2025–2029 dapat menjadi acuan dan pedoman yang efektif dalam mewujudkan Kota Jayapura yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Jayapura, Desember 2025

Wali Kota Jayapura

Abisai Rollo, S.H, M.H

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, World Bank (2022) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi: (1) Kemiskinan absolut, yaitu kondisi ketika pendapatan individu berada di bawah standar minimum kebutuhan hidup; (2) Kemiskinan relatif, yaitu kondisi ketika seseorang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan rata-rata masyarakat di sekitarnya; dan (3) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang membuat sebagian masyarakat sulit mengakses sumber daya.

Penyebab dan dinamika kemiskinan tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa teori sebagai berikut : (1) Teori Individual (Oscar Lewis, 1959). Dikenal dengan konsep *culture of poverty*, teori ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang diwariskan antargenerasi, seperti pasrah terhadap nasib dan kurangnya motivasi berusaha; (2) Teori Struktural (Karl Marx, 1867). Teori ini menekankan bahwa kemiskinan timbul akibat struktur ekonomi yang timpang antara pemilik modal dan pekerja. Sistem kapitalisme menciptakan ketimpangan distribusi sumber daya dan kesempatan; (3) Teori Fungsional (Talcott Parsons).

Dalam pandangan fungsionalis, kemiskinan dianggap memiliki fungsi sosial tertentu, seperti mendorong motivasi kerja dan menjadi sumber tenaga kerja murah, meski hal ini dipandang kontroversial; dan (4) Teori Pembangunan dan Ketergantungan (Andre Gunder Frank, 1971)
Teori ini menyoroti hubungan ketergantungan antara negara berkembang dan negara maju, di mana kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi global dan ketimpangan sistem perdagangan internasional.

Faktor penyebab kemiskinan antara lain : (1) Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan; (2) Terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan; (3) Ketimpangan distribusi pendapatan dan aset, (4) Lemahnya akses terhadap modal dan teknologi; (5) Ketidakmerataan pembangunan antarwilayah, dan (6) Bencana alam dan krisis ekonomi. Selanjutnya kemiskinan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti: menurunnya kualitas hidup dan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas, meningkatnya kerawanan sosial, kriminalitas, dan urbanisasi, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang terus menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas utama pemerintah, diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan strategi yang berkelanjutan. Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua, menghadapi kompleksitas tantangan kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, ekonomi, budaya, serta dinamika pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Secara nasional, angka kemiskinan Indonesia, meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masih menjadi perhatian serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada bulan Maret tahun 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,03% (Badan Pusat Statistik, 2024). Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi pemerintah, baik melalui program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan ekonomi. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa masih ada jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan angka tersebut dapat bervariasi secara signifikan antar daerah.

Kemiskinan berdampak dan disebabkan oleh beragam faktor seperti ekonomi, politik, sosial budaya, agama, sumberdaya alam, sumber daya manusia,

lingkungan hidup, bencana alam/non alam, dan teknologi informasi. Selain itu, disebutkan diawal bahwa kemiskinan itu bersifat tematik, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan tidak dapat diberlakukan secara universal antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kearifan lokal dan karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan.

Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan, sehingga diharapkan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan oleh semua pihak dalam upaya pencapaian tujuan yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan.

Di Papua, isu kemiskinan memiliki karakteristik yang lebih kompleks, seringkali terkait dengan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan peluang ekonomi (Wawolumaya et al., 2022). Keterisolasian geografis di beberapa wilayah, meskipun tidak secara langsung mempengaruhi seluruh area perkotaan seperti Jayapura, tetap berkontribusi pada disparitas pembangunan. Kota Jayapura, sebagai pusat administrasi dan ekonomi di Papua, sejatinya menjadi garda terdepan dalam upaya mengatasi kemiskinan di provinsi ini. Namun, dinamika urbanisasi yang cepat, arus migrasi, serta tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi seluruh penduduk dapat menciptakan kantong-kantong kemiskinan perkotaan yang memerlukan perhatian khusus.

Presentasi penduduk miskin di Provinsi Papua pada bulan Maret 2025 sebesar 19,16% (*BPS Provinsi Papua, 2025*). Angka ini adalah presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan pada periode survei yang dilaporankan. Presentasi kemiskinan pada bulan September 2024 yang dipublikasikan sebelumnya adalah 18,09%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 915.15 ribu jiiwa sehingga menunjukan adanya kenaikan proporsi penduduk miskin ke bulan Maret 2025.

Presentasi penduduk miskin di Kota Jayapura dari angka presentasi yang dipublikasikan pada periode akhir tahun 2024 yaitu berada pada 10.72% (*BPS Kota Jayapura, 2024*). Kota Jayapura cenderung memilki presentasi kemiskinan

lebih rendah dari rata-rata Kabupaten di Provinsi Papua. Hal ini tipikal karena Kota Jayapura sebagai pusat layanan administrasi, ekonomi dan kemudahan aksesiblitas.

Dari data statistik diatas, angka kemiskinan di Kota Jayapura menunjukkan trend yang menurun, dimana kondisi ini juga terjadi pada kondisi umum kemiskinan di Indonesia dimana jumlah penduduk miskin semakin menurun walaupun dengan tren yang landai. Namun yang perlu dikaji lebih jauh adalah upaya dan rencana apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan masyarakat miskin Indonesia khuusnya Kota Jayapura dari garis kemiskinan, agar mereka memiliki ketahanan ekonomi rumah tangga yang tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi. Terkait hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti misalnya menyusun program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2025-2029 yaitu "**TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA SEBAGAI KOTA JASA YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA MENUJU JAYAPURA EMAS"** dan merujuk pada visi nomor 5 yaitu: MEMPERKUAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDIDIKAN KESEHATAN UNTUK MELAHIRKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL, PRODUKTIF, DAN BERKARAKTER, bedampak pada pendekatan kebijakan, program dan kegiatan diantaranya untuk; (1) meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, (2) meningkatnya pendidikan dan derajad kesehatan masyarakat, dan (3) meningkatnya standar hidup masyarakat. Pendekatan kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Jayapura.

Percepatan dalam penurunan angka kemiskinan telah diupayakan melalui peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres Nomor 166 Tahun 2016 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

mengawal pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ditingkat Pusat, sedangkan level daerah dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Sebagai langkah untuk memperkuat percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Memahami dan mengatasi akar permasalahan kemiskinan di Kota Jayapura memerlukan pendekatan yang terstruktur, terpadu, dan berbasis bukti. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 hadir sebagai instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Penyusunan RPKD ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan mendasar yang mencakup evaluasi capaian program sebelumnya, identifikasi tantangan terkini, perspektif pembangunan berkelanjutan, serta mandat regulasi yang mengamanatkan adanya perencanaan kemiskinan daerah yang komprehensif.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura sebagai rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan, merupakan dasar penyusunan RPD bidang Penanggulangan Kemiskinan, sehingga seluruh Program yang tertuang dalam RPKD juga tertuang dalam RPD, dengan demikian diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan akan dapat terwujud sesuai dengan yang ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Menetapkan renaca aksi program penaggulangan kemiskinan;
3. Memandu investasi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

1.2.2 Tujuan

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan;
2. Membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Memperkuat pengarusutamaan (*mainstreaming*) penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
4. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Sasaran penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dalam matrik dibawah ini merujuk pada tahun 2025-2026 (sambil menunggu Draft Final RPJMD)

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Kebijakan
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup,	Meningkatnya pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)			64,10 %	57,69 %	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

	dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin		Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase Stunting RLH HLS Penangan Rumah Tidak Layak Huni Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak			2,70 % 19,86 % 7,00 th 14,25 th 53,15 % 83,82 %	2,60 % 18,87 % 7,19 th 14,50 th 57,60 % 84,72 %	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pendidikan Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar
2	Memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	Volume Produksi Perikanan (ton) Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			4.597 ton 100 %	4.732 ton 100 %	Peningkatan Volume Produksi Perikanan (ton) Memanfaatkan SDA (irigasi teknis dan lahan produktif) untuk meningkatkan Produksi
3	Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan	Meningkatnya kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pengembangan WUP dan WUB menjadi UKM Formal	Persentase Pertumbuhan industri Peningkatan Jumlah UM-WUP dan UM-WUB dan mengubah Status menjadi UKM Formal			1,5 % 21.492 UKM	1,5 % 21.992 UKM	Meningkatnya daya saing sektor Ekonomi Unggulan

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura Tahun 2025-2030 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir miskin;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 17 berbunyi : TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional pasal 20 berbunyi : 1) Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 2) TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan TKPK Propinsi. 4) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Propinsi dan TKPK Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manuasia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Pasal 5 ayat (1) berbunyi: TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas Melakukan Kooordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Pasal 5 ayat (2) berbunyi TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
    a. Penyusunan RKPD dan rencana aksi kabupaten/kota;
    b. Koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
    e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
    f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
    g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan

pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua agar dapat setara dengan daerah lain;

16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 12);
19. Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: 234/19/Bappeda/2021, Tanggal 20 Januari 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Merujuk pada Permendagri No. 53/2020 pasal 20 ayat (2), maka dalam dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) paling sedikit memuat antara lain: 1) pendahuluan, 2) kondisi umum daerah, 3) profil kemiskinan daerah, 4) prioritas program, 5) lokasi prioritas dan 6) penutup. Mengingat hingga saat ini belum diterbitkan petunjuk teknis penyusunan RPKD, dengan mengadaptasi petunjuk teknis penyusunan RPKD yang di terbitkan oeh TNP2K pada tahun 2023, maka pokok-pokok isi RPKD adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika
- 1.5 Metodologi

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Geografi dan Demografi Wilayah
- 2.2 Kawasan Strategis
- 2.3 Struktur dan Perekonomian

2.4 Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

3.2 Analisis Karakteristik Kemiskinan Konsumsi

3.3 Analisis Karaktersitik Masalah Ketenagakerjaan

3.4 Analisis Karaktersitik Masalah Bidang Kesehatan

3.5 Analisis Karaktersitik Masalah Bidang Pendidikan

3.6 Analisis Karaktersitik Masalah Bidang Infrastruktur

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

BAB V LOKASI PRIORITAS

BAB VI PENUTUP

1.5. Metode Penyusunan

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura, menggunakan data-data berupa data kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara partisipatif. Data kuantitatif diperoleh dari data-data sekunder yang diperoleh dari OPD yang berhubungan dengan aktifitas penanggulangan kemiskinan.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan (RPKD) Kota Jayapura adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang berupaya untuk mencari (menginterpretasikan) unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena (data) dengan pendekatan analisis data sekunder.

3.3. Tahapan Penyusunan RKPD

Penyusunan dokumen RPKD Kota Jayapura tahun 2025-2029, mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, dengan tahapan sebagai berikut:


PENDEKATAN ANALISIS
Identifikasi Kondisi Umum Daerah
Analisis Profil Kemiskinan Daerah
Analisis Prioritas Program
Analisis Prioritas Lokasi

Matriks Rencana Program Penanggulangan kemiskinan Daerah	Lokasi Prioritas Penanggulangan kemiskinan Daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah

Kota Jayapura secara resmi dibentuk pada 21 September 1993 melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993. Awalnya, Kota Jayapura memiliki luas 940 Km^2 yang terbagi menjadi 5 (lima) Distrik, 25 Kelurahan, dan 14 Kampung. Namun, seiring waktu, luas wilayah Kota

Jayapura mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini didasari oleh beberapa regulasi dan penyesuaian, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 dan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengatur batas daerah dengan Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap garis batas negara berdasarkan Geodatabase Nasional Batas Negara Edisi Maret 2021 dan garis pantai sesuai dengan Berita Acara Asistensi dan Supervisi Peta Dasar Skala 1:25.000 Revisi RTRW Kota Jayapura.

Luas wilayah Kota Jayapura kini menjadi sekitar 835,94 Km^2 atau 83.594 Ha. Kota Jayapura terbagi menjadi 5 (lima) Distrik Utama, yakni: (1) Distrik Muara Tami; (2) Distrik Jayapura Utara; (3) Distrik Jayapura Selatan; (4) Distrik Abepura; dan (5) Distrik Heram. Total luas wilayah Kota Jayapura berdasarkan data BPS adalah 940 Km^2, sementara berdasarkan Tapal Batas 2020 adalah 835,59 Km^2, dengan pembagian wilayah masing-masing Distrik, sebagai berikut:

1. Distrik Muara Tami adalah yang terluas, dengan ibu kota di Skouw Mabo. Distrik ini terdiri dari 8 Kelurahan/Kampung, dengan luas total 626,7 Km^2 (*BPS*) atau 431,99 Km^2 (*Tapal Batas 2020*).

Kelurahan terluas di Distrik Muara Tami adalah Koya Barat dan Koya Timur.

2. Distrik Jayapura Utara, dengan ibu kota di Tanjung Ria, memiliki 8 Kelurahan/Kampung. Luas totalnya 51 km² (BPS) atau 67,35 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kelurahan terluas di Distrik Jayapura Utara adalah Tanjung Ria dan Bhayangkara.
3. Distrik Jayapura Selatan ibu kota di Entrop, terdiri dari 7 Kelurahan/ Kampung. Luas totalnya 43,4 Km² (*BPS*) atau 42,6 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kelurahan Ardipura merupakan yang terluas di Distrik Jayapura Selatan.
4. Distrik Abepura dengan ibu kota di Kota Baru memiliki 11 Kelurahan/ Kampung. Luas totalnya 155,7 Km² (*BPS*) atau 252,21 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kampung Koya Koso dan Nafri adalah terluas di Distrik Abepura.
5. Distrik Heram, ibu kota di Waena, terdiri dari 5 Kelurahan/Kampung. Luas totalnya 63,2 Km² (*BPS*) atau 41,13 Km² (*Tapal Batas 2020*). Kelurahan Hedam merupakan yang terluas berdasarkan data BPS, sementara Kampung Yoka terluas menurut Tapal Batas 2020.

Dalam konteks Provinsi Papua, Kota Jayapura menempati posisi sebagai daerah terkecil kedua setelah Kabupaten Supiori, mencakup hanya 1,07 persen dari total luas Provinsi Papua. Posisi geografisnya berada pada 1°28'17,26"-3°58'0,82" Lintang Selatan dan 137°34'10,6"-141°0'8,22" Bujur Timur. Kota Jayapura memiliki posisi strategis yang sangat penting di Provinsi Papua. Secara geografis, kota ini terletak di bagian utara Papua. Di sebelah utara, Jayapura berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik sehingga memiliki akses ke jalur laut internasional; di timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea (PNG) yang menegaskan perannya sebagai beranda depan negara; di selatan berbatasan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom; sementara

di barat berbatasan dengan Distrik Sentani dan Depapre Kabupaten Jayapura.

Posisi tersebut memberi Kota Jayapura tiga keunggulan utama. Pertama, dari sisi geopolitik dan pertahanan, Jayapura menjadi pintu gerbang Indonesia di Pasifik yang memiliki nilai strategis untuk keamanan dan diplomasi antarnegara. Kedua, dari aspek ekonomi, Jayapura berperan sebagai simpul perdagangan, jasa, dan logistik regional yang menghubungkan hasil pertanian, perikanan, dan komoditas unggulan dari berbagai kabupaten/kota di Papua menuju pasar domestik maupun internasional. Ketiga, dari perspektif sosial-budaya, keberadaannya sebagai ibukota provinsi menjadikan Jayapura pusat layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani masyarakat dari seluruh wilayah Papua.

Rincian wilayah administrasi Kota Jayapura dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1

Wilayah Administrasi Kota Jayapura

NO	DISTRIK	IBU KOTA DISTRIK	KELURAHAN dan KAMPUNG	LUAS WILAYAH BERDASARKAN BPS (Km²)	LUAS WILAYAH BERDASARKAN TAPAL BATAS 2020 (Km²)
I	**Muara Tami**	**Skouw Mabo**	1. Kelurahan Koya Barat	217	36,07
			2. Kelurahan Koya Timur	96,2	99,25
			3. Kampung Holtekamp	13,3	16,05
			4. Kampung Skouw Sae	52,7	27,76
			5. Kampung Skouw Yambe	81,5	23,71
			6. Kampung Skouw Mabo	87,7	9
			7. Kampung Koya Tengah	45,6	5,19
			8. Kampung Mosso	32,7	214,96
			LUAS DISTRIK MUARA TAMI	626,7	431,99
II	**Jayapura Utara**	**Tanjung Ria**	1. Kelurahan Angkasapura	13,2	12,56
			2. Kelurahan Trikora	0,9	1,25
			3. Kelurahan Mandala	0,3	0,56
			4. Kelurahan Tanjung Ria	5,9	18,25
			5. Kelurahan Imbi	9,4	1,76
			6. Kelurahan Bhayangkara	13,6	17,23
			7. Kelurahan Gurabesi	7,2	14,68
			8. Kampung Kayobatu	0,5	1,06
			LUAS DISTRIK JAYAPURA UTARA	51	67,35
III	**Jayapura Selatan**	**Entrop**	1. Kelurahan Numbay	9,3	1,02
			2. Kelurahan Argapura	2,7	1,05
			3. Kelurahan Hamadi	10	1,7
			4. Kelurahan Ardipura	16,4	25,83
			5. Kelurahan Entrop	2,7	11,24
			6. Kampung Tobati	0,5	1,7
			7. Kampung Tahima Soroma (Kayopulo)	1,8	0,05
			LUAS DISTRIK JAYAPURA SELATAN	43,4	42,6
IV	**Abepura**	**Kota Baru**	1. Kelurahan Asano	10,8	28,83
			2. Kelurahan Awiyo	6,7	16,28
			3. Kelurahan Abe Pantai	12,7	29,79
			4. Kelurahan Kota Baru	11,6	12,24
			5. Kelurahan Yobe	4,5	11,26

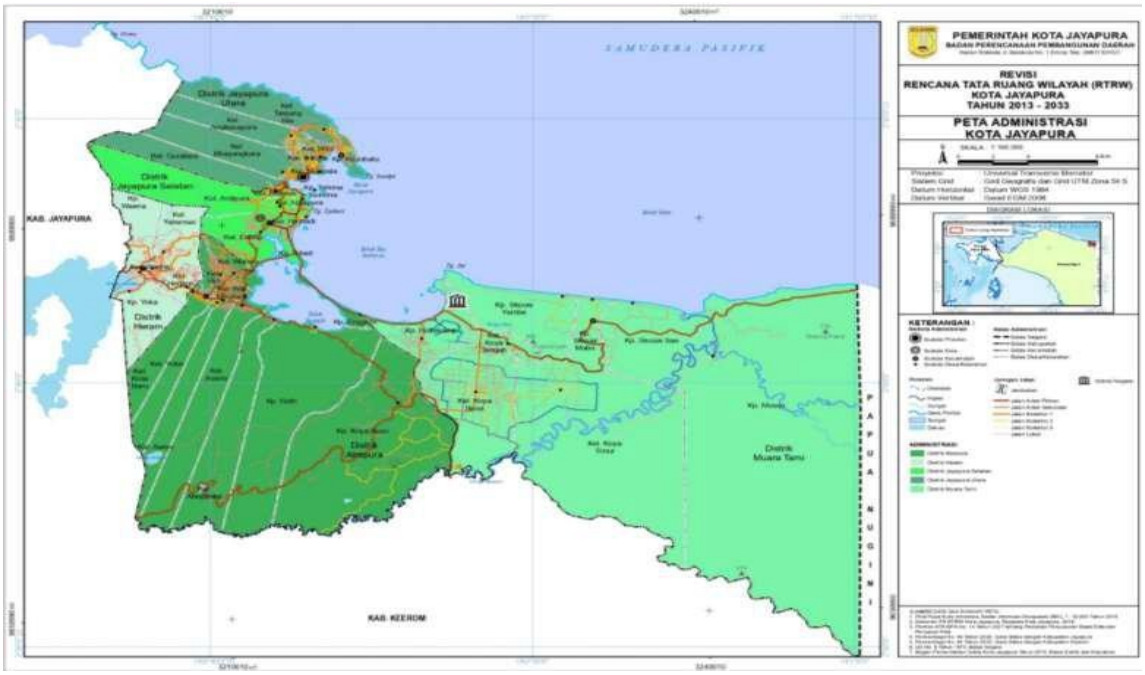
NO	DISTRIK	IBU KOTA DISTRIK	KELURAHAN dan KAMPUNG	LUAS WILAYAH BERDASARKAN BPS (Km²)	LUAS WILAYAH BERDASARKAN TAPAL BATAS 2020 (Km²)
			6. Kelurahan Vim	6,8	3,48
			7. Kelurahan Wahno	5,9	4,37
			8. Kelurahan Wai Mhorock	5,3	1,93
			9. Kampung Enggros	4,7	2,46
			10. Kampung Nafri	49,5	59,34
			11. Kampung Koya Koso	37,2	82,22
			LUAS DISTRIK ABEPURA	155,7	252,21
V	**Heram**	**Waena**	1. Kelurahan Hedam	28,11	4,45
			2. Kelurahan Yabansai	12,48	11,07
			3. Kelurahan Waena	8,33	0,5
			4. Kampung Waena	4,16	11,68
			5. Kampung Yoka	10,12	13,42
			LUAS DISTRIK HERAM	63,2	41,13
			LUAS WILAYAH KOTA JAYAPURA	940	835,59

Sumber: BPS Kota Jayapura Tahun 2023 dan Hasil Analisis 2023

Berikut disajikan peta administrasi Kota Jayapura yang meliputi 5 (lima) distrik.

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kota Jayapura



Sumber: Revisi RTRW Kota Jayapura, 2023

Sekitar 30% wilayah Kota Jayapura dianggap tidak cocok untuk pemukiman karena terdiri dari perbukitan curam, daerah rawa, dan hutan lindung dengan kemiringan 40% yang berfungsi sebagai area konservasi. Wilayah Kota Jayapura tidak hanya meliputi daratan, tetapi juga mencakup area laut dan pulau-pulau kecil. Perairan di sekitarnya

menghubungkan pantai dan pulau-pulau, termasuk muara sungai,

teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Total luas wilayah laut Kota Jayapura adalah 2,81 Km^2 dengan garis pantai sepanjang 116,77 Km. Dari keseluruhan wilayah, kawasan yang dapat dibudidayakan mencakup 14.219,82 hektar (15,13%), sementara kawasan lindung atau non-budidaya meliputi area yang lebih luas, yaitu 79.780 hektar (84,87%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Jayapura masih didominasi oleh kawasan alami yang dilindungi.

B. Topografi

Topografi suatu wilayah dapat dianalisis melalui dua parameter utama: kemiringan lereng dan elevasi atau ketinggian tempat. Kedua faktor ini merupakan indikator awal dalam memahami karakteristik bentang alam suatu daerah, seperti yang dikemukakan oleh Santosa dan Muta'ali (2014). Kemiringan lereng bervariasi dari datar hingga sangat curam, sementara ketinggian tempat berkisar dari kurang dari 5 meter hingga melebihi 1000 meter di atas permukaan laut.

1. Kemiringan Lereng

Kota Jayapura menampilkan topografi yang beragam, tercermin dari variasi kelerengan di lima distriknya dengan total luas wilayah 835,28 Km^2. Distrik Muara Tami, yang terluas, didominasi oleh kelerengan 0-8%, menjadikannya area potensial untuk pengembangan pertanian dan pemukiman. Abepura, Distrik terbesar ke-dua, memiliki dominasi kelerengan 8-15%, menunjukkan topografi bergelombang ringan yang cocok untuk pengembangan perkotaan. Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara memiliki distribusi kelerengan yang lebih bervariasi, dengan Jayapura Utara cenderung lebih berbukit. Secara keseluruhan, Kota Jayapura didominasi oleh area dengan kelerengan 0-8% (49,25% dari total luas), diikuti oleh area 8-15% dan 15-25%. Wilayah dengan kelerengan tinggi (>25%) relatif terbatas, namun penting untuk fungsi ekologis. Variasi kelerengan ini memberikan tantangan sekaligus peluang dalam perencanaan tata ruang, memerlukan pendekatan yang berbeda untuk setiap kategori

dalam pengembangan infrastruktur dan tata guna lahan. Pola kelerengan juga berimplikasi pada manajemen air dan drainase Kota Jayapura, di mana area datar memerlukan perhatian khusus untuk pencegahan banjir, sementara area berlereng curam membutuhkan strategi konservasi tanah dan air yang efektif. Karakteristik topografi yang beragam memberikan potensi besar untuk pengembangan Kota Jayapura yang berkelanjutan, namun juga memerlukan perencanaan yang cermat dan terpadu untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik kelerengannya.

2. Ketinggian

Data ketinggian wilayah Kota Jayapura menunjukkan variasi topografi yang signifikan di seluruh distriknya. Mayoritas wilayah kota berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut, mencakup area seluas 371,93 Km^2 atau sekitar 45% dari total luas kota. Distrik Muara Tami mendominasi kategori ini dengan 252,97 Km^2, menegaskan karakteristiknya sebagai wilayah dataran rendah. Ketinggian 100-200 meter menjadi kategori terluas kedua dengan 152,84 Km^2, diikuti oleh ketinggian 200-300 meter seluas 116,65 Km^2.

Sebagian besar wilayah Kota Jayapura berada di ketinggian rendah hingga menengah. Namun, Kota Jayapura juga memiliki area dengan ketinggian lebih dari 500 meter, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Distrik Jayapura Utara menunjukkan distribusi ketinggian yang paling merata, dengan area yang signifikan di setiap kategori ketinggian hingga 800 meter, menggambarkan topografi yang lebih berbukit dan bervariasi. Sebaliknya, Distrik Abepura dan Heram memiliki konsentrasi area di ketinggian yang lebih rendah. Variasi ketinggian ini berimplikasi penting pada perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur Kota Jayapura.

Area dataran rendah yang luas menawarkan potensi untuk pengembangan perkotaan dan pertanian, sementara wilayah yang lebih tinggi dapat dimanfaatkan untuk konservasi, pariwisata, atau

pengembangan terbatas dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pola ketinggian ini juga mempengaruhi iklim mikro, aliran air, dan risiko bencana alam di berbagai bagian kota, yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan Kota Jayapura.

Analisis topografi wilayah menunjukkan variasi yang signifikan dalam karakteristik ketinggian di seluruh distrik.

Tabel 2.2

Luas Persebaran Morfologi di Kota Jayapura

DISTRIK	LUAS KETINGGIAN (Km2)				
	DATAR	LANDAI	PERBUKITAN	GUNUNG/ PEGUNUNGAN	JUMLAH
Muara Tami	294,30	60,92	44,99	31,78	431,99
Abepura	84,73	105,69	46,10	15,68	252,2
Heram	12,95	13,48	7,32	7,39	41,14
Jayapura Selatan	12,26	12,03	9,98	8,33	42,6
Jayapura Utara	7,15	17,67	23,56	18,97	67,35
KOTA JAYAPURA	**411,39**	**209.79**	**131,95**	**82.15**	**835,28**

Sumber: Revisi RTRW Kota Jayapura 2023

Tabel di atas menunjukan secara keseluruhan, wilayah ini didominasi oleh area datar seluas 411,39 Km^2, yang mewakili hampir setengah (49,25%) dari total luas wilayah. Area landai mencakup seperempat (25,12%) dari total luas dengan 209,79 Km^2. Perbukitan dan pegunungan, meskipun lebih sedikit, tetap signifikan dengan luas masing-masing 131,95 Km^2 (15,80%) dan 82,15 Km^2 (9,83%). Distribusi ini mencerminkan keragaman lanskap yang menawarkan berbagai peluang dan tantangan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Area datar dan landai yang luas, mencakup lebih dari tiga perempat (74,37%) total wilayah, menyediakan ruang yang substansial untuk ekspansi perkotaan dan pertanian. Sementara itu, wilayah perbukitan dan pegunungan yang mencakup seperempat (25,63%) dari total luas, berpotensi untuk konservasi alam dan pengembangan pariwisata berbasis alam.

C. Geologi

Kota Jayapura memiliki struktur geologi yang beragam, terdiri dari berbagai jenis batuan dan sedimen yang tersebar luas. Keragaman ini berpotensi menghasilkan beberapa jenis bahan galian.

Muara Tami, dengan luas 431,99 Km^2, menonjol sebagai distrik terbesar. Dominasi formasi Alluvium (198,69 Km^2) dan Batuan Gunung (187,51 Km^2) di wilayah ini menandakan potensi signifikan untuk pengembangan sektor pertanian dan eksplorasi mineral. Kontras dengan Muara Tami, Abepura (252,21 Km^2) menunjukkan keragaman geologis yang lebih besar. Formasi Nubai (121,67 Km^2) dan Formasi Makats (79,62 Km^2) mendominasi wilayah ini, mengindikasikan prospek untuk industri batu gamping dan bahan konstruksi.

Meskipun lebih kecil, Heram (41,13 Km^2) menawarkan variasi geologis yang menarik. Kombinasi Formasi Makats (18,33 Km^2) dan Batuan Ultramafik (14,08 Km^2) di wilayah ini berpotensi mendukung pengembangan industri mineral khusus. Sementara itu, Jayapura Selatan (42,60 Km^2) dan Jayapura Utara (67,35 Km^2) menonjol dengan proporsi Batuan Ultramafik yang signifikan, masing-masing 24,84 Km^2 dan 6,99 Km^2, menunjukkan potensi besar untuk eksplorasi logam berharga. Secara keseluruhan, wilayah ini didominasi oleh Alluvium (254,37 Km^2), Batuan Gunung (194,71 Km^2), dan Formasi Nubai (176,51 km^2). Distribusi ini menciptakan lanskap yang beragam, mulai dari dataran aluvial subur hingga pegunungan kaya mineral. Kehadiran Endapan Pantai Muda, meski terbatas pada 5,57 Km^2 di Muara Tami, membuka peluang untuk pengembangan kawasan pesisir.

D. Hidrologi

Wilayah di Kota Jayapura dianugerahi sumber daya air yang melimpah, dengan 17 Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebar di seluruh area. Potensi ini membuka peluang besar untuk pengembangan energi listrik terbarukan, yang dapat menjadi pendorong ekonomi produktif, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat. Debit air sungai-sungai di wilayah ini bervariasi, dengan Sungai Tami menonjol sebagai sumber air terbesar, mencatatkan volume debit lebih dari 500 M^3 per detik.

Kota Jayapura memiliki dua jenis akuifer: akuifer bebas *(unconfined aquifer)* yang merupakan sumber air tanah dangkal, dan akuifer tertekan *(confined aquifer)* yang menjadi sumber air tanah dalam. Masyarakat memanfaatkan berbagai sumber air bersih, termasuk air sumur, mata air alami, dan pasokan dari PDAM. Air digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan irigasi pertanian. Keragaman penggunaan air ini mencerminkan kompleksitas sistem hidrologi Kota Jayapura.

Meskipun kaya akan sumber daya air, Kota Jayapura menghadapi beberapa tantangan hidrologi. Distribusi air yang tidak merata di seluruh wilayah kota dan potensi pencemaran air akibat aktivitas manusia dan industrialisasi menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi hal ini, upaya konservasi dilakukan melalui perlindungan kawasan lindung, pembatasan pembangunan di area kritis, dan pengelolaan DAS secara terpadu. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air.

Sumber daya air Kota Jayapura menawarkan potensi besar untuk pengembangan di berbagai sektor. Ini mencakup pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah, peningkatan pasokan air bersih untuk mendukung pertumbuhan, dan pengembangan ekowisata berbasis sungai dan danau. Realisasi potensi ini memerlukan pengelolaan yang bijak dan terintegrasi untuk memastikan ketersediaan air jangka panjang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kondisi hidrologi Kota Jayapura yang kaya menjadi aset penting bagi pembangunan berkelanjutan kota. Pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien tidak hanya akan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang.

Dengan pendekatan yang tepat, Kota Jayapura dapat memanfaatkan kekayaan hidrologisnya sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem alaminya.

E. Klimatologi

Klimatologi wilayah ini menunjukkan variasi curah hujan yang signifikan antar distrik. Distrik Muara Tami mencatat curah hujan tertinggi, dengan area seluas 427,61 km^2 menerima 2000-2500 mm hujan per tahun. Abepura, distrik terbesar kedua, memiliki 252,6 km^2 wilayah dengan curah hujan serupa. Heram, meskipun lebih kecil, juga menerima curah hujan 2000-2500 mm/tahun di area seluas 39,77 Km^2.

Tabel 2.3

Luas Curah Hujan Kota Jayapura

Distrik	1500 - 2000 (mm/tahun)	2000 - 2500 (mm/tahun)
Muara Tami	0	427,61
Abepura	0	252,6
Heram	0	39,77
Jayapura Selatan	2,74	39,89
Jayapura Utara	55,74	11,66

Sumber: Rencana Revisi RTRW Kota Jayapura 2023

Jayapura Selatan menampilkan pola curah hujan yang lebih bervariasi, dengan 2,74 Km^2 wilayahnya menerima 1500-2000 mm/tahun, sementara 39,89 Km^2 lainnya menerima 2000-2500 mm/tahun. Jayapura Utara menunjukkan pola yang unik, dengan sebagian besar wilayahnya (55,74 Km^2) menerima curah hujan lebih rendah yaitu 1500-2000 mm/tahun, dan hanya 11,66 Km^2 yang menerima 2000-2500 mm/tahun. Pola distribusi curah hujan hal ini mencerminkan kompleksitas topografi dan pengaruh iklim lokal di setiap distrik. Variasi ini memiliki implikasi penting bagi manajemen sumber daya air, pertanian, dan perencanaan infrastruktur diseluruh wilayah. Pemahaman mendalam tentang pola curah hujan ini sangat penting untuk adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Rata-rata suhu udara minimum mutlak dan maksimum mutlak di wilayah Kota Jayapura selama periode 2019-2023. Analisis terhadap suhu minimum mutlak menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2022, namun sedikit meningkat pada tahun 2023. Rata-rata terendah tercatat pada tahun 2022 (24.0°C), sedangkan tertinggi pada tahun 2020 (25.9°C). Tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, dengan rata-rata 24.6°C.

Umumnya, suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli-Agustus, sementara suhu maksimum tertinggi cenderung terjadi pada bulan September-November. Namun, terdapat beberapa anomali, seperti suhu maksimum yang sangat tinggi pada September 2020 (36.0°C).

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Kawasan Budidaya

Berdasarkan analisis tata ruang wilayah, beberapa area telah diidentifikasi sebagai kawasan potensial untuk pengembangan budidaya. Alokasi lahan terbesar diberikan untuk sektor perumahan, dengan luasan sekitar 3.746 Hektar. Ini menunjukkan prioritas tinggi pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduk. Sektor perkantoran dan perdagangan serta jasa mendapat alokasi yang lebih kecil, masing-masing 95 Hektar dan 327 Hektar, mencerminkan fokus pada pengembangan ekonomi dan layanan publik. Industri diberi ruang sekitar 27 Hektar, yang relatif kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini lebih berfokus pada sektor jasa dan perdagangan daripada manufaktur. Sementara itu, pariwisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan buatan belum mendapat alokasi spesifik, Dimana hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengembangan kedepan sesuai potensi yang ada.

Fasilitas publik mendapat perhatian signifikan dengan alokasi untuk pendidikan (115 Hektar), kesehatan (18 Hektar), dan tempat ibadah (35 Hektar). Proporsi ini mencerminkan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan sosial. Ruang

terbuka non-hijau masih dialokasikan sekitar 3 Hektar, dan perlu ditinjau kembali mengingat pentingnya ruang publik dalam perencanaan Kota Modern. Sektor ekonomi primer, seperti pertambangan dan perikanan mendapat alokasi yang berbeda secara signifikan. Pertambangan dialokasikan 28 Hektar, sementara perikanan mendapat 893 Hektar. Ini menunjukkan potensi perikanan yang jauh lebih besar di Kota Jayapura. Pertanian mendapat alokasi total sekitar 5.686 hektar, terbagi menjadi tanaman pangan (2.767 Hektar), perkebunan (2.482 Hektar), hortikultura (261 Hektar), dan peternakan (176 Hektar). Distribusi ini menggambarkan diversifikasi sektor pertanian dengan fokus utama pada tanaman pangan dan perkebunan.

Kota Jayapura memiliki potensi perikanan yang signifikan dengan alokasi kawasan perikanan seluas ±893 hektar. Letak geografis kota yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan memiliki garis pantai sepanjang 116,77 km, serta perairan teluk, laguna, dan muara sungai, menjadikan sektor perikanan tangkap sebagai salah satu kekuatan utama. Selain itu, keberadaan perairan pesisir yang relatif tenang seperti Teluk Youtefa dan perairan Muara Tami membuka peluang bagi pengembangan perikanan budidaya, termasuk tambak, keramba jaring apung, dan budidaya laut (marikultur).

Sektor pertanian di Kota Jayapura juga menunjukkan daya dukung yang cukup luas dengan alokasi sekitar 5.686 hektar. Luasan ini terdiri dari tanaman pangan (2.767 ha), perkebunan (2.482 ha), hortikultura (261 ha), dan peternakan (176 ha). Wilayah Distrik Muara Tami, terutama kawasan Koya Barat, Koya Timur, dan Koya Tengah, menjadi sentra utama pertanian kota dengan dominasi padi sawah, jagung, hortikultura (sayuran, cabai, tomat), dan buah-buahan tropis. Sektor perkebunan di wilayah ini juga berkontribusi melalui komoditas kakao, kelapa, dan pala, meskipun skalanya relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten sentra perkebunan seperti Keerom dan Sarmi.

Hutan produksi mendapat alokasi terbesar dengan total 48.278 Hektar, terbagi menjadi hutan produksi umum (19.242 Hektar), terbatas

(18.474 Hektar), dan konversi (10.562 Hektar). Hal ini menunjukkan pentingnya sektor kehutanan dalam ekonomi dan ekologi wilayah tersebut. Proporsi yang besar ini juga mengindikasikan upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya hutan. Perhatian pembangunan terhadap sektor informal terlihat dari rencana pengembangan di kawasan perdagangan, perkantoran, dan pusat pedagang kaki lima di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Meskipun belum terdapat alokasi lahan spesifik, pengakuan terhadap sektor ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya ekonomi informal dalam struktur ekonomi lokal. Rencana kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam pengembangan ekonomi.

Secara keseluruhan, perencanaan ini mencerminkan upaya komprehensif untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan mendorong perkembangan ekonomi yang seimbang di berbagai sektor. Namun, beberapa aspek, seperti alokasi untuk industri dan ruang terbuka non-hijau perlu ditinjau kembali untuk memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan seimbang di masa depan.

B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan area yang secara resmi ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, baik yang bersifat alami maupun buatan. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 yang mengatur tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Tujuan utama dari penetapan kawasan lindung ini adalah untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya. Fungsi perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kawasan lindung berperan dalam menjamin pasokan air bagi daerah sekitarnya. Kedua, area ini berfungsi sebagai benteng alami untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Ketiga, kawasan lindung memiliki peran dalam meminimalkan dampak yang ditimbulkan

oleh gempa bumi. Terakhir, area ini juga berperan penting dalam mempertahankan fungsi hidrologi ekosistem di kawasan sekitarnya.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kota Jayapura, sebagai ibukota Provinsi Papua, menghadapi tantangan yang signifikan untuk daya tampung lingkungan khususnya dalam pengelolaan sumber daya air seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat. Dalam konteks ini, pemahaman tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan penyediaan air bersih bagi masyarakat kota.

A. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Kondisi Jasa Lingkungan

1. Jasa Penyedia Air

Distrik Abepura sebagian besar memiliki jasa penyedia air sedang sebesar 18.694,46 ha. Pada Distrik heram tidak terdapat jasa penyedia air sangat tinggi. Pada Distrik Jayapura Selatan didominasi oleh jasa penyedia air tinggi. Pada Distrik Jayapura Utara tidak terdapat jasa penyedia air rendah. Pada Distrik Mara Tami sebagian memiliki jasa penyedia air tinggi sebesar 21.559,49 ha.

Tabel 2.4

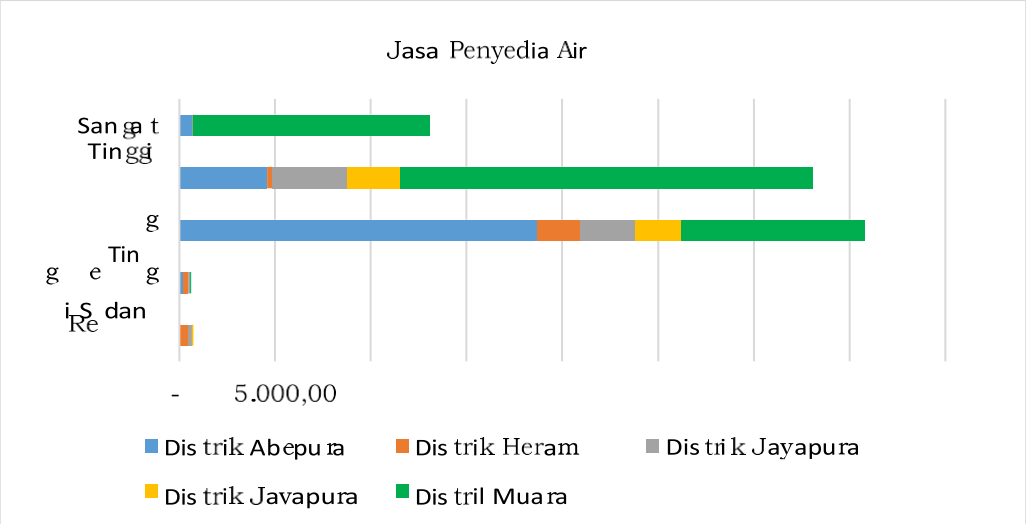
Jasa Penyedia Air (Ha)

Distrik	Fungsi Jasa Penyediaan Air					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Luas (Ha)
Distrik Abepura	42,15	206,36	18.694,46	4.586,14	720,21	24.249,32
Distrik Heram	451,06	259,84	2.244,85	273,50		3.229,26
Distrik Jayapura Selatan	149,12	93,10	2.868,08	3.915,55	4,06	7.029,92
Distrik Jayapura Utara	93,66		2.414,00	2.750,19	3,92	5.261,76
Distrik Muara Tami		46,36	9.567,62	21.559,49	12.344,39	43.517,86
Luas Total (Ha)	**735,99**	**605,67**	**35.789,02**	**33.084,87**	**13.072,57**	**83.288,12**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar 2.2.

Jasa Penyedia Air



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, Distrik Muara Tami memiliki jasa penyedia air yang sangat tinggi sebesar 12,344.39 ha dan tinggi sebesar 21,559.49 ha.

2. Jasa Pengatur Tata Air

Jasa pengatur tata air di Kota Jayapura dimuat pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2.5

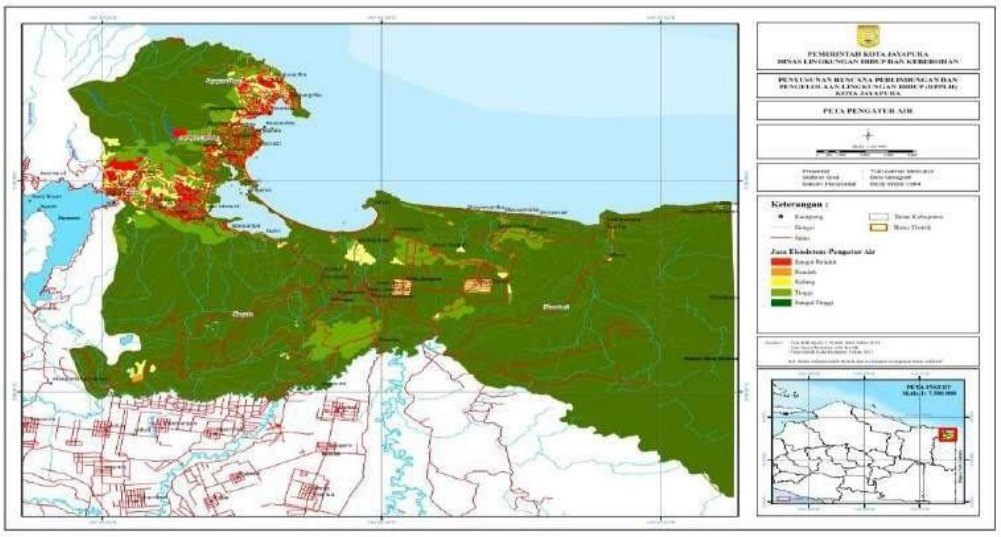
Jasa Pengatur Tata Air (Ha)

Fungsi Jasa Pengatur Tata Air						
Distrik	**Sangat Rendah**	**Rendah**	**Sedang**	**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	**Luas (Ha)**
Distrik Abepura		53.93	284.34	2,182.71	21,728.34	24,249.32
Distrik Heram	229.37		837.93	929.62	1,232.33	3,229.26
Distrik Jayapura Selatan	83.29	27.72	433.52	1,993.19	4,492.20	7,029.92
Distrik Jayapura Utara	80.42		946.74	703.67	3,530.93	5,261.76
Distril Muara Tami		26.98	665.94	1,597.51	41,227.43	43,517.86
Luas Total (Ha)	393.08	108.62	3,168.48	7,406.69	72,211.24	83,288.12

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar 2.3.

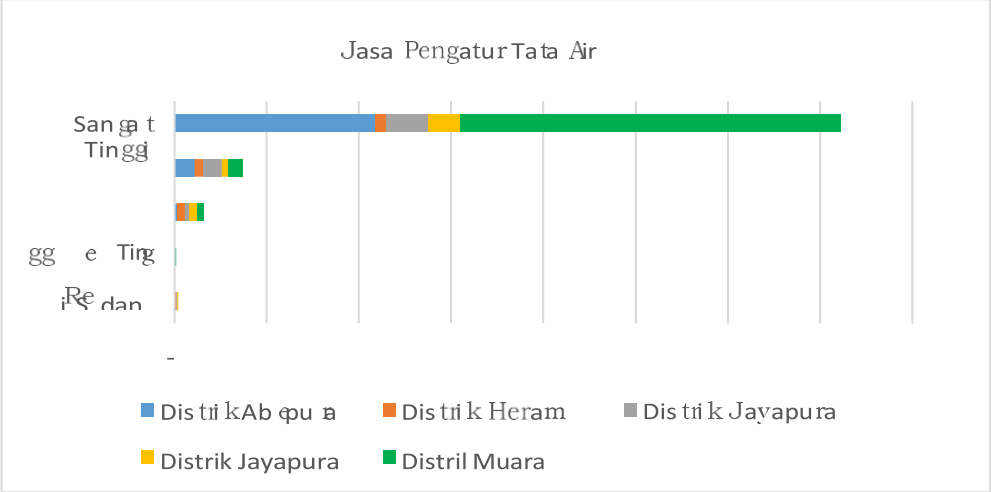
Jasa Pengatur Tata Air



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar 2.4.

Grafik Jasa Pengatur Air di Kota Jayapura



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel dan gambar di atas Distrik Muara Tami memiliki jasa pengatur tata air sangat tinggi sebesar 41,227.43. Ha.

3. Rawan Banjir

Setiap kelurahan dan kampung di distrik Abepura memiliki kerawananan banjir rendah sampai sangat tinggi. Adapun rincian kondisi per kelurahan dan kampung dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.6

Luas Rawan Banjir Distrik Abepura (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Banjir Renda	Rawan Banjir Sedan	Rawan Banjir	Luas (ha)
Kel. Abepantai	2196.92	496.21	265.90	20.36	2979.39
Kel. Asano	2365.40	262.96	203.59	50.92	2882.87
Kel. Awiyo	1417.07	151.19	60.10	1.08	1629.43
Kel. Kota Baru	1122.94	95.38	5.90		1224.22
Kel. Vim	231.66	19.53	96.91	0.03	348.14
Kel. Wahno	339.94	22.64	73.99		436.57
Kel. Wai Mhorock	28.22	5.23	128.36	31.58	193.39
Kel. Yobe	1030.61	65.92	27.38	1.92	1125.82
Kp. Enggros	77.13	136.26	19.81	12.60	245.81
Kp. Koya Koso	6352.08	1389.17	470.54	10.40	8222.19
Kp. Nafri	4931.47	543.61	420.23	38.65	5933.97

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.7

Luas Rawan Banjir Distrik Heram (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Banjir Rendah	Rawan Banjir Sedang	Rawan Banjir TInggi
Kel. Hedam	363.44	74.92	6.93	
Kel. Waena	9.90	23.92	15.99	
Kel. Yabansai	990.59	112.50	4.39	
Kp. Waena	972.51	30.69	112.32	52.88
Kp. Yoka	1200.19	44.57	61.17	36.50

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kampung Waena dan Kampung Yoka memiliki potensi kerawanan banjir tinggi, sementara Kelurahan Hedam, Kelurahan Waena dan Kelurahan Yabansai berpotensi raan banjir rendah dan sedang.

Tabel 2.8

Luas Rawan Banjir Distrik Jayapura Selatan (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan
Kel. Ardipura	2582.59
Kel. Argapura	105.03
Kel. Entrop	1124.22
Kel. Hamadi	170.36
Kel. Numbai	102.27
Kp. Tahima Soroma	4.88
Kp. Tobati	170.44

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kelurahan dan Kampung di Distrik Jayapura Selatan seluruhnya tidak rawan banjir.

Tabel 2.9

Luas Rawan Banjir Distrik Jayapura Utara (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan
Kel. Angkasapura	1.256,04
Kel. Bhayangkara	1.723,39
Kel. Gurabesi	1.467,96
Kel. Imbi	176,36
Kel. Mandala	56,24
Kel. Tanjung Ria	1.824,76
Kel. Trikora	124,61
Kp. Kayobatu	105,52

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kelurahan dan kampung di Distrik Jayapura Utara seluruhnya tidak rawan banjir.

Tabel 2.10

Luas Rawan Banjir Distrik Muara Tami (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Banjir Rendah	Rawan Banjir Sedang	Rawan Banjir TInggi
Kel. Koya Barat	747.91	720.11	1481.62	657.23
Kel. Koya Tengah	239.30	185.10	93.63	0.88
Kel. Koya Timur	3196.73	4162.91	1725.36	840.39
Kp. Holtekamp	286.83	443.40	779.46	95.56
Kp. Mosso	14366.15	5292.31	1691.33	145.99
Kp. Skouw Mabo	444.51	442.99	12.86	
Kp. Skouw Sae	423.38	1163.50	731.99	457.09
Kp. Skouw Yambe	1473.65	850.68	46.54	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kampung Skouw Mabo dan Skouw Yambe di Distrik Muara Tami tidak berpotensi rawan banjir tinggi.

4. Rawan Longsor

Luas rawan longsong berdasarkan kecamatan dimuat sebagai berikut:

Tabel 2.11

Luas Rawan Longsor Distrik Abepura (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak	Rawan Longsor	Rawan Longsor	Rawan Longsor
Kel. Abepantai	1717.84	34.74	1226.82	
Kel. Asano	1589.55	158.84	1134.49	
Kel. Awiyo	753.50	232.39	643.54	
Kel. Kota Baru	694.07	2.79	527.36	
Kel. Vim	135.48		212.65	
Kel. Wahno	139.98		296.59	
Kel. Wai Mhorock	186.70		6.69	
Kel. Yobe	589.44	147.36	389.02	
Kp. Enggros	245.81			
Kp. Koya Koso	5657.48		2564.71	
Kp. Nafri	4072.48		1861.49	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di distrik Abepura tidak rawan longsor tinggi.

Tabel 2.12

Luas Rawan Longsor Distrik Heram (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Hedam	171.94		273.36	
Kel. Waena	48.89		0.92	
Kel. Yabansai	312.14		795.33	
Kp. Waena	533.49		634.91	
Kp. Yoka	737.12		605.31	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di Distrik Heram tidak rawan longsor tinggi.

Tabel 2.13

Luas Rawan Longsor Distrik Jayapura Selatan (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Ardipura	826.37		1756.22	
Kel. Argapura	38.70		66.33	
Kel. Entrop	466.54		657.69	
Kel. Hamadi	127.69		42.67	
Kel. Numbai	32.68		69.59	
Kp. Tahima Soroma	4.88			
Kp. Tobati	170.44			

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di distrik Jayapura Selatan tidak rawan longsor tinggi.

Tabel 2.14

Luas Rawan Longsor Distrik Jayapura Utara (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Angkasapura	237.23		234.31	784.50
Kel. Bhayangkara	508.96		899.53	314.90
Kel. Gurabesi	436.93		1031.02	
Kel. Imbi	50.50		125.86	
Kel. Mandala	53.86		2.38	
Kel. Tanjung Ria	319.75		368.11	1136.89
Kel. Trikora	36.00		88.61	
Kp. Kayobatu	69.42		36.09	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Imbi, Kelurahan Mandala, Kelurahan Trikora dan Kampung Kayubatu tidak berpotensi rawan longsor tinggi, namun seluruh kelurahan dan kampung berpotensi rawan longsor sedang.

Tabel 2.15

Luas Rawan Longsor Distrik Muara Tami (Ha)

Kelurahan/Kampung	Tidak Rawan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi
Kel. Koya Barat	3381.38		225.49	
Kel. Koya Tengah	335.69		183.21	
Kel. Koya Timur	8830.69		1094.70	
Kp. Holtekamp	1437.67		167.59	
Kp. Mosso	15248.54		6247.24	
Kp. Skouw Mabo	596.24		304.11	
Kp. Skouw Sae	2735.21		40.74	
Kp. Skouw Yambe	1526.76		844.11	

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Seluruh kelurahan dan kampung di Disrik Muara Tami tidak berpotensi rawan longsor tinggi, namun seluruhnya berpotensi rawan longsor sedang.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Serta Penduduk Yang Terlampaui Kebutuhan Air

Status daya dukung dan daya tampung air diketahui dengan menghitung selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Status DDDTLH air diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu terlampaui dan belum terlampaui. Kategori terlampaui dipahami sebagai kondisi pada saat kebutuhan air melampaui/melebihi ketersediaannya. Sebaliknya, kategori belum terlampaui didefinisikan sebagai kondisi pada saat kebutuhan air masih lebih rendah dibandingkan ketersediaannya.

Pada tabel di bawah terlihat bahwa cadangan air secara alami pada tiap distrik masih aman.

Tabel 2.16

Ketersediaan Air Berdasarkan Cadangan (Prediksi Ekplorasi GIS)

DISTRIK	KELURAHAN/KAMPUNG	KETERSEDIAAN AIR (M^3/Tahun)
Distrik Abepura	Kel. Abepantai	381,233,278
	Kel. Asano	747,472,581
	Kel. Awiyo	289,787,170
	Kel. Kota Baru	289,315,318
	Kel. Vim	196,872,399
	Kel. Wahno	212,005,562
	Kel. Wai Mhorock	162,726,240
	Kel. Yobe	176,667,794
	Kp. Enggros	3,027,423,553
	Kp. Koya Koso	2,610,461,035
	Kp. Nafri	1,283,829,793
Distrik Heram	Kel. Hedam	164,177,502
	Kel. Waena	53,946,141
	Kel. Yabansai	680,784,898
	Kp. Waena	1,141,950,598
	Kp. Yoka	519,045,079
Distrik Jayapura	Kel. Ardipura	571,730,409
	Kel. Argapura	77,801,942
	Kel. Entrop	341,070,849
	Kel. Hamadi	137,050,416
	Kel. Numbai	49,062,677
	Kp. Tahima Soroma	316,157
	Kp. Tobati	894,523,472
Distrik Jayapura Utara	Kel. Angkasapura	284,220,157
	Kel. Bayangkara	212,061,177
	Kel. Gurabesi	147,569,651
	Kel. Imbi	322,946,110
	Kel. Mandala	55,788,511
	Kel. Tanjung Ria	844,148,688
	Kel. Trikora	82,805,336
	Kp. Kayobatu	23,564,508
Distrik Muara Tami	Kel. Koya Barat	1,868,345,628
	Kel. Koya Tengah	340,582,238
	Kel. Koya Timur	2,981,913,983
	Kp. Holtekamp	2,483,204,144
	Kp. Mosso	3,353,099,001
	Kp. Skouw Mabo	451,965,459
	Kp. Skouw Sae	885,443,850
	Kp. Skouw Yambe	617,599,057
Grand Total		34,608,522,088

Sumber KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Status Daya dukung dan daya tampung air berdasarkan yang telah tereskploitasi atau termanfaatkan melalui PDAM, tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

Standar Kebutuhan Air Domestik

No.	Kategori Kota	Jumlah Populasi Orang	Konsumsi Air (1/orang/hari)
1	Metropolitan	>1.000.000 capita	190
2	Large City	500.000-1.000.000	170
3	Medium City	100.000-500.000	150
4	Small City	20.000-100.000	130
5	Kecamatan/sub-regional city	3.000-20.000	100
6	Rural City	0-3.000	60

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

SNI kebutuhan air domestic untuk kota sedang sebesar 150 l/orang/hari.

Tabel 2.18

Potensi Ketersediaan Air Kota Jayapura yang Dapat Dimanfaatkan PDAM (Sumber RTRW 2013-2033)

No	Nama Intake	Debit Andalan (L/det)
1	Sungai APO	13
2	Sungai Anafre	34
3	Sungai Kloofkamp	242
4	Sungai Entrop	123
5	Sungai Kujabu	282
6	Sungai Hubai	135
7	Sungai Siborogonyi	140
8	Sungai Buper	5
9	Sungai Tami	26300
10	Danau Sentani	1850
11	Air tanah Dangkal	3
12	Mata Air	500
	Total	**29.627**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.19

Kebutuhan Air Domestik dalam satuan liter/hari

Tahun	Kebutuhan Air (liter/hari)
2021	54,984,120.00
2022	56,012,323.04
2023	57,059,753.48
2024	58,126,770.88
2025	59,213,741.49
2026	60,321,038.46

2027	61,449,041.88

Tahun	Kebutuhan Air (liter/hari)
2028	62,598,138.96
2029	63,768,724.16
2030	64,961,199.30

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Ketersediaan air PDAM sebesar 81.302.400 liter/hari. Pada tabel di atas terlihat bahwa kebutuhan air terus meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2030, dimana meningkat dari 54.984.120 liter/hari menjadi 64,961,199.30 liter/hari. Data pada tabel di atas dengan catatan ketersediaan air akan konstan jika tidak ada perubahan penutupan lahan di hulu daerah resapan air dan tangkapan air, namun jika terjadi perubahan tutupan lahan maka krisis air Kota Jayapura akan mengalami percepatan sebelum tahun 2043. Analisis keutuhan air pada tabel di atas hanya dikaji untuk kebutuhan air domestik saja.

Tabel 2.20

Standar Kebutuhan Air Non Domestik

No.	Jenis Kegiatan	Standar Kebutuhan Air
1	Pertanian (Ha)	300 m3/ha/Tahun
2	Industri (Ha)	0,3 liter/detik/ha
3	Perdagangan dan Jasa	5 m3/hari/ha
4	Fasilitas Umum dan Sosial	30% kebutuhan domestik
5	Fasilitas Pemadam Kebakaran	14% kebutuhan domestik
6	Taman dan Lajur Hijau	3% kebutuhan domestik
7	Kehilangan Air	28% kebutuhan domestik

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel pola ruang dijadikan dasar untuk menghitung kebutuhan air non domestik. Adapun kebutuhan air domestik disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.21

Kebutuhan Air Domestik

Tahun	Kebutuhan Air Domestik (m3/Tahun)
Jan 1, 2020	59,771.70
Jan 1, 2022	61,372.20
Jan 1, 2024	63,015.56
Jan 1, 2026	64,702.92
Jan 1, 2028	66,435.46
Jan 1, 2030	68,214.40
Jan 1, 2032	70,040.96
Jan 1, 2034	71,916.44
Jan 1, 2036	73,842.14
Jan 1, 2038	75,819.41
Jan 1, 2040	77,849.61
Jan 1, 2042	79,934.18
Jan 1, 2044	82,074.57
Jan 1, 2046	84,272.27
Jan 1, 2048	86,528.82
Jan 1, 2050	88,845.80
Jan 1, 2052	91,224.81

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Standar SNI kebutuhan air domestik untuk kota sedang adalah 150 l/orang/hari. Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kebutuhan air domestic tahun 2022-2052 meningkat dari 61372,20 m3/tahun menjadi 91224,81 m3/Tahun pada akhir perencanaan. Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah 6,65% dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 398478 jiwa.

Kebutuhan Air Non Domestik:

Kebutuhan air non domestic terdiri dari Kebutuhan air pertanian, Kebutuhan air perdagangan dan jasa, Kebutuhan air fasilitas pemadam kebakaran, Kebutuhan air industry, Kebutuhan air fasilitas umum dan social, Kebutuhan air Taman dan Jalur hijau. Selain kebutuhan air domestic dan non domestik terdapat juga prediksi kehilangan air.

Tabel 2.22

Kebutuhan Air Non Domestik (M^3/Tahun)

Tahun	Kebutuhan Air Pertanian	Kebutuhan Air Perdagangan & Jasa	Kebutuhan Air Fasilitas Pemadam Kebakaran	Kebutuhan Air Industri	Kebutuhan Air Fasilitas Umum dan Sosial	Kebutuhan Air Taman & Jalur Hijau	Kehilangan Air
Jan 1, 2022	44,801,706,172.29	746,695,102.87	8,592.11	5,161,156,551.05	18,411.66	1,841.17	17,184.22
Jan 1, 2024	46,001,356,530.28	766,689,275.50	8,822.18	5,299,356,272.29	18,904.67	1,890.47	17,644.36
Jan 1, 2026	47,233,129,793.94	787,218,829.90	9,058.41	5,441,256,552.26	19,410.88	1,941.09	18,116.82
Jan 1, 2028	48,497,886,114.79	808,298,101.91	9,300.96	5,586,956,480.42	19,930.64	1,993.06	18,601.93
Jan 1, 2030	49,796,508,676.52	829,941,811.28	9,550.02	5,736,557,799.53	20,464.32	2,046.43	19,100.03
Jan 1, 2032	51,129,904,311.73	852,165,071.86	9,805.74	5,890,164,976.71	21,012.29	2,101.23	19,611.47
Jan 1, 2034	52,499,004,135.20	874,983,402.25	10,068.30	6,047,885,276.37	21,574.93	2,157.49	20,136.60
Jan 1, 2036	53,904,764,194.03	898,412,736.57	10,337.90	6,209,828,835.15	22,152.64	2,215.26	20,675.80
Jan 1, 2038	55,348,166,135.33	922,469,435.59	10,614.72	6,376,108,738.79	22,745.82	2,274.58	21,229.43
Jan 1, 2040	56,830,217,891.64	947,170,298.19	10,898.95	6,546,841,101.12	23,354.88	2,335.49	21,797.89
Jan 1, 2042	58,351,954,384.80	972,532,573.08	11,190.79	6,722,145,145.13	23,980.26	2,398.03	22,381.57
Jan 1, 2044	59,914,438,248.65	998,573,970.81	11,490.44	6,902,143,286.24	24,622.37	2,462.24	22,980.88
Jan 1, 2046	61,518,760,571.04	1,025,312,676.18	11,798.12	7,086,961,217.78	25,281.68	2,528.17	23,596.24
Jan 1, 2048	63,166,041,655.79	1,052,767,360.93	12,114.04	7,276,727,998.75	25,958.65	2,595.86	24,228.07
Jan 1, 2050	64,857,431,804.94	1,080,957,196.75	12,438.41	7,471,576,143.93	26,653.74	2,665.37	24,876.82
Jan 1, 2052	66,594,112,122.07	1,109,901,868.70	12,771.47	7,671,641,716.46	27,367.44	2,736.74	25,542.95

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.23

Total Kebutuhan Air dan Ketersediaan Air Eksplorasi GIS (M^3/Tahun)

Tahun	Total Kebutuhan Air Kota Jayapura (m3/Tahun)	Ketersediaan Air Eksplorasi (m3/Tahun)	Selisih Ekplorasi (m3/Tahun)
Jan 1, 2020	49,387,228,833.68	34,608,522,088.00	-14,778,706,745.68
Jan 1, 2022	50,709,665,227.56	34,608,522,088.00	-16,101,143,139.56
Jan 1, 2024	52,067,512,355.29	34,608,522,088.00	-17,458,990,267.29
Jan 1, 2026	53,461,718,406.21	34,608,522,088.00	-18,853,196,318.21
Jan 1, 2028	54,893,256,959.18	34,608,522,088.00	-20,284,734,871.18
Jan 1, 2030	56,363,127,662.52	34,608,522,088.00	-21,754,605,574.52
Jan 1, 2032	57,872,356,931.99	34,608,522,088.00	-23,263,834,843.99
Jan 1, 2034	59,421,998,667.60	34,608,522,088.00	-24,813,476,579.60
Jan 1, 2036	61,013,134,989.50	34,608,522,088.00	-26,404,612,901.50
Jan 1, 2038	62,646,876,993.67	34,608,522,088.00	-28,038,354,905.67
Jan 1, 2040	64,324,365,527.78	34,608,522,088.00	-29,715,843,439.78
Jan 1, 2042	66,046,771,987.83	34,608,522,088.00	-31,438,249,899.83
Jan 1, 2044	67,815,299,136.21	34,608,522,088.00	-33,206,777,048.21
Jan 1, 2046	69,631,181,941.49	34,608,522,088.00	-35,022,659,853.49
Jan 1, 2048	71,495,688,440.91	34,608,522,088.00	-36,887,166,352.91
Jan 1, 2050	73,410,120,625.77	34,608,522,088.00	-38,801,598,537.77
Jan 1, 2052	75,375,815,350.65	34,608,522,088.00	-40,767,293,262.65

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah 6,65% dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 398478 jiwa. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan daya dukung air kota Jayapura telah terlampaui sejak tahun 2020–2052. Ketersedian dan kebutuhan air eksisting yang dimanfaatkan oleh PDAM:

Tabel 2.24

Potensi Ketersediaan Air Bersih Kota Jayapura yang Dapat Dimanfaatkan PDAM (Sumber RTRW 2013-2033)

No	Nama Intake	Debit Andalan (L/det)
1	Sungai APO	13
2	Sungai Anafre	34
3	Sungai Kloofkamp	242
4	Sungai Entrop	123
5	Sungai Kujabu	282
6	Sungai Hubai	135
7	Sungai Siborogonyi	140
8	Sungai Buper	5
9	Sungai Tami	26300
10	Danau Sentani	1850
11	Air tanah Dangkal	3
12	Mata Air	500
	Total	29.627

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Idealnya sebuah kota memerlukan kebutuhan air non domestic terdiri dari Kebutuhan air pertanian, Kebutuhan air perdagangan dan jasa, Kebutuhan air fasilitas pemadam kebakaran, Kebutuhan air industry, Kebutuhan air fasilitas umum dan social, Kebutuhan air Taman dan Jalur hijau. Selain kebutuhan air domestic dan non domestik terdapat juga prediksi kehilangan air. Namun kebutuhan air eksisting saat ini untuk di kota Jayapura adalah Kebutuhan air perdagangan dan jasa, Kebutuhan air fasilitas pemadam kebakaran, Kebutuhan air fasilitas umum dan social, dan Kebutuhan air Taman dan Jalur hijau.

Tabel 2.25

Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik (M3/Tahun)

Tahun	Kebutuhan Air Domestik (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Non Domestik (M3/Tahun)
2022	61,372.20	50,709,603,855.36
2024	63,015.56	52,067,449,339.74
2026	64,702.92	53,461,653,703.29
2028	66,435.46	54,893,190,523.72
2030	68,214.40	56,363,059,448.12
2032	70,040.96	57,872,286,891.03
2034	71,916.44	59,421,926,751.16
2036	73,842.14	61,013,061,147.36
2038	75,819.41	62,646,801,174.27
2040	77,849.61	64,324,287,678.16
2042	79,934.18	66,046,692,053.65
2044	82,074.57	67,815,217,061.63
2046	84,272.27	69,631,097,669.22
2048	86,528.82	71,495,601,912.09
2050	88,845.80	73,410,031,779.97
2052	91,224.81	75,375,724,125.84

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Standar SNI kebutuhan air domestik untuk kota sedang adalah 150 l/orang/hari. Berdasarkan hasil simulasi di atas terlihat kebutuhan air pada Tahun 2022- 2052 meningkat lebih besar dari ketersediaan air, artinya telah terjadi krisis air di Kota Jayapura.

C. Daya Dukung Penyediaan Energi Pangan

Kapasitas kebutuhan pangan masyarakat dihitung berdasarkan rata–rata kebutuhan kalori per hari selama periode satu tahun yaitu 2500 kkal/hari. Kestersedian energi pangan Kota Jayapura 26.408.123,923 kkal/tahun dan kebutuhan energy pangan 130.694.000

kkal/tahun, sehingga selisih energy pangan kota Jayapura sebesar 26.277.429.923 kkal/tahun (RPPLH Papua Final, 2022). Produksi pangan kota Jayapura adalah : padi (5846,87 ton), ubi jalar (618,24 ton), dan sagu (742,50 ton).

Tabel 2.26

Ketersediaan Pangan Tiap Distrik

Distrik	Ketersedian Pangan (Kkal/Thn)
Distrik Abepura	3,388,587,865
Distrik Heram	56,038,942
Distrik Jayapura Selatan	24,016,689
Distrik Jayapura Utara	96,066,757
Distrik Muara Tami	22,585,634,549
Grand Total	26,408,123,934

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel di bawah, terlihat prediksi kebutuhan pangan penduduk Kota Jayapura. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan pangan penduduk Distrik Abepura tertinggi dan terendah adalah Distrik Muara Tami.

Tabel 2.27

Kebutuhan Pangan Tiap Distrik

Tahun	Keb. Pangan Japut	Keb. Pangan Japsel	Keb. Pangan Abepura	Keb. Pangan Muara Tami	Keb. Pangan Heram
2021	16,840,950.00	21,192,916.67	22,107,733.33	3,397,000.00	11,864,595.83
2023	17,476,690.64	21,992,942.70	22,942,293.41	3,525,235.70	12,312,480.65
2025	18,136,430.30	22,823,169.47	23,808,357.88	3,658,312.25	12,777,272.98
2027	18,821,074.92	23,684,737.04	24,707,116.01	3,796,412.41	13,259,611.07
2029	19,531,564.66	24,578,828.52	25,639,801.98	3,939,725.80	13,760,157.28
2031	20,268,875.17	25,506,671.68	26,607,696.55	4,088,449.22	14,279,598.95
2033	21,034,018.93	26,469,540.63	27,612,128.85	4,242,786.91	14,818,649.38
2035	21,828,046.62	27,468,757.58	28,654,478.15	4,402,950.81	15,378,048.80
2037	22,652,048.61	28,505,694.67	29,736,175.82	4,569,160.83	15,958,565.38
2039	23,507,156.43	29,581,775.80	30,858,707.24	4,741,645.24	16,560,996.27
2041	24,394,544.29	30,698,478.67	32,023,613.87	4,920,640.88	17,186,168.75
2043	25,315,430.78	31,857,336.72	33,232,495.37	5,106,393.54	17,834,941.29
2045	26,271,080.44	33,059,941.31	34,487,011.77	5,299,158.32	18,508,204.80

Tahun	Keb. Pangan Japut	Keb. Pangan Japsel	Keb. Pangan Abepura	Keb. Pangan Muara Tami	Keb. Pangan Heram
2047	27,262,805.59	34,307,943.84	35,788,885.77	5,499,199.90	19,206,883.79
2049	28,291,968.05	35,603,058.09	37,139,905.11	5,706,792.99	19,931,937.70
2051	29,359,981.07	36,947,062.49	38,541,925.02	5,922,222.66	20,684,362.17
2053	30,468,311.25	38,341,802.65	39,996,870.74	6,145,784.73	21,465,190.43

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

D. Daya Dukung Keanekaragaman Hayati

1. Daya Dukung Kelestarian Hutan

Daya dukung kelestarian hutan didekati dengan daya dukung fungsi lindung yang menggambarkan alokasi fungsi lindung di suatu wilayah. Alokasi fungsi lindung tersebut ditentukan berdasarkan alokasi fungsi ruang yang terdapat dalam pola ruang wilayah. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan (Muta'ali, 2003).

Kasus alih fungsi lahan terjadi pada beberapa wilayah yang terdapat di Kota Jayapura. Alih fungsi lahan yang terjadi dapat berdampak pada penurunan fungsi beberapa jenis ekosistem seperti hutan lindung, mangrove, pantai, daerah aliran sungai, bencana alam (banjir dan kekeringan) serta konflik sosial yang dapat mengancan keberlangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada, maka perlu dilakukan kajian terhadap daya dukung fungsi lindung yang ada di Kota Jayapura. Daya dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Oleh karena itu, semakin mendekati nilai 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut.

Analisis daya dukung fungsi lindung di Kota Jayapura dihitung berdasarkan per wilayah administrasi, yaitu tiap distrik yang berada di Kota Jayapura. Hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung yang dilakukan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.28

Pola Ruang Kota Jayapura (Berdasarkan RTRW 2013-2033) (Ha)

POLA RUANG	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Cagar Alam		1290.04	2632.83	5771.14		9694.02
Hutan Lindung	567.82	119.66	116.93		5546.24	6350.64
Cagar Budaya	43.06	16.22	1.75		271.90	332.92
Resapan Air	1533.68	642.37	319.08	809.19	3238.18	6542.50
RTH Perlindungan	6.39	33.14	98.42	166.43	215.15	519.54
RTH Sempadan Jalan	48.90	1.84	21.46	0.43	7.61	80.24
RTH Sempadan Sungai	362.48	33.33	10.03	124.72	2302.27	2832.83
Ruang Terbuka Hijau	15.27	29.11	17.80	13.17		75.36
Sempadan Danau	49.97	192.15			12.76	254.89
Sempadan Pantai					116.12	116.12
Sungai	2.44		1.26	5.46	553.85	563.01
Hutan Kota Botani	598.09					598.09
Taman Wisata	127.93		180.34			308.26
Danau	50.11	1222.13			7.03	1279.26
Gambut					1175.92	1175.92
Hutan Kota	400.16	305.35	795.82	381.21	82.56	1965.09
Hankam	10.75	16.81	30.10	11.48	51.80	120.93
Hortikultura	69.58				191.36	260.95
Hutan Produksi	5769.83	921.07		1857.83	1752.67	10301.40
Hutan Produksi	12410.97	2909.93			2951.66	18272.56
Hutan Produksi Tetap	1710.89	198.09			15673.25	17582.22
Industri	5.83	7.32	16.80	1.00		30.95
Kesehatan	4.71	3.57	0.86	7.20	9.67	26.01
Pantai			11.09	9.95		21.04
Pariwisata	1.53			66.14	47.63	115.30
Pendidikan	74.53	55.02	11.22	21.65	2.25	164.67
Perdagangan dan Jasa	81.70	18.40	65.02	32.69	187.22	385.03
Peribadatan	19.62	6.47	8.44	16.24		50.77
Perikanan	2.43				893.38	895.82
Perkantoran	32.72	23.01	15.80	64.74		136.27
Perkebunan	1151.47				1330.31	2481.78

POLA RUANG	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Perkuburan	13.61	2.09	0.87	1.13		17.70
Permukiman Kepadatan Rendah	275.50	10.84	11.77		667.36	965.46
Permukiman Kepadatan Sedang	599.22	300.16	273.39	309.94	2214.55	3697.27
Permukiman Kepadatan Tinggi	92.58		118.30	134.97		345.85
Pertambangan		14.63	12.98			27.61
Pertanian Tanaman		0.00			2766.68	2766.68
Peternakan					175.95	175.95
Ruang Terbuka Non	0.10		2.35	0.85		3.30
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	17.24					17.24
Grand Total	26151.11	8372.78	4774.69	9807.56	42445.31	91551.45

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data-data daya dukung fungsi lindung di tiap distrik, pada Kota Jayapura memperlihatkan nilai tertinggi terdapat pada Distrik Jayapura Utara dengan nilai sebesar 0,867. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hampir mendekati angka 1 yang artinya semakin baik fungsi lindung di wilayah tersebut. Sedangkan untuk nilai terendah untuk fungsi lindung di Kota Jayapura yaitu Distrik Muara Tami dengan nilai sebesar 0,665. Namun nilai yang didapatkan oleh Distrik Muara Tami hampir masih mendekati angka satu, sehingga distrik ini dapat dikatakan memiliki fungsi lindung yang baik. Secara keseluruhan daya dukung fungsi lindung di kota Jayapura dalam keadaan baik karena nilainya mendekati 1 yaitu 0.707.

E. Daya Dukung dan Daya Tampung Demografis

Daya Dukung Demografis adalah kemampuan untuk mendistribuskan penduduk ke suatu daerah tertentu. Daya dukung demografi ini berhubungan dengan ketersediaan lahan. Lahan merupakan bagian dari bentang alam (landscape) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi bahkan keadaan alami (natural vegetation) yang semuanya

secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lahan dalam pengertian yang lebih luas termasuk yang telah dipengaruhi oleh berbagai aktifitas manusia baik di masa lalu maupun pada masa sekarang. Dalam usaha melakukan penyebaran penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang diperlukan perhatian terhadap penyediaan lahan. Untuk melihat apakah luas lahan yang ada di tiap kecamatan pada Kota Jayapura telah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, maka dapat digunakan perhitungan daya dukung demografis. Hasil perhitungan daya dukung kemudian dibandingkan dengan standar konsumsi lahan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.29

Standar Kebutuhan Lahan Menurut Jumlah Penduduk (Yeates)

Penduduk (jiwa)	Nilai Daya Tampung (ha/jiwa)
10.000	0,1
25.000	0,091
50.000	0,086
100.000	0,076
250.000	0,07
500.000	0,066
1.000.000	0,061
2.000.000	0,057

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan perhitungan daya dukung daya tampung demografis, maka didapatkan daya dukung demografis di setiap kecamatan di Kota Jayapura sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 2.30

Daya Dukung Demografis/Lahan di Distrik Kota Jayapura

No	Distrik	Luas Wilayah (km2)	Luas wilayah (ha) 1Km2=100ha	Jumlah Penduduk	Daya Dukung Lahan (Ha/Jiwa)
1	Abepura	156	15,600.00	123,392	0.126426
2	Heram	63	6,300.00	66,221	0.095136
3	Jayapura Selatan	43	4,300.00	101,726	0.04227
4	Jayapura Utara	51	5,100.00	93,996	0.054258
5	Muara Tami	627	62,700.00	18,960	3.306962

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel di atas bahwa daya dukung demografis (lahan) yang memiliki nilai tertinggi pada Distrik Muara Tami dengan nilai sebesar 3,307 ha/jiwa dan untuk nilai terendah terdapat pada distrik Jayapura Selatan sebesar 0,0422 ha/jiwa. Hal tersebut terlihat bahwa daya dukung demografis berbanding lurus dengan luas lahan yang ada dan berbading terbalik dengan jumlah penduduk. Artinya jika semakin banyak jumlah penduduk pada luas lahan yang sama maka daya dukung demografis akan kecil dan berlaku sebaliknya sehingga pada suatu wilayah dengan jumlah penduduk besar maka luas lahanya juga harus lebih besar.

Berdasarkan data, secara keseluruhan dari hasil analisis di atas untuk daya dukung dan daya tamping demografis tiap distrik di Kota jayapura terdapat beberapa daerah yang sudah melampaui batas daya tamping yaitu Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan. Daya Tampung Distrik Jayapura Utara dan Jayapura Selatan masing-masing sebesar 66 234 jiwa dan 61429 jiwa. Defisit daya tamping demografis distrik Jayapura Utara dan distrik Jayapura Selatan masing–masing sebesar -27762 jiwa dan – 40297 jiwa. Sebaliknya Distrik yang yang masih memenuhi daya tamping yaitu Distrik Abe, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami. Tabel di bawah ini adalah hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung demografis tiap distrik di Kota Jayapura.

Tabel 2.31

Daya Dukung Lahan Tiap Distrik

No	Distrik	Luas Wilayah (km2)	Luas wilayah (ha) 1Km2=100 ha	Jumlah Penduduk	Daya Dukung Lahan (Ha/Jiwa)	Standar Kebutuhan Lahan per jiwa (Ha/Jiwa)	Daya Tampung (Jiwa)	Defisit/ Surplus (Jiwa)	Keterangan Daya Tampung
1	Abepura	156	15,600.00	123,392	0.126426	0.075	208,000.00	84,608.00	Surplus (Memenuhi)
2	Heram	63	6,300.00	66,221	0.095136	0.083	75,903.61	9,682.61	Surplus (Memenuhi)
3	Jayapura Selatan	43	4,300.00	101,726	0.04227	0.070	61,428.57	(- 40,297.43)	Defisit (Tidak Memenuhi)
4	Jayapura Utara	51	5,100.00	93,996	0.054258	0.077	66,233.77	(- 27,762.23)	Defisit (Tidak Memenuhi)
5	Muara Tami	627	62,700.00	18,960	3.306962	0.095	660,000.00	641,040.00	Surplus (Memenuhi)

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

F. Daya Dukung Pemukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman dapat diartikan sebagai kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu bertempat tinggal secara layak (Muta'ali, 2015). Dalam menentukan luas layak permukiman, erat hubunganya dengan kebijakan penyediaan perumahan. Terdapat beberapa lokasi yang tidak dapat dibangun, terdiri dari kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan rawan bencana longsor. Kawasan lindung yaitu berupa daerah perlindungan setempat, cagar budaya, sempadan sungai dan lain-lain. Kemudian untuk kawasan rawan bencana alam meliputi rawan bencana banjir. Pada tabel di bawah disajikan luas layak permukiman yang terdapat pada tiap kecamatan di Kota Jayapura.

Tabel 2.32

Luas Layak Pemukiman dan Daya Dukung Pemukiman Tiap Distrik di Kota Jayapura

No	Distrik	Luas Wilayah (km2)	Luas Wilayah (m2) (1ha = 10000 m2)	Luas Layak Pemukiman (ha)	Luas Layak Pemukiman (M2)	Koef/Luas Kebutuhan (M2/Kapita)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kapita Yang Layak (Kapit	Daya Dukung Pemukiman (Kapita/Jiwa)	Keterangan
1	Abepura	156	156.000.000,00	145,26	1.452.631,12	26	123.392	55,870	0,45	Tidak Memenuhi
2	Heram	63	63.000.000,00	705,09	7.050.895,80	26	66.221	271.188	4,10	Memenuhi
3	Jayapura Selatan	43	43.000.000,00	297,94	2.979.441,10	26	101.726	114.594	1,13	Memenuhi
4	Jayapura Utara	51	51.000.000,00	365,62	3.656.163,18	26	93.996	140.622	1,50	Memenuhi
5	Muara Tami	627	627.000.000,00	793,34	7.933.404,48	26	18.960	305.131	16,09	Memenuhi

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Dari hasil GIS di atas didapatkan hasil untuk luas layak permukiman tertingi pada Distrik Muara Tami dengan nilai sebesar 793,34 hektar. Sedangkan distrik yang memiliki luas layak permukiman terendah terdapat pada distrik Abepura dengan nilai sebesar 145,26 hektar.

Dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kota Jayapura harus memiliki strategi pengembangan kawasan perumahan baru pada areal tanah yang masih kosong baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun lahan miliki masyarakat. Kebijakan konsep pengembangan rumah baru yaitu alokasi ruang untuk perumahan swadaya, perumahan formal, dan perumahan vertikal.

Setelah luas layak permukiman tiap distrik yang ada di Kota Jayapura diketahui, maka dapat dihitung daya dukung permukiman pada tiap distrik. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung permukiman yang disajikan dalam Tabel di atas bahwa hampir seluruh distrik yang terdapat pada Kota Jayapura mampu mendukung penduduk untuk bermukim kecuali untuk Distrik Abepura tidak mendukung untuk penduduk bermukim. Artinya dalam hal ini nilai daya dukung permukiman yang didapatkan lebih dari 1.

Nilai daya dukung permukiman tertinggi terdapat pada distrik Muara Tami sebesar 16,09 kapita/jiwa, sedangkan nilai daya dukung permukiman terendah terdapat pada Distrik Abepura sebesar 0,45 kapita/jiwa.

G. Daya Dukung Karbon

Menurunnya Jasa pengatur Iklim di Kota Jayapura dipengaruhi oleh menurunnya kandungan karbon pada vegetasi. Berikut adalah kondisi kandungan Karbon di lima distrik di Kota Jayapura.

Tabel 2.33

Cadangan Karbon Per Hektar Untuk 22 Tipe Penutupan Lahan Skala Nasional

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kandungan Karbon (C ton/Ha)	Sumber Data
1	Hutan Lahan Kering Primer	HP	132,99	NFI (1996-2013),2014
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hs	98,84	NFI (1996-2013),2014
3	Hutan Mangrove Primer	Hmp	188,3	Litbanghut,2014
4	Hutan Rawa Primer	Hrp	96,35	NFI (1996-2013),2014

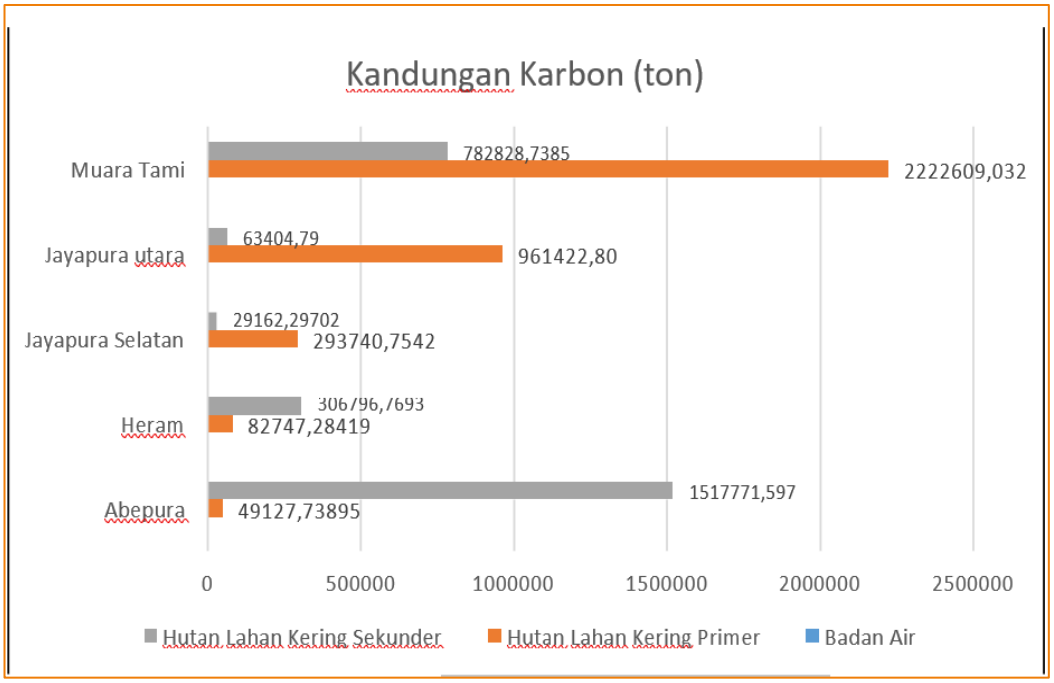
No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kandungan Karbon (C ton/Ha)	Sumber Data
5	Hutan Tanaman	Ht	98,38	Litbanghut,2014
6	Semak/Belukar	B	30	Juknis PEP RAD GRK,2013
7	Perkebunan	Pk	63	Juknis PEP RAD GRK,2013
8	Permukiman	Pm	4	Juknis PEP RAD GRK,2013
9	Lahan Terbuka	T	2,5	Juknis PEP RAD GRK,2013
10	Savanna	S	4	Juknis PEP RAD GRK,2013
11	Tubuh Air	A	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
12	Hutan Mangrove Sekunder	Hms	94,07	Litbanghut,2014
13	Hutan Rawa Sekunder	Hrs	79,67	Juknis PEP RAD GRK,2013
14	Belukar Rawa	Br	30	Juknis PEP RAD GRK,2013
15	Pertanian Lahan Kering	Pt	10	Juknis PEP RAD GRK,2013
16	Pertanian Lahan Kering Campur	Pc	30	Juknis PEP RAD GRK,2013
17	Sawah	Sw	2	Juknis PEP RAD GRK,2013
18	Tambak	Tm	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
19	Bandara/Pelabuhan	Bdr	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
20	Transmigrasi	Tr	10	Juknis PEP RAD GRK,2013
21	Pertambangan	Tb	0	Juknis PEP RAD GRK,2013
22	Rawa	Rw	0	Juknis PEP RAD GRK,2013

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kandungan karbon pada hutan lahan kering sekunder tertinggi di distrik Abepura sebesar 1.517.771,597 ton dan terendah di distrik Jayapura Selatan. Kandungan Karbon pada hutan lahan kering primer tertinggi di distrik Muara Tami sebesar 2.222.609,032 ton.

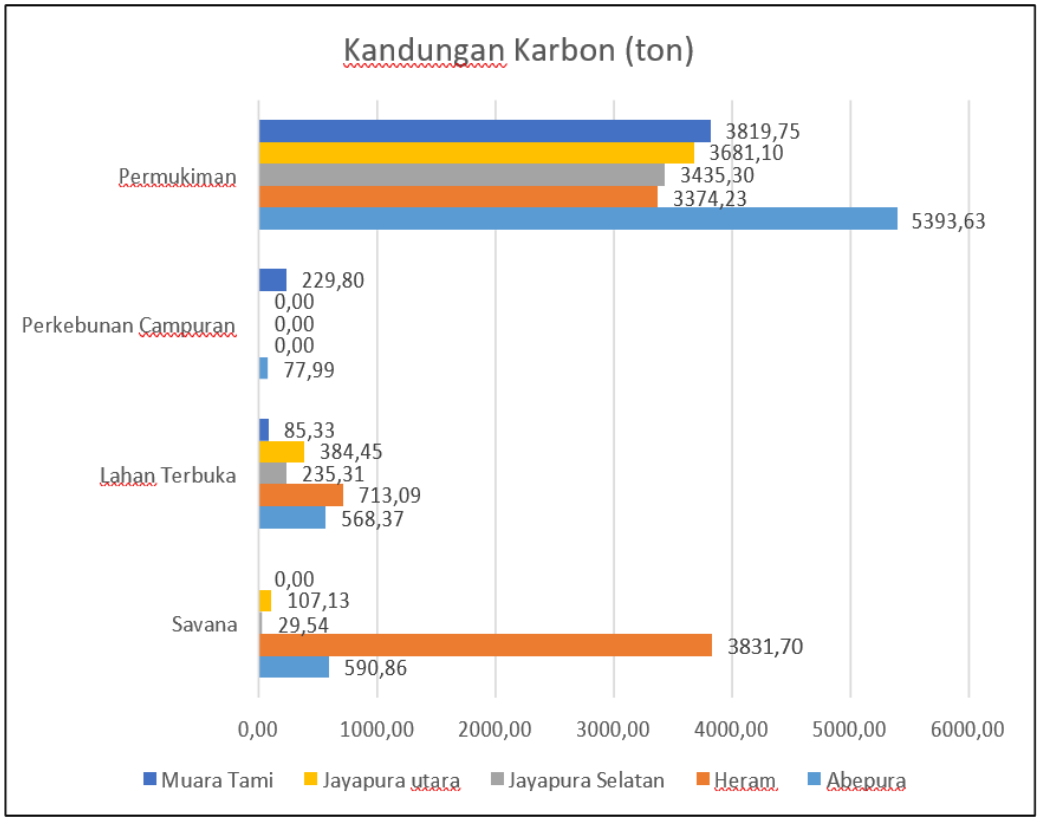
Gambar 2.5.

Kandungan karbon Tiap Distrik



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Lanjutan Kandungan Karbon Tiap Distrik



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kandungan karbon di kawasan pemukiman tertinggi di distrik Abepura sebesar 5393,63 ton. Kandungan karwon di perkebunan campuran tertinggi di distrik Muara Tami sebesar 229,80 ton. Kandungan karbon pada lahan terbuka tertinggi di distrik Heram sebesar 713,09 ton. Kandungan karbon pada Savana tertinggi di distrik Heram sebesar 3831,70 ton.

Lanjutan Kandungan Karbon Tiap Distrik



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Kandungan karbon di hutan mangrove sekunder tertinggi di distrik Abepura sebesar 2803,81 ha. Kandungan karbon di hutan mangrove primer tertinggi di distrik Abepura. Kandngan karbon di hutan rawa primer tertinggi di distrik Muara Tami. Kandungan Karbon di semak belukar tertinggi di distrik Muara Tami sebesar 47232,64 ton. Kandungan karbon di sawah irigasi tertinggi di distrik Muarat Tami sebesar 7131,26 ton. Kandungan karbon di kawasan pertanian lahan kering campur semak/kebun campur tertinggi di distrik Abepura sebesar 168501,98 ton.

H. Daya Dukung dan Daya Tampung Pencemaran Lingkungan Hidup

Tabel 2.34

Beban Pencemaran Di Hilir Sungai Anafre (Ton/Bulan)

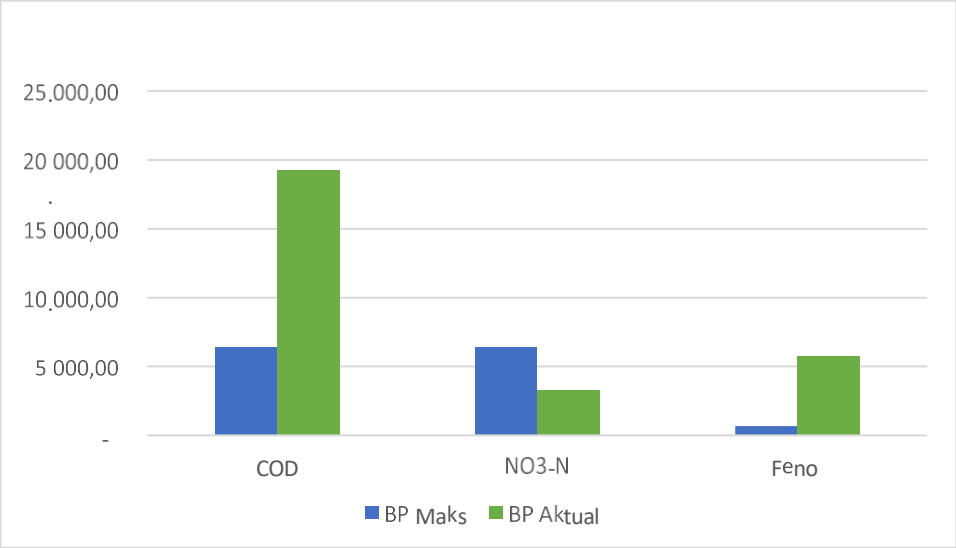
No	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	642,971.52	167,172.60
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	32,148.58	88,087.10
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	1,285.94	2,443.29
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	6,429.72	19,289.15
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	321.49	295.77
8	Chlorida (Cl) mg/L	385,782.91	16,074.29
9	Flourida (F) mg/L	321.49	257.19
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	6,429.72	3,279.15
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	128.59	771.57
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	1.29	4.50
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	192.89	23.79
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	32.15	31.51
15	Zinc (Zn) mg/L	32.15	53.37
	C. Pemeriksaan Kimia Organik		
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	128,594.30	41,150.18
17	Minyak/lemak (µg/L)	642,971.52	176,817.17
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	642.97	5,786.74

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

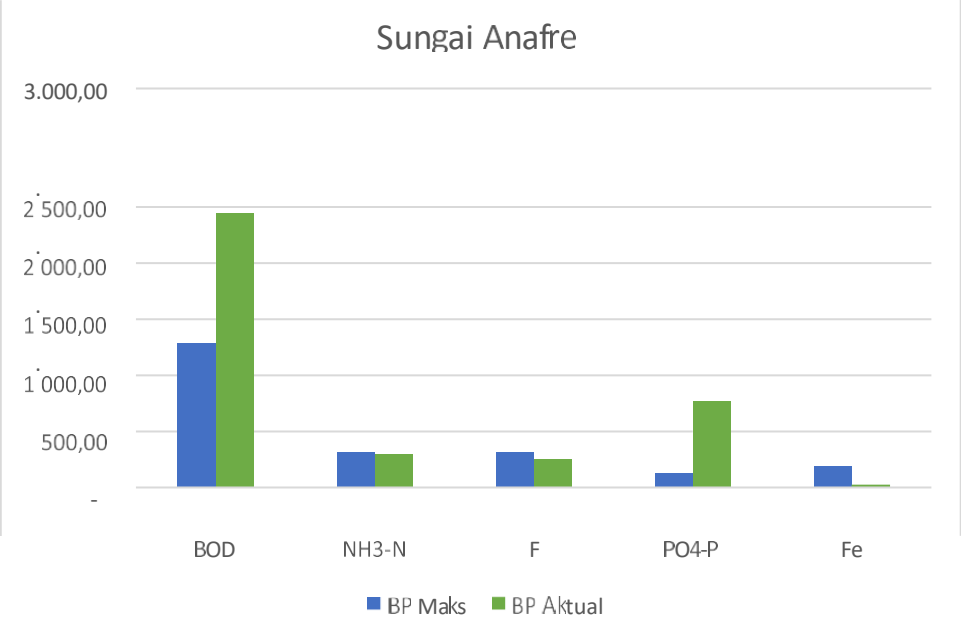
Hasil analisis beban pencemaran pada Sungai Anafre menunjukkan bahwa beban pencemaran actual lebih besar dari beban pencemaran actual untuk parameter COD dan Fenol. Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Anafre telah tercemar oleh para meter COD dan Fenol. Gambar di atas menunjukkan baahwa Sungai Anafre belum tercemar oleh parameter NO3-N.

Gambar 2.6.

Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



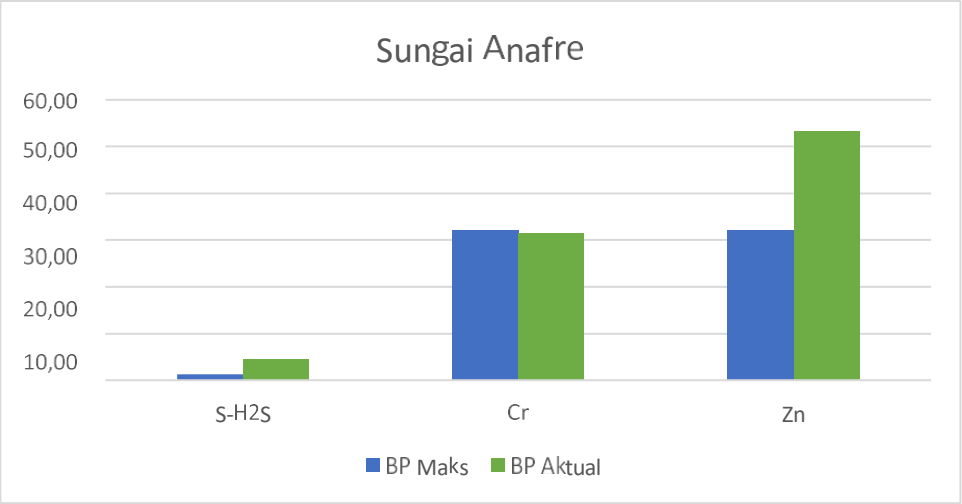
Lanjutan Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar di atas menunjukkan bahwa sungai Anafre telah tercemar oleh parameter BOD, PO4-P oleh karena beban pencemaran actual lebih besar ari beban pencemaran maksimum.

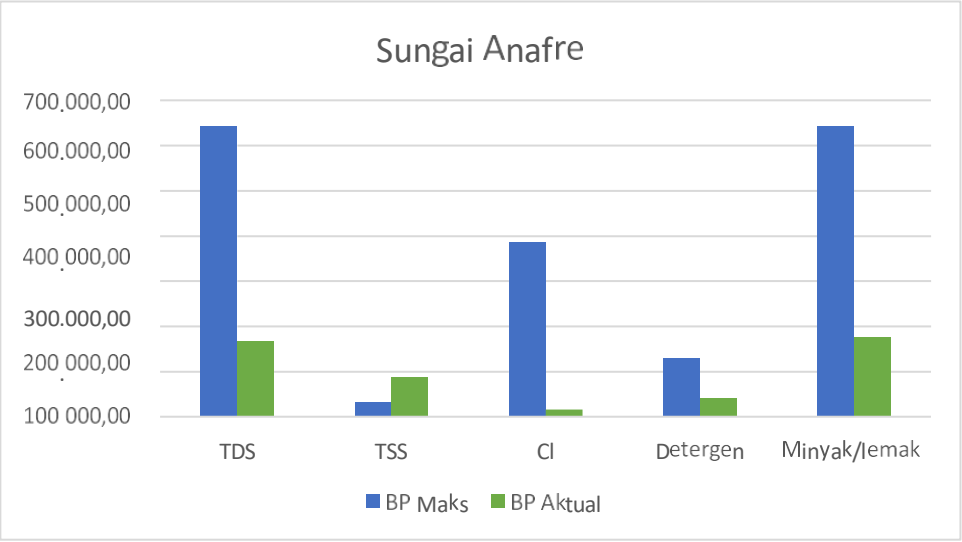
Lanjutan Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Gambar di atas menunjukkan bahwa Sungai Anafre telah tercemar parameter S-H2S dan Zn.

Lanjutan Beban Pencemaran Maksimum dan Beban Pecemaran Aktual Sungai Anafre



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan table dan gambar di atas parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah COD, Fenol, BOD, PO4- P, S-H2S, Zn, dan TSS. Artinya bahwa sungai Anafre telah tercemar oleh parameter COD, Fenol, BOD, PO4-P, S- H2S, Zn, dan TSS.

Tabel 2.35

Beban Pencemaran di Hilir Hanyaan (Ton/Bulan)

No	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	190,434.24	115,022.28
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	9,521.71	18,091.25
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		-
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	380.87	685.56
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	1,904.34	6,665.20
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	95.22	704.61
8	Chlorida (Cl) mg/L	114,260.54	44,561.61
9	Flourida (F) mg/L	95.22	194.24
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	1,904.34	399.91
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	38.09	209.48
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	0.38	1.14
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	57.13	8.76
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	9.52	8.38
15	Zinc (Zn) mg/L	9.52	11.43
	C. Pemeriksaan Kimia Organik	-	-
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	38,086.85	17,139.08
17	Minyak/lemak (µg/L)	190,434.24	80,934.55
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	190.43	1,333.04

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Parameter – parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah TSS, BOD, COD, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol. Artinya bahwa sungai Hanyaan telah tercemar oleh parameter TSS, BOD, COD, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol.

Tabel 2.36

Beban Pencemaran di Hilir Kali Acai (Ton/Bulan)

NO	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	268,323.84	162,067.60
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	13,416.19	25,490.76
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		-
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	536.65	965.97
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	2,683.24	9,391.33
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	134.16	992.80
8	Chlorida (Cl) mg/L	160,994.30	62,787.78
9	Flourida (F) mg/L	134.16	273.69
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	2,683.24	563.48
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	53.66	295.16
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	0.54	1.61
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	80.50	12.34
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	13.42	11.81
15	Zinc (Zn) mg/L	13.42	16.10
	C. Pemeriksaan Kimia Organik	-	-
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	53,664.77	24,149.15
17	Minyak/lemak (µg/L)	268,323.84	114,037.63
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	268.32	1,878.27

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Parameter–parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol. Artinya bahwa sungai Kali Acai telah tercemar oleh parameter TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol.

Tabel 2.37

Beban Pencemaran di Hilir Siborgonyi (Ton/Bulan)

No	Parameter	BP Maks	BP Aktual
	A.Pemerikaan Fisika/ Lapangan		
1	Zat Padat Terlarut (TDS) mg/L	128,589.12	77,667.83
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS) mg/L	6,429.46	12,215.97
	B. a.pemeriksaan kimia Anorganik bukan logam	-	-
3	pH		-
4	Bichemical Oxygen Demand (BOD) mg/L	257.18	462.92
5	Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L	1,285.89	4,500.62
6	Dissolved Oxygen (DO) mg/L		-
7	Ammonia sebagai (NH3-N) mg/L	64.29	475.78
8	Chlorida (Cl) mg/L	77,153.47	30,089.85
9	Flourida (F) mg/L	64.29	131.16
10	Nitrat sebagai (NO3-N) mg/L	1,285.89	270.04
11	Phosphat sebagai (PO4-P) mg/L	25.72	141.45
12	Sulfida (S-H2S) mg/L	0.26	0.77
	B.b.Pemeriksaan kimia Anorganik Logam Terlarut	-	-
13	Besi (Fe) mg/L	38.58	5.92
14	Chromium (Cr valensi 6) mg/L	6.43	5.66
15	Zinc (Zn) mg/L	6.43	7.72
	C. Pemeriksaan Kimia Organik	-	-
16	Detergen sebagai MBAS (µg/L)	25,717.82	11,573.02
17	Minyak/lemak (µg/L)	128,589.12	54,650.38
18	Senyawa Fenol sebagai Fenol (µg/L)	128.59	900.12

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Parameter–parameter yang telah melebihi beban pencemaran maksimum adalah TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol. Artinya bahwa sungai Siborgonyi telah tercemar oleh parameter TSS, BOD, COD, NH3, F, PO4-P, S-H2S, Zn dan Fenol.

Tabel 2.38

Konstanta Perhitungan Potensi Beban Pencemaran

Faktor Emisi	
BOD (gr/org/hari)	40
COD (gr/org/hari)	55
TSS (gr/org/hari)	38
Nilai (Alfa)	
0-100 meter	1
100-500 meter	0.85
Lebih dari 500 meter	0.3
Sangat jauh (tidak dekat dengan segmen)	0.1
Rasio Ekivalen Kota	
Kota	1
Pinggiran kota	0.8125
Pedalaman	0.625
Pengolahan	
Ada	0,5
Tidak	1

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel 2.39

Potensi Beban Pencemaran Tiga Parameter (kg/hari)

Tahun	Potensi BP BOD Kg	Potensi BP COD Kg	Potensi BT TSS Kg
2025	5,224.74	7,184.02	4,963.50
2027	5,421.97	7,455.21	5,150.88
2029	5,626.65	7,736.65	5,345.32
2031	5,839.06	8,028.70	5,547.10
2033	6,059.48	8,331.78	5,756.51
2035	6,288.22	8,646.31	5,973.81
2037	6,525.60	8,972.70	6,199.32
2039	6,771.94	9,311.42	6,433.34
2041	7,027.58	9,662.92	6,676.20
2043	7,292.87	10,027.69	6,928.22
2045	7,568.17	10,406.24	7,189.76
2047	7,853.87	10,799.07	7,461.17
2049	8,150.35	11,206.73	7,742.83
2051	8,458.02	11,629.78	8,035.12
2053	8,777.31	12,068.80	8,338.44

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi beban pencemaran BOD, COD, dan TSS terus meningkat dari tahun 2021-2053. Hal ini akan mengancam kelestarian kualitas air Sungai dan Kualitas air teluk

Youtefa serta Teluk Yos Sudarso. Kualitas air yang tercemar akan mengakibatkan tercemarnya populasi ikan, kerang dan mahluk lain di teluk tersebut dan akan mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia yang mengkonsumsi ikan dan mahluk lain. Potensi beban pencemaran yang berasal dari domestik teringgi adalah parameter COD, diikuti oleh BOD dan terendah TSS.

- -Beban Air limbah (ltr/hari)

Tabel 2.40

Beban Air Limbah (Ltr/Hari)

Tahun	Air Limbah Grey Water Kota Jayapura	Air Limbah Black Water Kota Jayapura	Jumlah IPAL Komunal
2019	28,818,432.00	7,204,608.00	300.19
2022	29,524,407.54	7,381,101.89	307.55
2025	30,247,677.63	7,561,919.41	315.08
2028	30,988,665.92	7,747,166.48	322.80
2031	31,747,806.47	7,936,951.62	330.71
2034	32,525,543.96	8,131,385.99	338.81
2037	33,322,333.97	8,330,583.49	347.11
2040	34,138,643.22	8,534,660.81	355.61
2043	34,974,949.91	8,743,737.48	364.32
2046	35,831,743.90	8,957,935.97	373.25
2049	36,709,527.08	9,177,381.77	382.39
2052	37,608,813.63	9,402,203.41	391.76

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel di atas air limbah grey water dan black water terus meningkat maka di kota Jayapura membutuhkan IPAL Komunal sebanyak 307 – 391 unit pada tahun 2022- 2052.

- Beban Timbulan Sampah (Kg/hari)

Tabel 2.41

Timbulan Sampah (Kg/Hari)

Tahun	Timbulan Sampah
2022	92,905.06
2024	93,370.16
2026	93,837.60
2028	94,307.37
2030	94,779.50

2032	95,253.99
2034	95,730.85
2036	96,210.10

Tahun	Timbulan Sampah
2038	96,691.76
2040	97,175.82
2042	97,662.31
2044	98,151.23
2046	98,642.60
2048	99,136.43
2050	99,632.73
2052	100,131.52

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

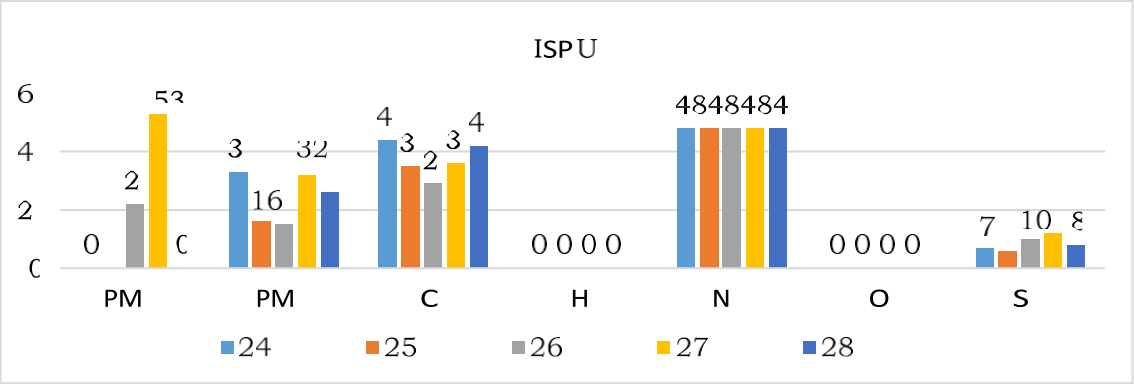
Laju pertumbuhan penduduk Kota Jayapura dalam lima tahun terakhir (2016-2020) sebesar 6,65% dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 398478 jiwa. Timbulan sampah Kota Jayapura terus meningkat dari Tahun 2022–2042 dimana pada tahun 2022 sebesar 92.905,06 ton/tahun menjadi 100.131,52 ton/tahun pada akhir perencanaan tahun 2052.

- **Daya Dukung Kualitas Udara /Indeks Standar Pencemaran Udara**

Indeks Standar Pencemaran Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Pemeliharaan kualitas udara antara lain: Kapasitas mengatur sistem kimia udara adalah Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara . sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor–faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umum lebih baik dibanding dengan daerah non-vegetasi. Pada gambar di bawah terlihat bahwa kondisi mutu udara di Kota Jayapura semuanya dalam kondisi sangat baik.

Gambar 2.7.

Indeks Pencemaran Udara



Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

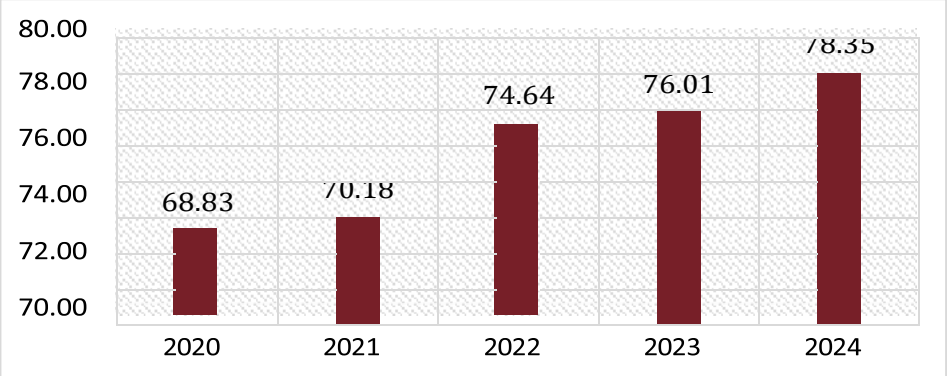
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang menunjukkan kondisi ketahann pangan di suatu wilayah. IKP merupakan alat untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan Kota Jayapura pada tahun 2020 sebesar 68,83 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 78,35. Ini berarti selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ketahanan pangan Kota Jayapura naik sebesar 9,52 poin.

Gambar 2.8.

Indeks Ketahanan Pangan Kota Jayapura Tahun 2020-2024



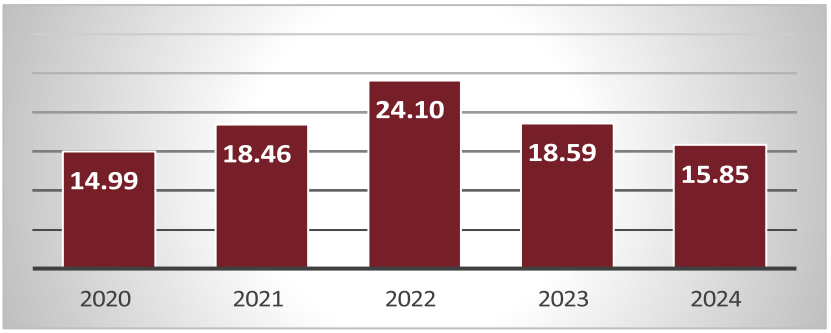
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah sampai level kabupaten/kota yang mengonsumsi kalori kurang dari yang dibutuhkan berdasarkan standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Gambar 2.9.

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Data BPS sebagaimana dimuat pada gambar di atas menunjukkan pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di Kota Jayapura menunjukkan fluktuasi. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 24,10. Namun mulai tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan penurunan, yang berarti ketidakcukupan pangan di Kota Jayapura semakin kecil.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan

hidup secara komprehensif.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Jayapura pada tahun 2021 yaitu sebesar 75,43 dan menurun di tahun 2022 menjadi 73,88, namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali meningkat menjadi 75,50. Peningkatan IKLH Kota Jayapura diikuti pula oleh IKA, IKU dan IKL. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Jayapura Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Jayapura Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A	N/A	49,00	50,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A	N/A	93,32	92,26
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	N/A	N/A	88,03	88,31
IKLH	75,43	73,88	75,50	75,50

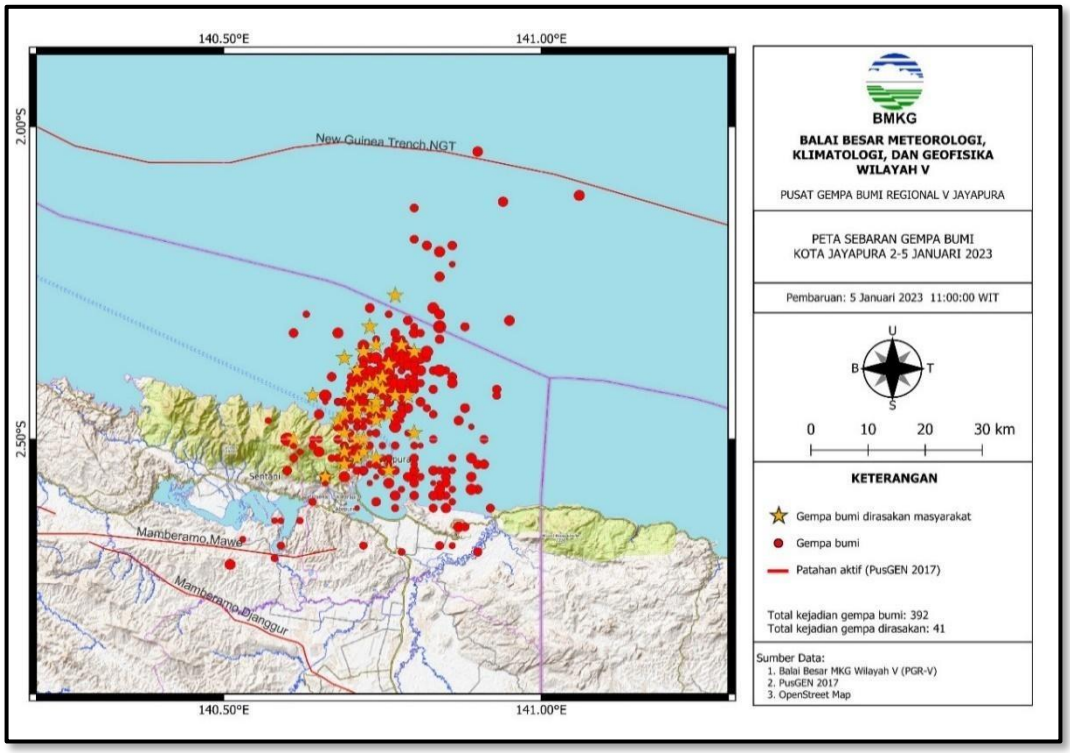
Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2023-2024

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Jayapura, yang terletak di pesisir utara dan memiliki wilayah kepulauan, diidentifikasi sebagai daerah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Hal ini diungkapkan dalam *Masterplan* Kawasan Rawan Bencana Kota Jayapura tahun 2018. Wilayah ini menghadapi ancaman beragam bencana, termasuk gempa bumi, bencana hidrometeorologi, dan tsunami. Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami, sebagaimana dikutip oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018, seluruh wilayah Kota Jayapura dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi. Klasifikasi ini berlaku baik untuk skenario gempa dengan periode ulang 500 tahun maupun 2500 tahun.

Gambar 2.10.

Titik Gempa Periode 02 Januari s/d 05 Januari 2023



Sumber: BMKG Wilayah V Kota Jayapura, 2023

Kerentanan Kota Jayapura terhadap gempa bumi tidak hanya berasal dari aktivitas seismik lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh zona- zona gempa di sekitarnya. Wilayah ini berpotensi terkena dampak getaran gempa yang berasal dari Lajur Ofiolit Papua dan Sesar Kepulauan Yapen. Selain itu, gempa-gempa dengan pusat gempa (episenter) yang berasal dari wilayah Papua New Guinea di sebelah timur juga dapat memberikan pengaruh terhadap Kota Jayapura. Kota Jayapura menghadapi berbagai ancaman bencana alam, dengan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi sebagai risiko utama. Berdasarkan data dari berbagai sumber, termasuk media elektronik dan BMKG, dapat diuraikan beberapa poin penting mengenai kerawanan bencana di wilayah ini:

1. Gempa Bumi:

Kota Jayapura memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi, mencakup area seluas 59.148,48 hektar atau 1,77% dari total

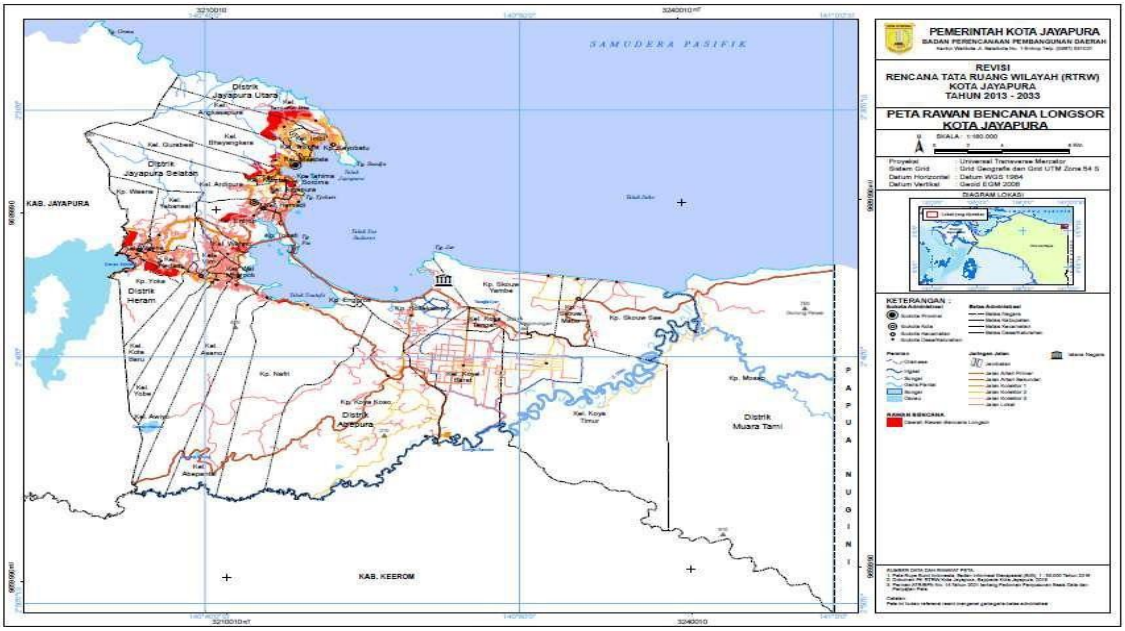
wilayahnya. Aktivitas seismik di sekitar kota ini cukup intens, dengan catatan 1.072 gempa terjadi antara 2 Januari hingga 9 Februari 2023, di mana 128 di antaranya terasa. Gempa-gempa ini umumnya bermagnitudo di bawah 5,0, namun beberapa mencapai magnitudo 5,4. Karakteristik gempa di wilayah ini cenderung dangkal, sering disebabkan oleh aktivitas sesar lokal, dan umumnya tidak berpotensi tsunami. Meskipun demikian, dampaknya cukup signifikan, termasuk kerusakan bangunan dan infrastruktur.

2. Longsor:

Area dengan risiko longsor tinggi di Kota Jayapura mencakup 2.314,49 hektar. Longsor sering terjadi akibat curah hujan tinggi atau sebagai dampak sekunder dari gempa bumi. Contoh terbaru adalah longsor pada 9 Februari 2023 di Bucend Menara Jaya, yang dipicu oleh gempa berkekuatan 5,4. Bencana longsor dan banjir pada Januari 2022 di Distrik Jayapura Selatan menyebabkan kerugian material yang signifikan. Upaya mitigasi termasuk pemasangan sistem peringatan dini di beberapa lokasi, namun masih perlu diperluas ke area-area rawan lainnya.

Gambar 2.11.

Peta Rawan Bencana Longsor



Sumber: Revisi RTRW Kota Jayapura, 2023

3. Banjir:

Wilayah dengan risiko banjir tinggi di Kota Jayapura mencakup area seluas 3.939,93 hektar. Seluruh distrik di kota ini rentan terhadap banjir genangan saat curah hujan tinggi. Faktor alam dan aktivitas manusia berkontribusi pada variasi dampak banjir di berbagai wilayah.

4. Upaya Mitigasi:

Pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan beberapa upaya mitigasi, termasuk pemasangan sistem peringatan dini untuk longsor dan prakiraan cuaca oleh BMKG. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal cakupan sistem peringatan dini dan koordinasi antar lembaga untuk manajemen bencana yang lebih efektif.

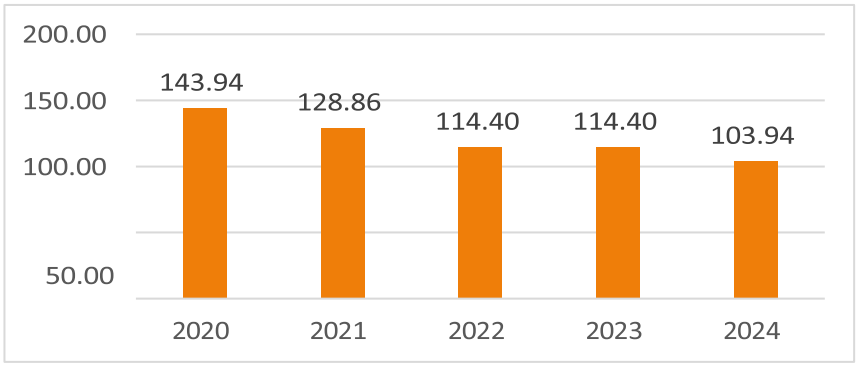
Kesimpulannya, Kota Jayapura menghadapi berbagai ancaman bencana alam yang signifikan, terutama gempa bumi, longsor, dan banjir. Kerentanan terhadap gempa bumi tidak hanya berasal dari aktivitas seismik lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh zona-zona gempa di sekitarnya, termasuk Lajur Ofiolit Papua, Sesar Kepulauan Yapen, dan wilayah Papua New Guinea. Wilayah ini memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi, dengan aktivitas seismik yang intens dan berpotensi menyebabkan kerusakan bangunan serta memicu bencana sekunder seperti longsor. Upaya mitigasi telah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan.

Salah satu alat ukur terkait risiko bencana yang digunakan di Indonesia adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko setiap kabupaten/kota dilakukan dengan mepmerhatikan faktor *hazard, vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada.

Berdasarkan data dari BNPB, Kota Jayapura memiliki IRB yang cenderung menurun dari tahun ke tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IRB adalah 143,94 lalu turun hingga berada pada angka 103,94 dengan kategori Sedang. Perkembangan indeks risiko bencana Kota Jayapura selama tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.12.

Indeks Risiko Bencana Kota Jayapura Tahun 2020-2024



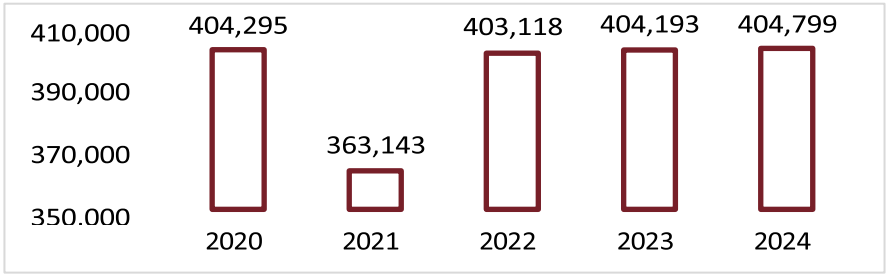
Sumber: BNPB, 2025

2.1.1.7. Demografi

Data jumlah penduduk Kota Jayapura pada tahun 2020 yaitu berjumlah 404.295 jiwa dan menurun di tahun 2021 menjadi 363.143, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga menjadi 404.799 jiwa di tahun 2024.

Gambar 2.13.

Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sejak tahun 2020 sampai 2024, diketahui bahwa untuk jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi di Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	215.114	189.181	404.295
2021	191.165	171.978	363.143
2022	213.712	189.406	403.118
2023	214.055	190.138	404.193
2024	214.026	190.773	404.799

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2024 berada pada kecamatan Abepura dengan jumlah 120.946 jiwa yang terdiri dari 63.986 jiwa penduduk laki-laki dan 56.960 jiwa penduduk perempuan, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu kecamatan Muara Tami dengan jumlah 26.243 jiwa yang terdiri dari 13.676 jiwa penduduk laki-laki dan 12.567 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.44

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Jayapura Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Muara Tami	13.676	12.567	26.243
Abepura	63.986	56.960	120.946
Heram	33.818	29.226	63.044
Jayapura Selatan	52.812	47.760	100.572
Jayapura Utara	49.734	44.260	93.994
Kota Jayapura	**214.026**	**190.773**	**404.799**

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Trend Pertumbuhan Penduduk Kota Jayapura yang terus mengalami Peningkatan yang Signifikan dan Heterogen, terdiri dari semua Suku Bangsa yang ada di Indonesia berdomisili di Wilayah Kota Jayapura dengan Jumlah Penduduk sesuai data Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebanyak 404.779 Jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki-laki sebanyak 214.026 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan sebanyak 190.773 Jiwa.

Adapun Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kota Jayapura Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45

Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kota Jayapura Tahun 2024

Struktur Usia	2024
0 – 4	20.510
5 – 9	30.091
10 – 14	33.688
15 – 19	34.836
20 – 24	38.025
25 – 29	38.010
30 – 34	41.311
35 – 39	40.777
40 – 44	34.185
45 – 49	27.384
50 – 54	20.799
55 – 59	17.138
60 – 64	11.534
65 – 69	7.565
70 – 74	4.366
> 75	4.580
Total	**404.779**

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2024

Proyeksi penduduk Kota Jayapura untuk periode 2025-2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan signifikan. Diperkirakan populasi Kota Jayapura akan meningkat dari 430.984 jiwa pada tahun 2025 menjadi 466.445 jiwa pada tahun 2030, menandakan pertambahan sekitar 35.461 jiwa atau 8,2% selama lima tahun. Dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 1,59%, proyeksi ini mencerminkan perkembangan Kota Jayapura yang konsisten dan dinamis.

Tabel 2.46

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Jayapura Tahun 2025-2030

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk
2025	430.984
2026	437.831
2027	444.798
2028	451.888
2029	459.103
2030	466.445

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2025

Proyeksi ini memiliki nilai strategis yang tinggi bagi berbagai aspek perencanaan dan pembangunan Kota Jayapura. Bagi pemerintah, data ini menjadi landasan penting dalam merencanakan infrastruktur, mengalokasikan sumber daya, dan merancang kebijakan sosial yang tepat sasaran. Dalam konteks ekonomi, proyeksi ini memberikan gambaran tentang potensi pasar dan tenaga kerja masa depan, yang sangat berharga bagi perencanaan investasi dan pengembangan bisnis. Selain itu, informasi ini juga krusial untuk manajemen lingkungan, perencanaan energi, dan mitigasi risiko bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi Kota Jayapura merupakan aspek krusial dalam perkembangan ibu kota Provinsi Papua ini. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah timur Indonesia, Kota Jayapura memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di kawasan Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Jayapura telah menunjukkan dinamika ekonomi yang menarik. Kota ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi. Namun, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Jayapura juga menghadapi tantangan unik dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jayapura merupakan indikator ekonomi yang sangat penting dalam mengukur kinerja perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura. PDRB mencerminkan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di wilayah Kota Jayapura dalam periode waktu satu tahun. PDRB Kota Jayapura dihitung dengan dua pendekatan, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sementara PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. Perbandingan kedua nilai ini dapat memberikan informasi tentang perkembangan ekonomi riil Kota Jayapura tanpa pengaruh inflasi.

Nilai PDRB Kota Jayapura atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 39,81 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 5,13 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang nilainya sebesar 37,87 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha serta adanya inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dan beberapa harga pangan pokok.

Tabel 2.47

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.889,22	1.926,23	2.058,00	2.007,56	2.026,58
Pertambangan dan Penggalian	163,28	173,89	176,87	185,78	191,56
Industri Pengolahan	803,93	818,08	858,42	913,03	954,01
Pengadaan Listrik dan Gas	17,60	18,27	19,67	20,80	22,43

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37,03	37,75	39,35	41,49	45,49
Konstruksi	8.058,68	8.520,39	8.861,72	9.220,01	9.435,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.283,79	5.524,43	6.185,89	6.792,06	7.482,98
Transportasi dan Pergudangan	1.273,66	1.483,13	1.807,02	2.178,68	2.377,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	526,20	566,10	607,50	647,76	711,68
Informasi dan Komunikasi	2.650,53	2.716,11	2.825,58	2.912,37	3.009,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.452,21	1.534,58	1.743,65	2.081,93	2.100,71
Real Estate	1.576,80	1.625,49	1.729,37	1.858,59	1.936,82
Jasa Perusahaan	1.064,85	1.096,25	1.205,88	1.382,34	1.435,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.192,96	4.066,66	4.056,57	4.107,93	4.433,46
Jasa Pendidikan	1.098,22	996,70	1.035,53	1.160,70	1.262,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.260,16	1.348,15	1.427,25	1.519,77	1.579,92
Jasa lainnya	669,99	685,68	726,62	766,24	810,42
PDRB	**32.019,13**	**33.137,90**	**35.364,89**	**37.797,07**	**39.814,97**

Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami pertumbuhan, yaitu dari 24,78 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 25,66 triliun rupiah pada tahun 2024. Keadaan ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Kota Jayapura mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56 persen. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, disebabkan oleh pertumbuhan produksi pada sebagian besar lapangan usaha, sebagai dampak positif dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat.

Perkembangan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kota Jayapura tahun 2020-2024 dirinci pada tabel di bawah.

Tabel 2.48

PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Jayapura Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan (Juta Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.251,53	1.298,36	1.351,73	1.388,61	1.396,79
Pertambangan dan Penggalian	90,42	91,48	91,92	96,33	101,26
Industri Pengolahan	544,53	549,73	565,71	574,82	589,19
Pengadaan Listrik dan Gas	12,27	12,83	13,67	14,42	15,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,73	30,71	31,93	33,28	34,88
Konstruksi	4.520,30	4.730,30	4.842,44	4.979,92	5.049,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.596,69	3.762,26	4.014,73	4.260,26	4.495,35
Transportasi dan Pergudangan	876,24	1.002,77	1.094,62	1.213,16	1.298,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	349,02	369,36	385,05	393,95	413,88
Informasi dan Komunikasi	2.346,38	2.395,22	2.477,06	2.564,76	2.653,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	960,35	984,39	1.031,99	1.158,53	1.172,45
Real Estate	1.171,06	1.200,57	1.265,39	1.359,65	1.424,97
Jasa Perusahaan	747,20	786,79	828,05	893,50	908,62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.133,28	3.125,12	3.178,32	3.212,68	3.432,24
Jasa Pendidikan	979,73	938,59	963,41	997,91	1.029,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	953,97	978,77	979,33	1.024,20	1.025,09
Jasa lainnya	554,06	561,32	586,85	609,41	616,08
PDRB	**22.117,78**	**22.818,57**	**23.702,20**	**24.775,40**	**25.656,87**

Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

Analisis PDRB menurut lapangan usaha Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika ekonomi yang beragam dan menarik. Sektor konstruksi konsisten menjadi penyumbang terbesar, namun persentasenya menurun dari yang semula 25,17 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 23,7 persen di tahun 2024. Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dengan persentase pada tahun 2024 yaitu sebesar 18,79 persen atau meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya 17,97 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Kota Jayapura memiliki basis yang beragam dengan beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan yang kuat, sementara yang lain memerlukan perhatian lebih. Pemerintah Kota Jayapura perlu memfokuskan strategi pada penguatan sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi seperti jasa keuangan dan transportasi, sambil mendorong pemulihan dan pengembangan sektor-sektor yang tertinggal. Perhatian khusus juga perlu diberikan pada sektor-sektor dengan kontribusi relatif kecil namun potensial seperti industri pengolahan untuk diversifikasi ekonomi yang lebih lanjut. Strategi yang seimbang antara mendukung sektor-sektor unggulan dan mengembangkan sektor-sektor potensial akan krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Jayapura.

Tabel 2.49

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Jayapura

Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,90	5,81	5,82	5,31	5,09
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,52	0,50	0,49	0.48
Industri Pengolahan	2,51	2,47	2,43	2,42	2,4
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	25,17	25,71	25,06	24,39	23,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,50	16,67	17,49	17,97	18,79
Transportasi dan Pergudangan	3,98	4,48	5,11	5,76	5,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,72	1,71	1,79
Informasi dan Komunikasi	8,28	8,20	7,99	7,71	7,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,54	4,63	4,93	5,51	5,28
Real Estate	4,92	4,91	4,89	4,92	4,86
Jasa Perusahaan	3,33	3,31	3,41	3,66	3,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,10	12,27	11,47	10,87	11,14
Jasa Pendidikan	3,43	3,01	2,93	3,07	3,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,94	4,07	4,04	4,02	3,97

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa lainnya	2,09	2,07	2,05	2,03	2,04
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

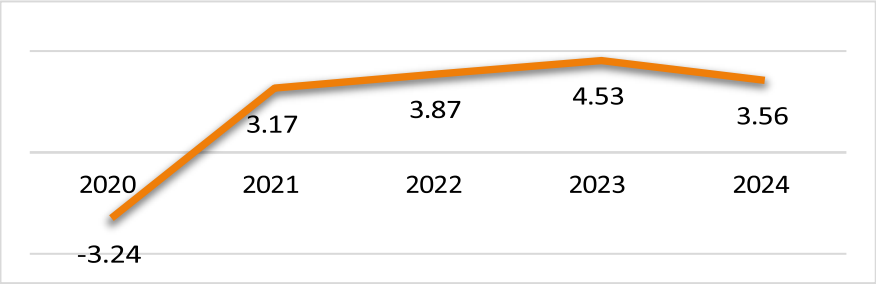
Sumber BPS Kota Jayapura, 2025

Data pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang menarik dan mencerminkan berbagai tantangan serta upaya pemulihan ekonomi kota ini. Pada tahun 2020 menjadi titik balik yang drastis dengan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -3,24%. Penurunan tajam ini jelas merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi. Pembatasan sosial, penutupan berbagai usaha, dan gangguan pada rantai pasokan menjadi faktor utama penyebab kontraksi ekonomi ini.

Memasuki tahun 2021, terlihat tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan ekonomi kembali positif sebesar 3,17%. Meskipun belum kembali ke level pra-pandemi, angka ini menunjukkan resiliensi ekonomi Kota Jayapura dan efektivitas kebijakan pemulihan yang diterapkan. *Trend* pemulihan berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan meningkat menjadi 3,87%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Capaian untuk tahun 2023 menunjukkan optimisme dengan pertumbuhan mencapai 4,53%. Angka ini mendekati level pertumbuhan pra-pandemi dan menandakan bahwa ekonomi Kota Jayapura hampir sepenuhnya pulih dari dampak pandemi. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura kembali mengalami penurunan menjadi hanya 3,56 persen.

Gambar 2.14.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Tahun 2020-2024

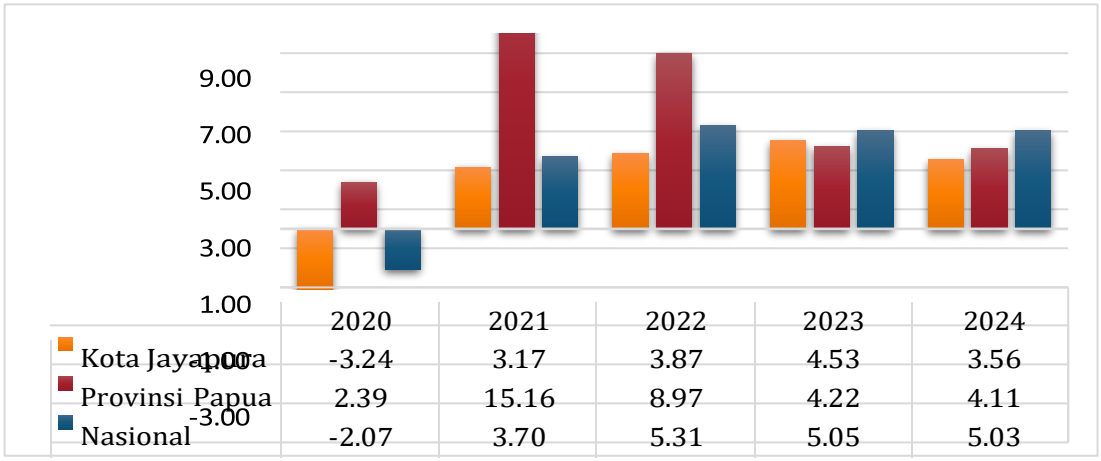


Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

Meskipun mengalami pukulan berat akibat pandemi pada tahun 2020, ekonomi Kota Jayapura menunjukkan kemampuan pemulihan yang kuat. Tren pertumbuhan positif yang konsisten sejak 2021 mengindikasikan efektivitas kebijakan ekonomi dan adaptasi masyarakat terhadap "normal baru". Namun, penting untuk terus mewaspadai potensi tantangan global dan lokal yang dapat mempengaruhi trajektori pertumbuhan ekonomi kota di masa mendatang.

Gambar 2.15.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

B. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk dalam satu tahun.

Nilai PDRB per kapita Kota Jayapura atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan karena pandemi covid-19. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 80,64 juta rupiah per kapita per tahun yang sebelumnya bisa mencapai 81,12 juta rupiah per kapita per tahun. Seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, nilai PDRB per kapita meningkat tiap tahun hingga pada tahun 2024 mencapai 94,67 juta rupiah per kapita per tahun.

Angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan kata lain selama tahun 2024 setiap orang di Kota Jayapura secara rata-rata mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 7,89 juta rupiah per kapita per bulan. Nilai ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7,61 juta rupiah per kapita perbulannya.

Tabel 2.50

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Jayapura menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita setahun	80,64	82,24	86,47	91,28	94,67
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita sebulan	6,72	6,85	7,21	7,61	7,89

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Keterangan:

** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

C. Indeks Gini

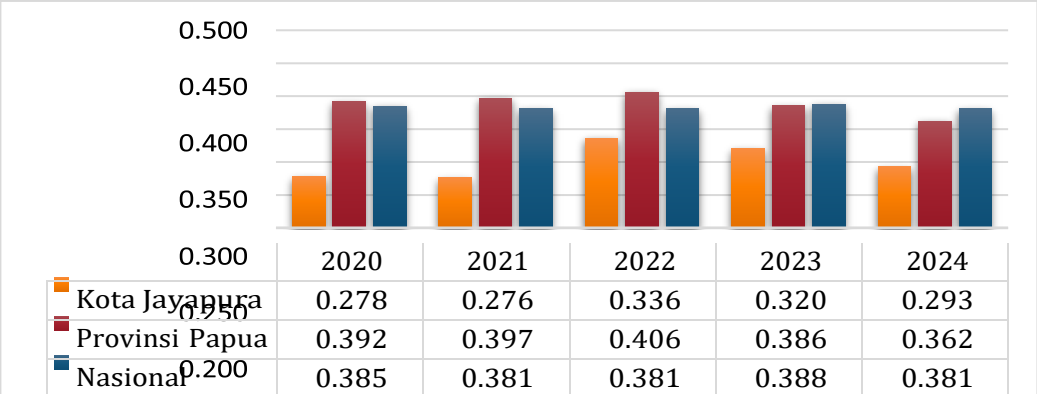
Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ditampilkan dengan kurva Lorens. Rentang nilai Gini Ratio yaitu antara 0 sampai dengan 1.

Indeks Gini Kota Jayapura pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu 0,278 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,276. Pada tahun 2022 indeks gini Kota Jayapura kembali meningkat menjadi 0,336, namun di tahun berikutnya kembali menurun menjadi 0,293 pada tahun 2024.

Nilai Indeks Gini Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan nilai Indeks Gini Provinsi Papua dan Nasional. Hal tersebut sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2.16.

Indeks Gini Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Nasional Tahun 2020–2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	0.278	0.276	0.336	0.320	0.293
Provinsi Papua	0.392	0.397	0.406	0.386	0.362
Nasional	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber: BPS RI dan BPS Kota Jayapura, 2025

D. Kemiskinan

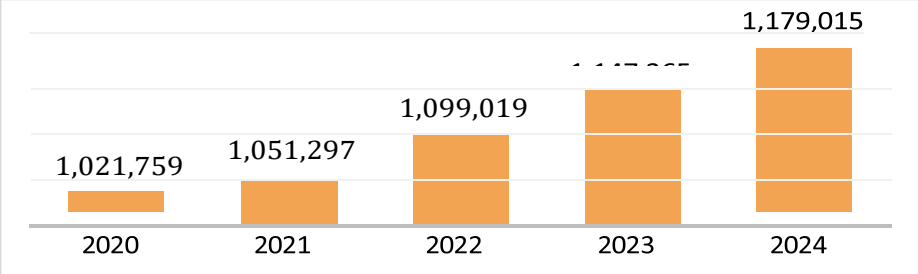
Kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pembangunan ekonomi suatu daerah. Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua dan pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia, memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Analisis kemiskinan di Kota Jayapura selama periode 2020-2024 menunjukkan

dinamika yang kompleks, tercermin dari fluktuasi jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, dan peningkatan garis kemiskinan. Data ini memberikan gambaran tentang upaya pengentasan kemiskinan dan tantangan yang dihadapi kota ini.

Peningkatan garis kemiskinan yang konsisten menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar hidup, sementara penurunan persentase kemiskinan mengindikasikan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan lebih lanjut, terutama mengingat biaya hidup yang terus meningkat. Pemerintah Kota Jayapura perlu terus meningkatkan dan mengevaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, serta fokus pada pemulihan ekonomi yang inklusif untuk memastikan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di masa depan

Gambar 2.17.

Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kota Jayapura Tahun 2020–2024

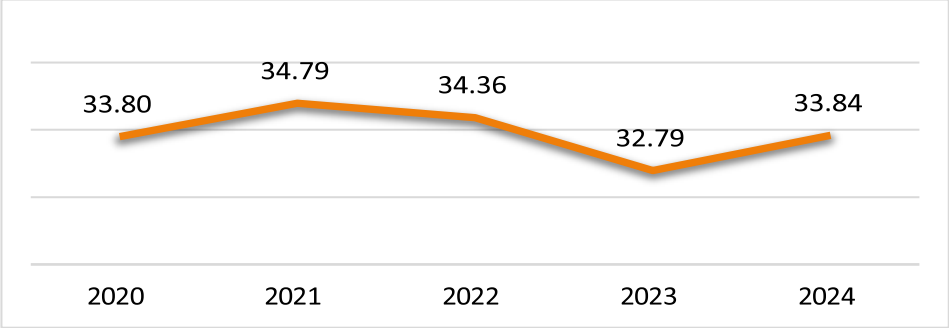


Sumber: BPS RI, 2025

Analisis terhadap data jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting tentang dinamika sosial-ekonomi Kota Jayapura, serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kota Jayapura tercatat sebesar Rp. 1.021.759 per kapita per bulan, dengan persentase penduduk miskin 11,16%. Memasuki tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 34,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan naik sedikit ke 11,39%, dan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 1.051.297.

Gambar 2.18.

Jumlah Penduduk Miskin Kota Jayapura Tahun 2020-2024 (data dalam ribuan)



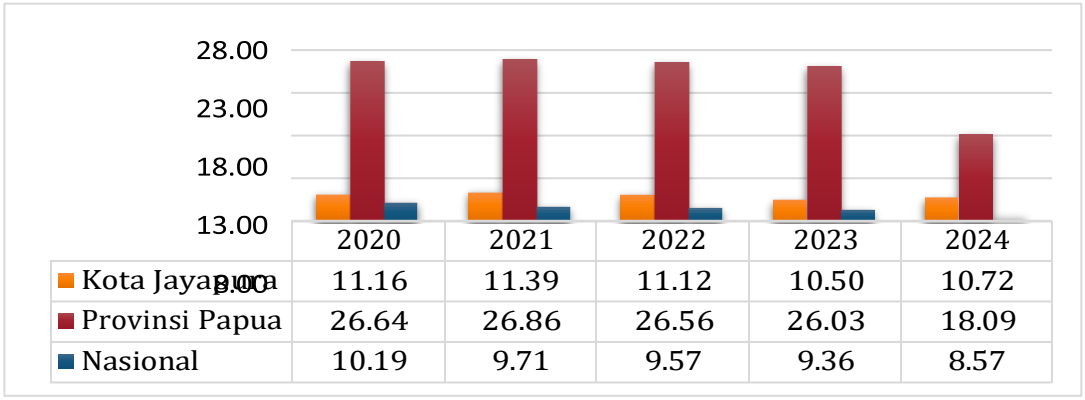
Sumber: BPS RI, 2025

Tahun 2023 menandai perubahan signifikan. Jumlah penduduk miskin turun drastis menjadi 32,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan turun ke 10,50%, namun garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.147.265. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang kontras dengan kenaikan garis kemiskinan ini, tentunya disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan konsumsi sehingga mengakibatkan standar garis kemiskinan ikut terdampak. Selanjutnya pada tahun 2024, Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 33,84 ribu jiwa, persentase kemiskinan juga meningkat ke 10,72% serta garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.179.015.

Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada dibawah Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua, namun pada periode tersebut Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura selalu berada diatas Persentase Penduduk Miskin Nasional.

Gambar 2.19.

Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024



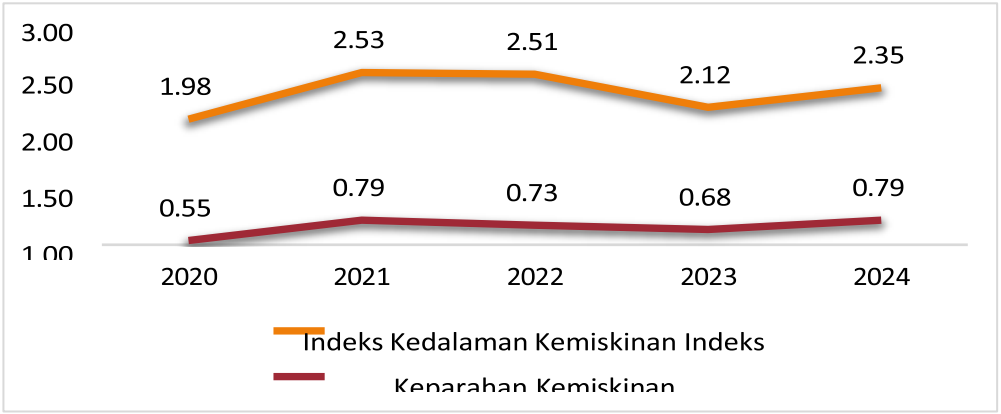
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	11.16	11.39	11.12	10.50	10.72
Provinsi Papua	26.64	26.86	26.56	26.03	18.09
Nasional	10.19	9.71	9.57	9.36	8.57

Sumber: BPS RI, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura yaitu sebesar 1,98 dan mengalami peningkatan serta penurunan pada tahun berikutnya menjadi 2,35 di tahun 2024. Sama hal nya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura juga demikian, Dimana pada tahun 2020 yaitu hanya 0,55 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,79, pada tahun berikutnya kembali turun menjadi 0,68 di tahun 2023, namun meningkat kembali menjadi 0,79 di tahun 2024.

Gambar 2.20.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

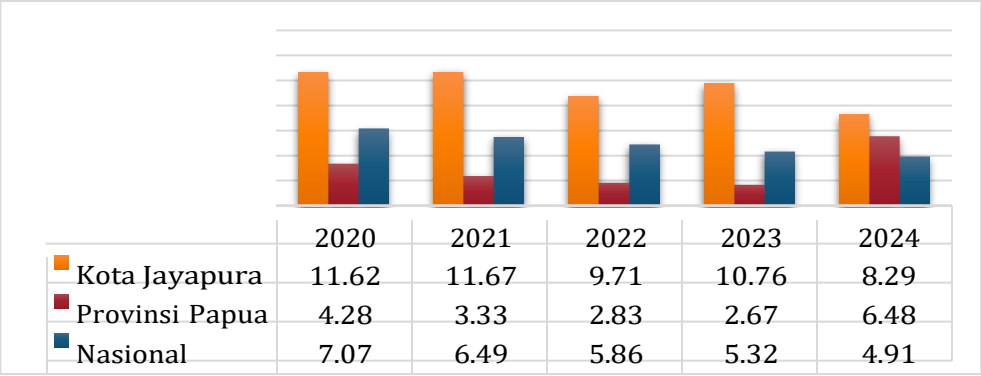
E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) memiliki hubungan yang erat dalam menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah. TPT merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Semakin rendah TPT, semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah, yang umumnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jayapura selama periode 2020-2024 menggambarkan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Selama lima tahun tersebut, TPT total Kota Jayapura mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 11,62% dan terendah pada tahun 2024 sebesar 8,29%. *Trend* umum menunjukkan penurunan dari 2020 ke 2022, sedikit kenaikan di 2023 dan penurunan signifikan di 2024.

Gambar 2.21.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	11.62	11.67	9.71	10.76	8.29
Provinsi Papua	4.28	3.33	2.83	2.67	6.48
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS RI, 2025

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Provinsi Papua dan Nasional, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya 6,48 persen, nasional 4,91 persen. Sedangkan Kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai 8,29 persen.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah ukuran penting yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan suatu populasi. Dikembangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), IPM mengintegrasikan tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan suatu wilayah dibandingkan dengan pengukuran yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. IPM membantu pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Metodologi perhitungan IPM melibatkan 3 (tiga) indikator utama: (1) Kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup saat lahir; (2) Pendidikan, diukur melalui kombinasi rata-rata lama sekolah untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah untuk anak-anak usia masuk sekolah; dan (3) Standar hidup, diukur melalui PNB (Produk Nasional Bruto) per kapita yang disesuaikan dengan Paritas Daya Beli. Setiap dimensi dinormalisasi ke dalam indeks dengan skala 0 hingga 1, kemudian IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiga indeks dimensi tersebut. Metode baru yang diterapkan sejak 2010 menggunakan rata-rata geometrik ini untuk lebih mencerminkan ketimpangan antar dimensi dalam pembangunan manusia.

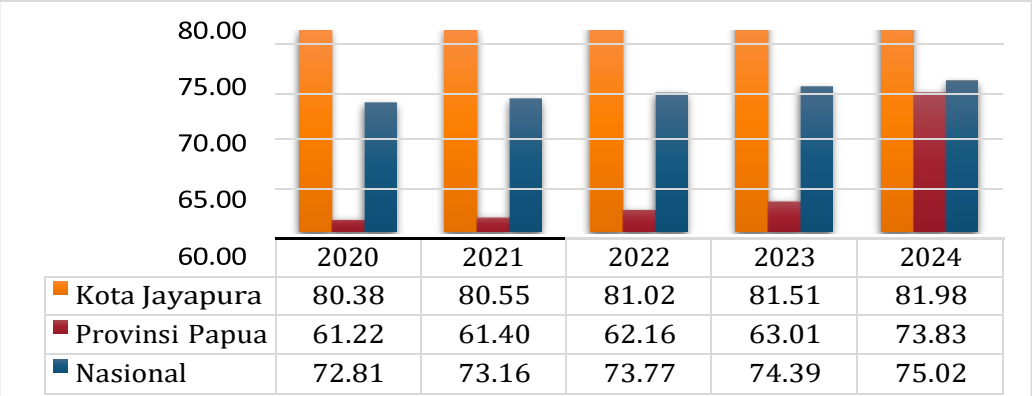
Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura menunjukkan situasi yang sangat mengesankan selama periode 2020-2024. Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura memperlihatkan tingkat pembangunan manusia yang jauh di atas rata-rata Provinsi Papua dan bahkan melebihi angka nasional. Pada tahun 2020, IPM Kota Jayapura tercatat sebesar 80,38%. Dalam empat tahun berikutnya, Kota Jayapura

berhasil meningkatkan IPM-nya secara konsisten. Tahun 2021 menjadi titik balik dengan IPM kembali naik menjadi 80,55%, menandai pemulihan dari dampak pandemi. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan IPM mencapai 81,02%, dan pada tahun 2024, Kota Jayapura mencatatkan IPM tertingginya selama periode ini yaitu 81,98%. *Trend* positif ini mencerminkan keberhasilan kota dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya di tengah berbagai tantangan.

Capaian IPM Kota Jayapura yang konsisten di atas 80% menempatkannya dalam kategori "IPM sangat tinggi" menurut standar UNDP. Ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Jayapura secara umum menikmati tingkat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang sangat baik. Angka ini juga mengindikasikan bahwa kota ini telah berhasil dalam menyediakan akses yang baik terhadap layanan kesehatan, fasilitas pendidikan yang berkualitas, serta peluang ekonomi yang memadai bagi penduduknya.

Gambar 2.22.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	80.38	80.55	81.02	81.51	81.98
Provinsi Papua	61.22	61.40	62.16	63.01	73.83
Nasional	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber BPS RI, 2025

Keberhasilan Kota Jayapura dalam mempertahankan dan meningkatkan IPM-nya, terutama pasca pandemi, menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan dan resiliensi ekonomi kota. Ini juga mencerminkan kemampuan pemerintah Kota Jayapura dalam mengelola sumber daya dan mengimplementasikan program-program

pembangunan yang tepat sasaran. Namun, capaian tinggi Kota Jayapura juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks kesenjangan dengan wilayah lain di Provinsi Papua. Dengan IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Papua, Kota Jayapura memiliki tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak pembangunan bagi wilayah sekitarnya. Kota Jayapura dapat menjadi model dan sumber pembelajaran bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedepan, tantangan bagi Kota Jayapura adalah bagaimana mempertahankan *trend* positif ini sambil terus mencari inovasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Fokus pada pemerataan akses terhadap layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan peluang ekonomi yang inklusif akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPM di masa mendatang. Pembahasan detail data IPM Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan Nasional untuk periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik. IPM Kota Jayapura menunjukkan *trend* positif dengan peningkatan dari 80,38 pada 2020 menjadi 81,98 pada 2024. IPM Provinsi Papua secara konsisten lebih rendah dibandingkan Kota Jayapura dan angka nasional. Namun, terdapat tren peningkatan dari 61,22 pada 2020 menjadi 73,83 pada 2024, menunjukkan adanya upaya pembangunan yang berkelanjutan di tingkat provinsi. Sementara itu, IPM Nasional Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil dari 72,81 pada 2020 menjadi 75,02 pada 2024, mencerminkan kemajuan pembangunan manusia secara keseluruhan di negara ini.

Perbandingan antara Kota Jayapura dan Provinsi Papua menunjukkan kesenjangan yang signifikan, dengan IPM Kota Jayapura secara konsisten lebih tinggi sekitar 20 poin. Ini mengindikasikan bahwa Kota Jayapura memiliki tingkat pembangunan manusia yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, karena statusnya sebagai ibu kota provinsi yang memiliki akses lebih baik ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dibandingkan dengan angka nasional, IPM

Kota Jayapura juga secara konsisten lebih tinggi, dengan selisih skala angka sekitar 8-9 point menunjukkan bahwa Kota Jayapura memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Kontribusi Kota Jayapura terhadap IPM Provinsi Papua terbatas karena perbedaan yang besar antara Kota dan Provinsi. Namun, Kota Jayapura dapat berfungsi sebagai model dan pusat pertumbuhan yang dapat mendorong pembangunan di wilayah sekitarnya. Data ini juga menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang signifikan antara Kota Jayapura dan wilayah lain di Provinsi Papua, mencerminkan tantangan dalam pemerataan pembangunan di provinsi tersebut. Kemampuan Kota Jayapura untuk memulihkan dan meningkatkan IPM-nya pasca pandemi covid-19 di tahun 2019 menunjukkan resiliensi dan efektivitas kebijakan pembangunan daerahnya.

Kesimpulannya, IPM Kota Jayapura yang tinggi menunjukkan keberhasilan kota ini dalam aspek pembangunan manusia. Namun, kesenjangan yang besar dengan IPM Provinsi Papua menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh provinsi. Kota Jayapura dapat berperan sebagai katalis pembangunan, berbagi praktik terbaik, dan mendukung upaya peningkatan kualitas hidup di wilayah sekitarnya. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan IPM Kota Jayapura dengan mendorong peningkatan yang lebih cepat di tingkat Provinsi Papua untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.

G. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

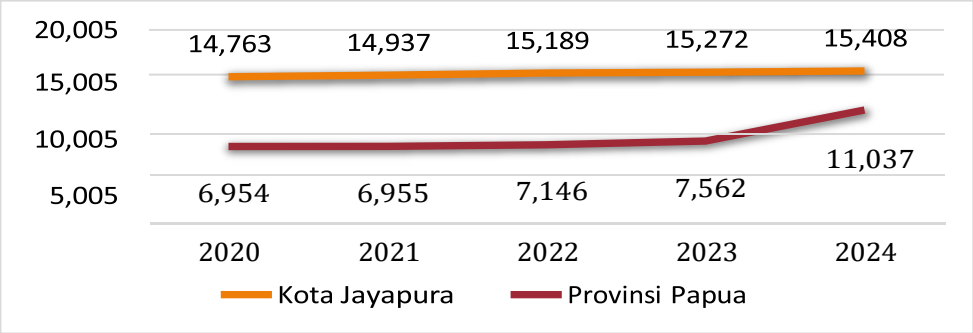
Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pola konsumsi masyarakat di suatu daerah. Indikator ini juga dapat memberikan gambaran tentang daya beli dan standar hidup penduduk setempat. Data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024

menunjukkan *trend* yang meningkat. Pada tahun 2020, angka pengeluaran tercatat sebesar Rp 14.763 ribu dan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dengan angka Rp. 14.937 ribu, diikuti kenaikan lebih lanjut menjadi Rp. 15.189 ribu pada tahun 2022, dan mencapai Rp. 15.408 ribu di tahun 2024.

Pengeluaran rata-rata per kapita Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Papua, dimana pengeluaran rata-rata per kapita untuk Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya Rp. 11.037 ribu, sedangkan kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai Rp. 15.408 ribu. Secara lengkap Pengeluaran rata-rata per kapita Kota Jayapura dan Provinsi Papua disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.23.

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Analisis dari data ini menunjukkan secara keseluruhan terdapat *trend* peningkatan pengeluaran per kapita di Kota Jayapura. Peningkatan ini bisa mengindikasikan beberapa hal, seperti membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi, meningkatnya daya beli masyarakat, atau terjadinya inflasi yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dalam konteks daya saing, peningkatan pengeluaran per kapita ini dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. Di satu sisi, menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan daya beli

masyarakat Kota Jayapura, yang dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di Kota Jayapura. Peningkatan konsumsi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sedangkan peningkatan pengeluaran juga bisa mengindikasikan naiknya biaya hidup di Kota Jayapura. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang setara, hal ini bisa berdampak negatif terhadap daya saing kota dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja atau investasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing Kota Jayapura, penting untuk memastikan bahwa peningkatan pengeluaran ini sejalan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan sektor-sektor produktif dapat membantu memastikan bahwa peningkatan pengeluaran ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota secara keseluruhan.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

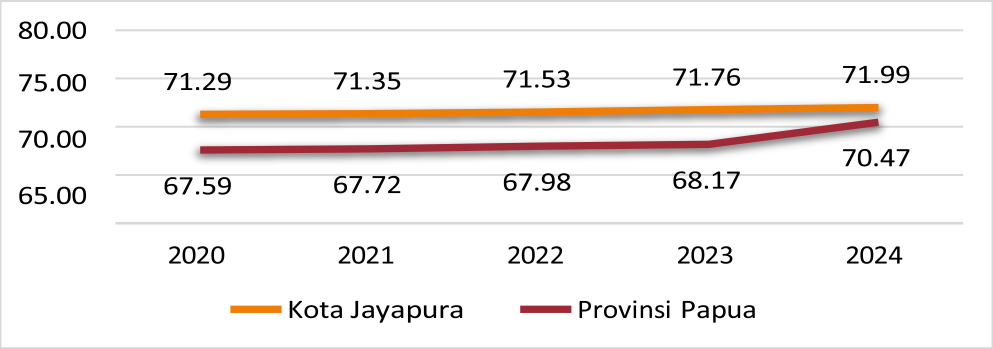
A. Angka Usia Harapan Hidup

Tujuan utama penggunaan AHH adalah untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi, membandingkan kualitas hidup antar wilayah atau negara, mengevaluasi efektivitas kebijakan kesehatan dan pembangunan, membantu dalam perencanaan layanan kesehatan dan sosial, serta menjadi indikator dalam perhitungan IPM.

Data Angka Harapan Hidup Kota Jayapura untuk periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dimulai dari 71,29 tahun pada 2020, AHH meningkat menjadi 71,35 tahun pada 2021, 71,53 tahun pada 2022, dan mencapai 71,99 tahun pada 2024. *Trend* ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam kesehatan dan kualitas hidup penduduk kota. Dalam lima tahun, AHH Kota Jayapura meningkat sebesar 0,70 tahun, yang merupakan peningkatan yang cukup signifikan mengingat AHH biasanya berubah secara gradual.

Gambar 2.24.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI, 2025

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH Provinsi Papua, dimana AHH Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya 70,47 tahun, sedangkan Kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai 71,99 tahun.

AHH Kota Jayapura menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan kualitas hidup di Kota Jayapura relatif baik. Meskipun terjadi pandemi yang dimulai pada tahun 2020, AHH Kota Jayapura tetap menunjukkan peningkatan, yang mencerminkan efektivitas penanganan pandemi dan ketahanan sistem kesehatan Kota Jayapura. Peningkatan AHH ini didukung oleh berbagai faktor, seperti perbaikan layanan kesehatan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat.

Peningkatan AHH ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan kebijakan, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial untuk populasi yang semakin menua. Meskipun tren positif, masih ada ruang untuk peningkatan. Tantangan ke depan termasuk mengurangi kesenjangan kesehatan dalam masyarakat, menangani penyakit tidak menular, dan mempersiapkan sistem kesehatan untuk populasi yang sudah lansia.

B. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak mengalami hambatan yang disebabkan oleh malnutrisi, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kondisi ini sering kali dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak, yang merupakan periode kritis dalam menentukan perkembangan masa depan mereka. Stunting tidak hanya mempengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai status kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu wilayah.

Sejarah stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat telah diakui sejak beberapa dekade yang lalu. Pada pertengahan abad ke-20, penelitian mulai mengidentifikasi hubungan antara malnutrisi kronis pada anak-anak dan dampaknya terhadap pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga-lembaga kesehatan global lainnya kemudian mengembangkan standar pertumbuhan anak yang digunakan untuk mengukur dan memantau prevalensi stunting. Selama bertahun-tahun, berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan program untuk mengatasi stunting, dengan fokus pada peningkatan gizi ibu dan anak, akses terhadap layanan kesehatan, serta edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan sanitasi yang baik.

Tabel 2.51

Prevalensi Stunting Kota Jayapura Tahun 2021-2024

URAIAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita	6,316	9,614	5,841	6,087
Pendek	714	1,120	845	584
Sangat Pendek	190	382	286	176
Prevalensi (%)	**14.3**	**15.6**	**19.4**	**12.5**

Sumber: Website Ditjen Bangda Kemendagri (Diolah)

Prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2024 di Kota Jayapura mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah balita adalah 6,316 anak, yang kemudian meningkat tajam menjadi 9,614 anak pada tahun 2022. Namun, jumlah ini menurun drastis menjadi 5,841 anak di tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 6,087 anak pada tahun 2024.

Jumlah balita yang mengalami kondisi pendek juga memperlihatkan fluktuasi. Pada tahun 2021, terdapat 714 balita pendek, dan jumlah ini meningkat tajam menjadi 1,120 anak pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah balita pendek menurun menjadi 845 anak dan terus berkurang menjadi 584 anak pada tahun 2024. Kondisi sangat pendek juga menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2021, terdapat 190 balita sangat pendek, yang meningkat menjadi
382 anak pada tahun 2022. Jumlah ini kemudian menurun secara bertahap menjadi 286 anak di tahun 2023, dan akhirnya mencapai 176 anak pada tahun 2024.

Prevalensi stunting di Kota Jayapura mengalami peningkatan dari tahun 2021 (14.3%) ke tahun 2023 (19.4%). Namun, pada tahun 2024, prevalensi ini turun menjadi 12.5%, menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan dan pencegahan stunting. Penurunan prevalensi stunting dari 19.4% di tahun 2023 menjadi 12.5% di tahun 2024 merupakan indikator positif dari intervensi kesehatan, nutrisi, dan program-program pengembangan anak yang telah diterapkan di Kota Jayapura.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah balita dengan kondisi pendek dan sangat pendek pada tahun 2022, upaya yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan pada tahun 2024. Upaya ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan untuk memastikan setiap anak di Kota Jayapura dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

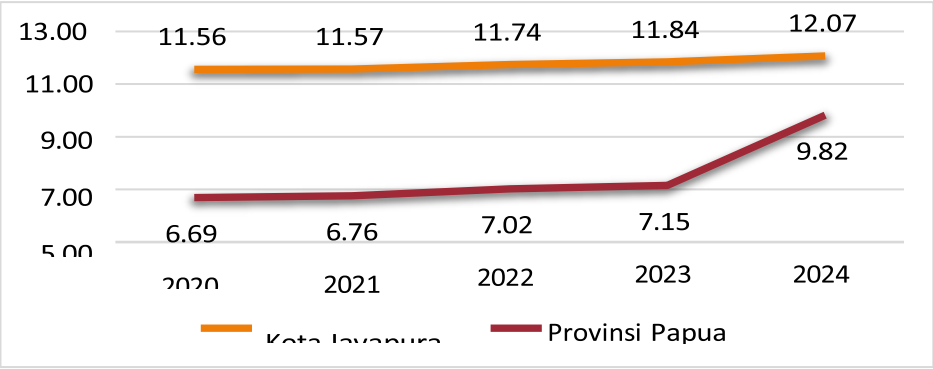
A. Rata-Rata Lama Sekolah

RLS (Rata-rata Lama Sekolah) adalah indikator pendidikan yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Grafik di bawah menjelaskan tentang data Rata-rata Lama Sekolah Kota Jayapura untuk periode 2020-2024, dimana menunjukkan *trend* peningkatan yang konsisten dan cukup signifikan. Pada tahun 2020, RLS Kota Jayapura tercatat sebesar 11,56 tahun. Angka ini meningkat sedikit menjadi 11,57 tahun pada 2021. Namun, terjadi peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022 menjadi 11,74 tahun, dan terus meningkat hingga mencapai 12,07 tahun pada 2024. Total peningkatan selama lima tahun periode ini adalah 0,51 tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 capaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua, dimana pada tahun 2024 capaian provinsi Papua hanya mencapai 9,82 tahun, sedangkan Kota Jayapura mencapai 12,07.

Gambar 2.25.

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Angka RLS Kota Jayapura yang berada di atas 11 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di kota ini telah menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 2 atau 3 SMA. Ini merupakan capaian yang cukup baik dan menunjukkan tingkat

pendidikan yang relatif tinggi di Kota Jayapura. Dalam konteks nasional, angka ini berada di atas rata-rata nasional Indonesia yang berkisar sekitar 8-9 tahun, menempatkan Kota Jayapura sebagai salah satu daerah dengan tingkat pendidikan yang baik di Indonesia. Capaian ini sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penddikan.

Peningkatan RLS yang konsisten selama periode pandemi (2020- 2022) menunjukkan ketahanan sistem pendidikan Kota Jayapura. Ini mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan partisipasi sekolah dan mendorong penyelesaian pendidikan di tengah tantangan pandemi, sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Lonjakan peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022 dan 2023 menandakan adanya kebijakan program Pendidikan yang berhasil mendorong peningkatan tingkat pendidikan penduduk, seperti program pendidikan untuk orang dewasa dan insentif dalam bentuk beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi.

Meskipun capaian RLS Kota Jayapura sudah cukup baik, masih ada ruang untuk peningkatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tantangan ke depan termasuk mendorong lebih banyak penduduk untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas dan melanjutkan ke pendidikan tinggi, sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, fokus juga perlu diberikan pada pengurangan kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan

pasar kerja, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DI KOTA JAYAPURA

3.1. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

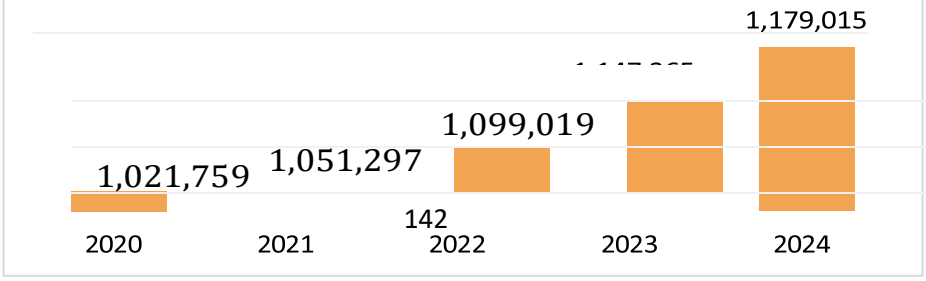
Kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pembangunan ekonomi suatu daerah. Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua dan pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia, memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Analisis kemiskinan di Kota Jayapura selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang kompleks, tercermin dari fluktuasi jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan, dan peningkatan garis kemiskinan. Data ini memberikan gambaran tentang upaya pengentasan kemiskinan dan tantangan yang dihadapi kota ini.

3.1.1. Kondisi Kemiskinan Makro di Kota Jayapura

Peningkatan garis kemiskinan yang konsisten menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar hidup, sementara penurunan persentase kemiskinan mengindikasikan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan lebih lanjut, terutama mengingat biaya hidup yang terus meningkat. Pemerintah Kota Jayapura perlu terus meningkatkan dan mengevaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan, serta fokus pada pemulihan ekonomi yang inklusif untuk memastikan penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di masa depan

Gambar 3.1

Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Kota Jayapura Tahun 2020–2024

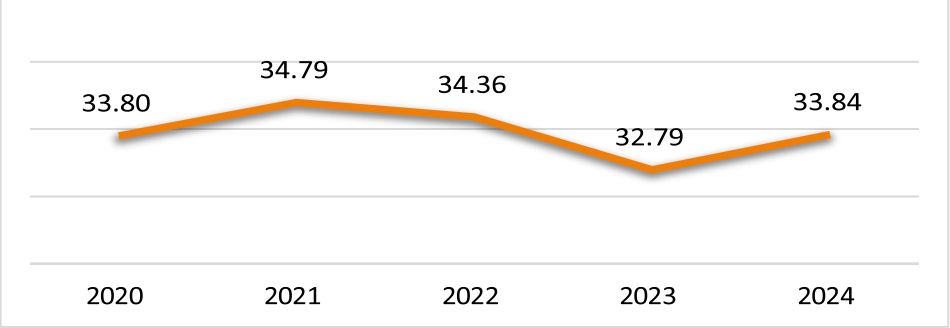


Sumber: BPS RI, 2025

Analisis terhadap data jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting tentang dinamika sosial-ekonomi Kota Jayapura, serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kota Jayapura tercatat sebesar Rp. 1.021.759 per kapita per bulan, dengan persentase penduduk miskin 11,16%. Memasuki tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 34,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan naik sedikit ke 11,39%, dan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 1.051.297.

Gambar 3.2

Jumlah Penduduk Miskin Kota Jayapura Tahun 2020-2024
(data dalam ribuan)



Sumber: BPS RI, 2025

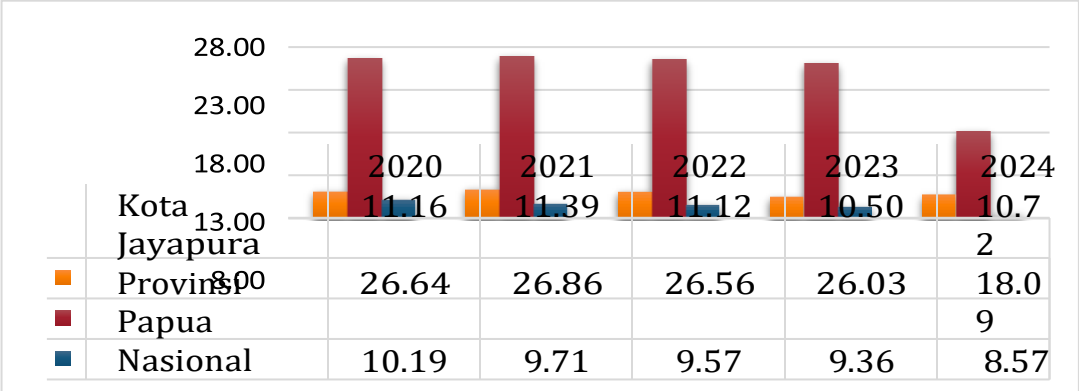
Tahun 2023 menandai perubahan signifikan. Jumlah penduduk miskin turun drastis menjadi 32,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan turun ke 10,50%, namun garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.147.265. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang kontras dengan kenaikan garis kemiskinan ini, tentunya disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan konsumsi sehingga mengakibatkan standar garis kemiskinan ikut terdampak.

Selanjutnya pada tahun 2024, Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 33,84 ribu jiwa, persentase kemiskinan juga meningkat ke 10,72% serta garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.179.015.

Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada dibawah Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua, namun pada periode tersebut Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura selalu berada diatas Persentase Penduduk Miskin Nasional.

Gambar 3.3.

Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024



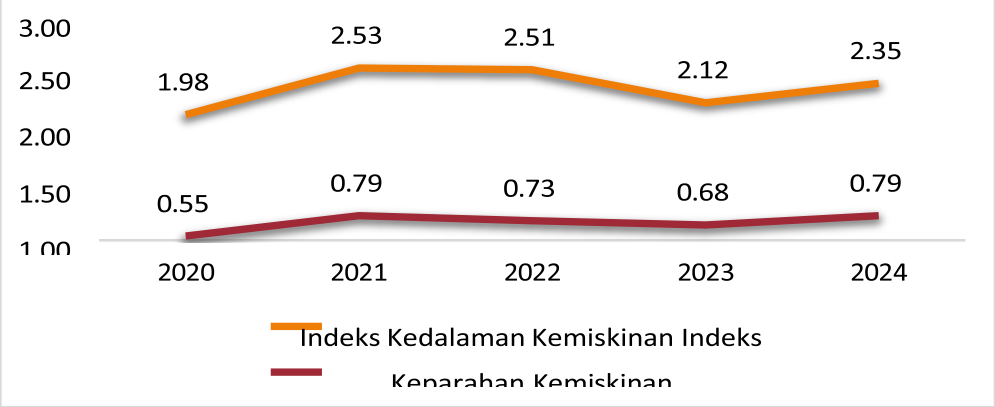
Sumber: BPS RI, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura yaitu sebesar 1,98 dan mengalami peningkatan serta penurunan pada tahun berikutnya menjadi 2,35 di tahun 2024. Sama hal nya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura juga demikian, Dimana pada tahun 2020 yaitu hanya 0,55 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,79, pada tahun berikutnya kembali turun

menjadi 0,68 di tahun 2023, namun meningkat kembali menjadi 0,79 di tahun 2024.

Gambar 3.4.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

3.1.2. Kondisi Kemiskinan Mikro Kota Jayapura

3.1.2.1. Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Kesejahteraan

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kota Jayapura Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Muara Tami	13.676	12.567	26.243
Abepura	63.986	56.960	120.946
Heram	33.818	29.226	63.044
Jayapura Selatan	52.812	47.760	100.572
Jayapura Utara	49.734	44.260	93.994
Kota Jayapura	**214.026**	**190.773**	**404.799**

Sumber: Kota Jayapura Dalam Angka 2025

Trend Pertumbuhan Penduduk Kota Jayapura yang terus mengalami Peningkatan yang Signifikan dan Heterogen, terdiri dari semua Suku Bangsa yang ada di Indonesia berdomisili di Wilayah Kota Jayapura dengan Jumlah Penduduk sesuai data Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebanyak

404.779 Jiwa yang terdiri dari Penduduk Laki-laki sebanyak 214.026 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan sebanyak 190.773 Jiwa.

3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan Konsumsi

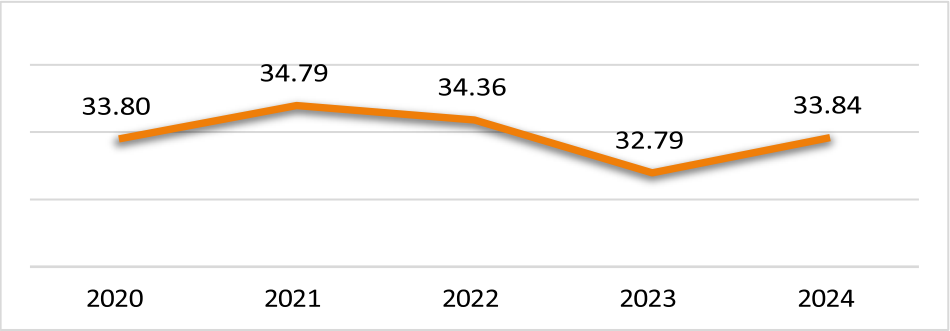
Analisis Karakteristik Kemiskinan Konsumsi di Kota Jayapura diukur dengan beberapa indikator yaitu Penduduk Miskin, Kedalaman Kemiskinan , Tingkat Keparahan Kemiskinan, serta Berbagai indikator tersebut kemudian dianalisis berdasarkan posisi relatif, perkembangan time series, efetivitas, dan relevansi.

3.2.1 Jumlah Penduduk

Analisis terhadap data jumlah penduduk miskin di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran penting tentang dinamika sosial-ekonomi Kota Jayapura, serta efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kota Jayapura tercatat sebesar Rp. 1.021.759 per kapita per bulan, dengan persentase penduduk miskin 11,16%. Memasuki tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 34,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan naik sedikit ke 11,39%, dan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 1.051.297.

Gambar 3.5.

Jumlah Penduduk Miskin Kota Jayapura Tahun 2020-2024
(data dalam ribuan)



Sumber: BPS RI, 2025

Tahun 2023 menandai perubahan signifikan. Jumlah

penduduk miskin turun drastis menjadi 32,79 ribu jiwa, persentase kemiskinan turun ke 10,50%, namun garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.147.265. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang kontras dengan kenaikan garis kemiskinan ini, tentunya disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan konsumsi sehingga mengakibatkan standar garis kemiskinan ikut terdampak. Selanjutnya pada tahun 2024, Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 33,84 ribu jiwa, persentase kemiskinan juga meningkat ke 10,72% serta garis kemiskinan terus naik menjadi Rp. 1.179.015.

3.2.2. Presentasi Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada dibawah Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua, namun pada periode tersebut Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura selalu berada diatas Persentase Penduduk Miskin Nasional.

Gambar 3.6

Persentase Penduduk Miskin Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	11.16	11.39	11.12	10.50	10.72
Provinsi Papua	26.64	26.86	26.56	26.03	18.09
Nasional	10.19	9.71	9.57	9.36	8.57



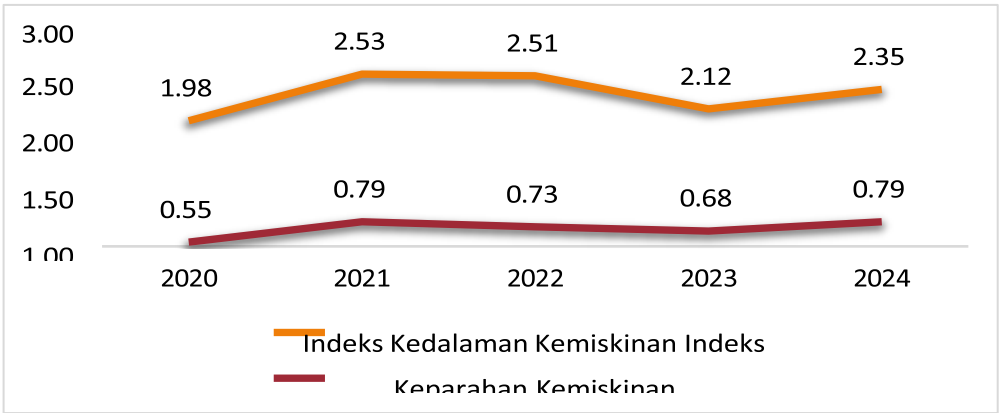
Sumber: BPS RI, 2025

3.2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Jayapura yaitu sebesar 1,98 dan mengalami peningkatan serta penurunan pada tahun berikutnya menjadi 2,35 di tahun 2024. Sama hal nya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura juga demikian, Dimana pada tahun 2020 yaitu hanya 0,55 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,79, pada tahun berikutnya kembali turun menjadi 0,68 di tahun 2023, namun meningkat kembali menjadi 0,79 di tahun 2024.

Gambar 3.7.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Jayapura Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

3.2.4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

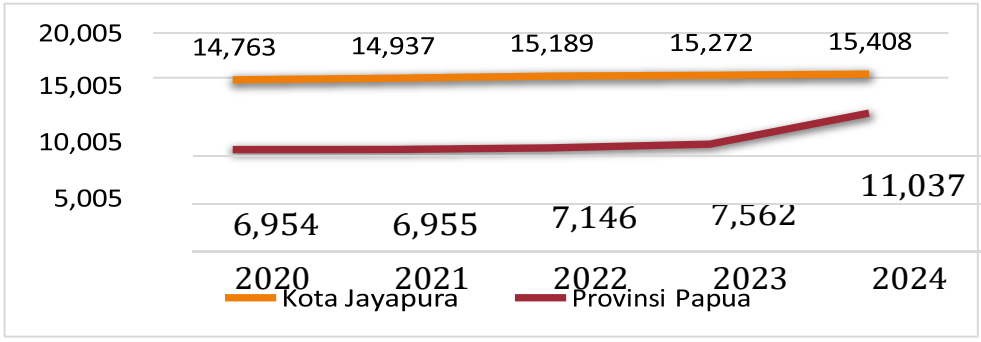
Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan untuk Makanan

dan Bukan Makanan merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pola konsumsi masyarakat di suatu daerah. Indikator ini juga dapat memberikan gambaran tentang daya beli dan standar hidup penduduk setempat. Data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan *trend* yang meningkat. Pada tahun 2020, angka pengeluaran tercatat sebesar Rp 14.763 ribu dan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dengan angka Rp. 14.937 ribu, diikuti kenaikan lebih lanjut menjadi Rp. 15.189 ribu pada tahun 2022, dan mencapai Rp. 15.408 ribu di tahun 2024.

Pengeluaran rata-rata per kapita Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Papua, dimana pengeluaran rata-rata per kapita untuk Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya Rp. 11.037 ribu, sedangkan kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai Rp. 15.408 ribu. Secara lengkap Pengeluaran rata-rata per kapita Kota Jayapura dan Provinsi Papua disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.8.

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Kota Jayapura dan Provinsi Papua Tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Analisis dari data ini menunjukkan secara keseluruhan terdapat *trend* peningkatan pengeluaran per kapita di Kota Jayapura. Peningkatan ini bisa mengindikasikan beberapa hal,

seperti membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi, meningkatnya daya beli masyarakat, atau terjadinya inflasi yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dalam konteks daya saing, peningkatan pengeluaran per kapita ini dapat diinterpretasikan secara positif maupun negatif. Di satu sisi, menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kota Jayapura, yang dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di Kota Jayapura. Peningkatan konsumsi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sedangkan peningkatan pengeluaran juga bisa mengindikasikan naiknya biaya hidup di Kota Jayapura. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang setara, hal ini bisa berdampak negatif terhadap daya saing kota dalam menarik dan mempertahankan tenaga kerja atau investasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing Kota Jayapura, penting untuk memastikan bahwa peningkatan pengeluaran ini sejalan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan sektor-sektor produktif dapat membantu memastikan bahwa peningkatan pengeluaran ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota secara keseluruhan.

3.3. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan

3.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK di Kota Jayapura selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, sangat dipengaruhi oleh kondisi krisis pada saat pandemi COVID-19. Lalu berangsur membaik sampai

dengan tahun 2024. Walau demikian, TPAK Kota Jayapura masih berada di bawah TPAK Provinsi Papua. Perkembangan TPAK selama 5 (lima) tahun terakhir dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Jayapura
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	63,09	63,75	60,61	67,37	67,81
Provinsi Papua	72, 16	78,29	77,75	77,20	68,40

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2025

3.3.2. Indikator Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Jayapura. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 301,89 ribu orang, naik sebanyak 4,47 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 204,70 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 97,19 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 187,74 ribu orang penduduk yang bekerja dan 16,96 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 4,32 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 8,93 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 4,61 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan dibanding Agustus 2023. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 67,81 persen, naik 0,44 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024,

TPAK laki-laki sebesar 78,57 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 45,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 3,35 persen poin sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 5,29 persen poin.

Tabel 3.3

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kota Jayapura Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angkatan Kerja (orang)	149.804	153.900	123.930	200.376	204.700
2.	Bukan Angkatan Kerja (orang)	87.640	87.522	96.590	97.040	97.190
3.	Pengangguran Terbuka (orang)	17.409	17.961	14.432	21.568	16.960
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,16	78,29	60,61	67,37	67,81
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	11,62	11,67	9,71	10,76	8,29

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2025

3.3.3 . Tingkat Pengangguran Terbuka

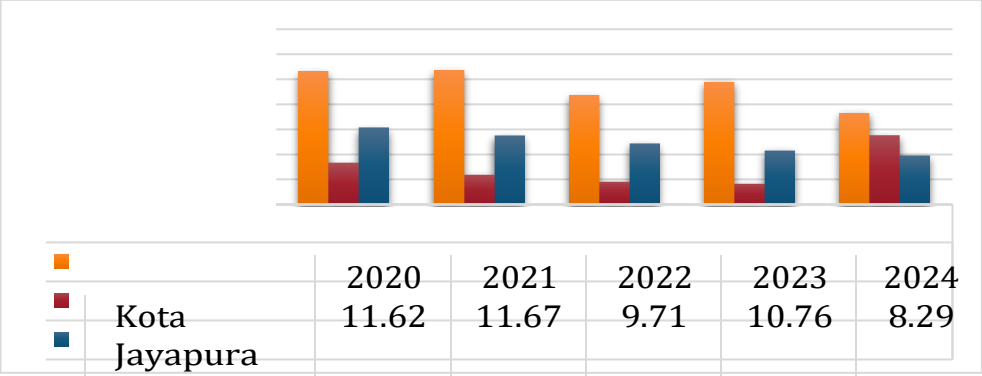
Ketenagakerjaan dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) memiliki hubungan yang erat dalam menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah. TPT merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Semakin rendah TPT, semakin baik kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah, yang umumnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jayapura selama periode 2020-2024 menggambarkan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Selama lima tahun tersebut, TPT

total Kota Jayapura mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 11,62% dan terendah pada tahun 2024 sebesar 8,29%. *Trend* umum menunjukkan penurunan dari 2020 ke 2022, sedikit kenaikan di 2023 dan penurunan signifikan di 2024.

Gambar 3.9

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura, Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2020 – 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jayapura	11.62	11.67	9.71	10.76	8.29
Provinsi Papua	4.28	3.33	2.83	2.67	6.48
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS RI, 2025

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Jayapura sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua dan Nasional, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua pada tahun 2024 hanya 6,48 persen, nasional 4,91 persen. Sedangkan Kota Jayapura pada tahun yang sama mencapai 8,29 persen.

3.3.4. Jumlah Penduduk Bekerja

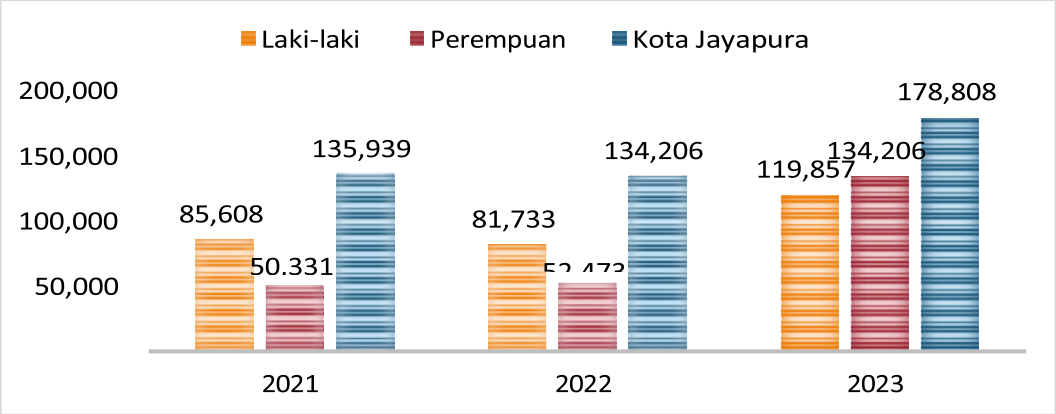
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Jayapura Tahun 2021-2023 merupakan data penting yang menggambarkan dinamika ketenagakerjaan di kota tersebut. Data

ini mencerminkan partisipasi angkatan kerja dan dapat menjadi indikator perkembangan ekonomi serta kesetaraan gender dalam pasar tenaga kerja. Analisis data menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah penduduk bekerja di Kota Jayapura selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, total penduduk bekerja tercatat 135.939 jiwa, dengan komposisi 85.608 laki-laki (63%) dan 50.331 perempuan (37%). Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 134.206 jiwa, namun dengan perubahan komposisi dimana jumlah pekerja laki-laki menurun 4,5% menjadi 81.733 (60,9%), sementara pekerja perempuan meningkat 4,3% menjadi 52.473 (39,1%).

Perubahan drastis terjadi pada tahun 2023, dengan total penduduk bekerja melonjak 33,2% menjadi 178.808 jiwa. Peningkatan ini didominasi oleh pertumbuhan pekerja laki-laki sebesar 46,6% menjadi 119.857, sementara jumlah pekerja perempuan meningkat lebih dari dua kali lipat (155,8%) menjadi 134.206. Komposisi gender pun berubah signifikan dengan 47,2% pekerja laki-laki dan 52,8% pekerja perempuan.

Gambar 3.10

Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Jayapura Tahun 2021-2023 (jiwa)



Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2024

Fluktuasi ini menunjukkan dinamika pasar kerja yang

kompleks di Kota Jayapura. Penurunan kecil pada tahun 2022 mencerminkan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Namun, lonjakan besar pada 2023 dapat mengindikasikan pemulihan ekonomi yang kuat atau perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan dramatis partisipasi perempuan dalam angkatan kerja pada 2023 adalah fenomena yang patut dicermati, menandakan pergeseran sosial-ekonomi yang signifikan atau implementasi kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam pekerjaan. *Trend* umum menunjukkan peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kota Jayapura, yang dapat menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Jayapura ke depan.

Dalam konteks daya saing, peningkatan jumlah penduduk bekerja, terutama lonjakan signifikan pada tahun 2023, dapat berdampak positif terhadap daya saing Kota Jayapura. Pertama, peningkatan angkatan kerja menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia yang lebih besar, yang dapat menjadi daya tarik bagi investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan dan mendorong inovasi melalui keragaman tenaga kerja.

Namun, untuk benar-benar meningkatkan daya saing, Pemerintah Kota Jayapura perlu memastikan bahwa peningkatan kuantitas tenaga kerja ini juga diimbangi dengan peningkatan kualitas. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja, serta pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan industri. Selain itu, pemerintah kota perlu memperhatikan aspek pemerataan kesempatan kerja dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga dapat menjadi keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik. Hal ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung keseimbangan

kerja- kehidupan, perlindungan terhadap diskriminasi gender, dan promosi kesetaraan dalam kesempatan pengembangan karir. Dengan pendekatan yang komprehensif, Kota Jayapura dapat memanfaatkan

3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan

3.4.1 . Angka Morbidtas

Angka Morbiditas (AM) (Angka Morbiditas)/Angka Kesakitan/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan bermanfaat untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat yang bersangkutan. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah,dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

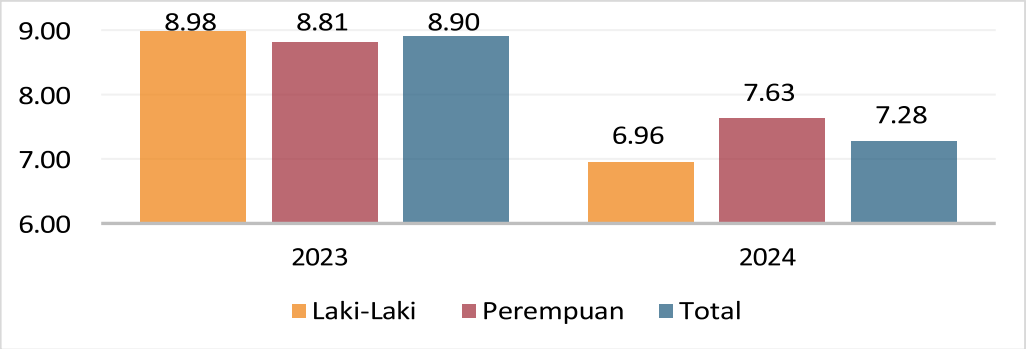
Berdasarkan hasil olahan data Susenas 2024, Angka Morbiditas Kota Jayapura adalah 7,28 persen yang artinya bahwa dari setiap 100 jiwa penduduk di Kota Jayapura, terdapat sekitar 7 sampai 8 jiwa yang memiliki keluhan kesehatan pada tahun 2024. Agar lebih tepat dan fokus dalam pengambilan kebijakan, pada Gambar di bawah tersaji data persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dirinci menurut jenis kelamin. Persentase penduduk yang mengalami kesakitan terbesar yaitu perempuan sebesar 7,63 persen.

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya,

keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi.

Gambar 3.11

Angka Kesakitan Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kota Jayapura Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jayapura, 2024 dan BPS Kota Jayapura 2025

Strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan akses ke layanan kesehatan *preventif,* kampanye kesadaran kesehatan yang ditargetkan, serta intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik populasi laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terarah, Kota Jayapura dapat berupaya menurunkan angka morbiditas secara keseluruhan, sekaligus m empersempit kesenjangan kesehatan antara populasi laki-laki dan perempuan. tren positif dalam angkatan kerjanya untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan sosialnya di tingkat regional maupun nasional.

3.4.2. Prevelansi Stunting

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak mengalami hambatan yang disebabkan oleh malnutrisi, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kondisi ini sering kali dimulai sejak 1.000 hari pertama kehidupan anak, yang merupakan periode kritis dalam menentukan perkembangan masa depan mereka. Stunting tidak hanya

mempengaruhi tinggi badan anak, tetapi juga berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai status kesehatan dan kesejahteraan anak di suatu wilayah.

Sejarah stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat telah diakui sejak beberapa dekade yang lalu. Pada pertengahan abad ke-20, penelitian mulai mengidentifikasi hubungan antara malnutrisi kronis pada anak-anak dan dampaknya terhadap pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga-lembaga kesehatan global lainnya kemudian mengembangkan standar pertumbuhan anak yang digunakan untuk mengukur dan memantau prevalensi stunting. Selama bertahun-tahun, berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan program untuk mengatasi stunting, dengan fokus pada peningkatan gizi ibu dan anak, akses terhadap layanan kesehatan, serta edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan sanitasi yang baik.

Tabel 3.4

Prevalensi Stunting Kota Jayapura Tahun 2021-2024

URAIAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita	6,316	9,614	5,841	6,087
Pendek	714	1,120	845	584
Sangat Pendek	190	382	286	176
Prevalensi (%)	**14.3**	**15.6**	**19.4**	**12.5**

Sumber: Website Ditjen Bangda Kemendagri (Diolah)

Prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2024 di Kota Jayapura mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah balita adalah 6,316 anak, yang kemudian meningkat tajam menjadi 9,614 anak pada tahun 2022. Namun, jumlah ini menurun drastis menjadi 5,841 anak di tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 6,087 anak pada tahun 2024.

Jumlah balita yang mengalami kondisi pendek juga memperlihatkan fluktuasi. Pada tahun 2021, terdapat 714 balita pendek, dan jumlah ini meningkat tajam menjadi 1,120 anak pada

tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah balita pendek menurun menjadi 845 anak dan terus berkurang menjadi 584 anak pada tahun 2024. Kondisi sangat pendek juga menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2021, terdapat 190 balita sangat pendek, yang meningkat menjadi 382 anak pada tahun 2022. Jumlah ini kemudian menurun secara bertahap menjadi 286 anak di tahun 2023, dan akhirnya mencapai 176 anak pada tahun 2024.

Prevalensi stunting di Kota Jayapura mengalami peningkatan dari tahun 2021 (14.3%) ke tahun 2023 (19.4%). Namun, pada tahun 2024, prevalensi ini turun menjadi 12.5%, menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan dan pencegahan stunting. Penurunan prevalensi stunting dari 19.4% di tahun 2023 menjadi 12.5% di tahun 2024 merupakan indikator positif dari intervensi kesehatan, nutrisi, dan program-program pengembangan anak yang telah diterapkan di Kota Jayapura.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah balita dengan kondisi pendek dan sangat pendek pada tahun 2022, upaya yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan pada tahun 2024. Upaya ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan untuk memastikan setiap anak di Kota Jayapura dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

3.4.3. Layanan Kesehatan

Evaluasi terhadap distribusi fasilitas kesehatan di Kota Jayapura pada tahun 2023 menggambarkan infrastruktur pelayanan kesehatan yang beragam dan tersebar di seluruh distrik. Total 252 fasilitas kesehatan yang tercatat menunjukkan upaya signifikan dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi penduduk.

Hasil analisis pada ke lima Distrik mengungkapkan pola yang menarik, yakni: Distrik Abepura memimpin dalam jumlah total fasilitas kesehatan dengan 68 unit, termasuk 2 rumah sakit umum

dan 1 rumah sakit khusus. Keberadaan rumah sakit khusus di Distrik ini mengindikasikan adanya layanan kesehatan spesialis yang terpusat di area tersebut. Distrik Jayapura Selatan menempati posisi kedua dengan 62 fasilitas, didominasi oleh 53 Posyandu yang menunjukkan fokus kuat pada layanan kesehatan dasar dan preventif. Distrik Jayapura Utara, meskipun memiliki jumlah total fasilitas yang lebih sedikit (57), menonjol dengan 3 rumah sakit umum dan 7 Klinik Pratama, menandakan konsentrasi layanan kesehatan yang lebih kompleks di wilayah ini.

Tabel 3.5

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Jayapura Tahun 2023

No	Distrik	Fasilitas Kesehatan						
		Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas	Klinik Pratama	Posyandu	Jumlah
1.	Muara Tami	1	0	1	2	1	25	29
2.	Abepura	2	1	0	3	4	60	68
3.	Heram	1	0	0	3	2	30	36
4.	Jayapura Selatan	1	0	0	3	4	53	62
5.	Jayapura Utara	3	0	0	3	7	44	57
Kota Jayapura		**8**	**1**	**1**	**14**	**18**	**212**	**252**

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, 2024

Distrik Heram, dengan 36 fasilitas, dan Distrik Muara Tami dengan 29 fasilitas, menunjukkan distribusi yang lebih terbatas namun tetap mencakup berbagai jenis layanan kesehatan. Distrik Muara Tami, meski memiliki jumlah fasilitas paling sedikit, adalah satu-satunya distrik selain Distrik Abepura yang memiliki Puskesmas Rawat Inap, menunjukkan upaya untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif di wilayah yang lebih terpencil. Posyandu mendominasi jenis fasilitas kesehatan di seluruh distrik, dengan total 212 unit, menekankan pentingnya

layanan kesehatan berbasis masyarakat, terutama untuk ibu dan anak. Keberadaan 14 Puskesmas yang tersebar merata di semua distrik menunjukkan upaya untuk menjamin akses dasar ke *Layanan Kesehatan Primer*.

Distribusi rumah sakit umum yang tidak merata, dengan konsentrasi di Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura, mengindikasikan adanya pusat-pusat pelayanan kesehatan utama di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, keberadaan 18 klinik pratama di seluruh Kota Jayapura menambah opsi layanan kesehatan bagi masyarakat. Pola distribusi ini mencerminkan strategi penyediaan layanan kesehatan yang berupaya menyeimbangkan antara konsentrasi fasilitas kesehatan kompleks di pusat-pusat urban dengan penyebaran layanan dasar di seluruh wilayah. Namun, ketimpangan dalam distribusi fasilitas tertentu, seperti: Rumah Sakit dan Klinik Pratama, menunjukkan adanya tantangan dalam menjamin akses yang setara ke layanan kesehatan spesialis bagi penduduk di semua Distrik.

Untuk meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan, pemerintah Kota Jayapura perlu mempertimbangkan penguatan fasilitas di distrik-distrik yang kurang terlayani, terutama dalam hal layanan kesehatan sekunder dan tersier. Selain itu, optimalisasi jaringan Posyandu dan Puskesmas yang sudah ada dapat menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar dan preventif di seluruh kota. Dengan pendekatan yang strategis dan berimbang, Kota Jayapura dapat terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh penduduknya, mendukung tercapainya standar kesehatan yang lebih baik di semua distrik.

3.4.4. Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya kesehatan merupakan komponen vital dalam sistem pelayanan kesehatan suatu daerah. Mencakup tenaga medis, fasilitas kesehatan, peralatan medis, dan infrastruktur pendukung, sumber daya kesehatan berperan krusial dalam menjamin akses

dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu indikator penting dalam menilai kecukupan sumber daya kesehatan adalah jumlah dan rasio tenaga medis, khususnya dokter, terhadap populasi yang dilayani. Rasio dokter per penduduk menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kemampuan sistem kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Tabel 3.6

Jumlah Dokter dan Rasio Dokter Per Penduduk Kota Jayapura Tahun 2019 – 2023

No	Distrik	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio	Jumlah Dokter	Rasio
1.	Muara Tami	5	0,7	21	3,9	21	3,9	21	3,7	21	2,7
2.	Heram	5	0,2	7	0,4	7	0,3	7	0,4	13	0,3
3.	Abepura	9	0,2	14	0,4	14	0,3	14	0,4	13	0,5
4.	Jayapura Utara	8	0,2	9	0,3	9	0,3	9	0,3	11	0,3
5.	Jayapura Selatan	9	0,2	11	0,3	11	0,3	11	0,3	15	0,4
Jumlah		**36**		**62**		**62**		**62**		**73**	

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, 2024

Data Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Penduduk Kota Jayapura periode 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Distrik Muara Tami mengalami peningkatan dramatis dari 5 dokter pada Tahun 2019 menjadi 21 dokter sejak 2020, dengan rasio tertinggi mencapai 3,9 pada 2020-2021, meskipun menurun menjadi 2,7 pada 2023. Distrik Heram menunjukkan peningkatan jumlah dokter dari 5 menjadi 13, namun rasionya tetap rendah berkisar 0,2 hingga 0,4. Distrik Abepura mengalami fluktuasi

dengan peningkatan dari 9 menjadi 14 dokter, kemudian sedikit menurun menjadi 13 pada 2023, dengan rasio meningkat dari 0,2 menjadi 0,5. Distrik Jayapura Utara menunjukkan peningkatan moderat dari 8 menjadi 11 dokter dengan rasio stabil 0,3 sejak 2020. Distrik Jayapura Selatan mengalami peningkatan dari 9 menjadi 15 dokter, dengan rasio meningkat dari 0,2 menjadi 0,4.

Secara keseluruhan, Kota Jayapura menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah dokter, dari 36 pada 2019 menjadi 73 pada 2023, lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun. Meskipun demikian, rasio dokter per penduduk di sebagian besar distrik masih relatif rendah, berkisar antara 0,3 hingga 0,5, kecuali Muara Tami yang memiliki rasio jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah dokter yang signifikan, Kota Jayapura masih menghadapi tantangan dalam mencapai rasio dokter per penduduk yang ideal di sebagian besar distriknya. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan jumlah tenaga medis, terutama di distrik-distrik dengan rasio yang masih rendah, guna memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Jayapura.

3.5. Analisis Karakteristik Bidang Masalah Pendidikan

3.5.1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator krusial dalam mengevaluasi akses pendidikan di suatu wilayah. Dikembangkan oleh UNESCO pada dekade 1970-an, APK telah menjadi tolok ukur global untuk menilai keberhasilan sistem pendidikan dalam menjangkau populasi usia sekolah. Di Indonesia, penggunaan APK dilandasi oleh kerangka hukum yang kokoh, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. APK juga menjadi komponen integral dalam RPJMN dan pelaporan *SDG's* sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Metodologi penghitungan APK melibatkan perbandingan jumlah siswa pada jenjang tertentu dengan populasi usia sekolah yang relevan, dinyatakan dalam persentase. Tujuannya adalah mengukur daya serap sistem pendidikan dan membandingkan partisipasi pendidikan antar daerah.

Data APK Kota Jayapura periode 2020-2023 menunjukkan dinamika yang menarik di tiga jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD/MI, terjadi fluktuasi dengan tren positif, meningkat dari 100,88% (2020) menjadi 104,89% (2023). Angka di atas 100% mengindikasikan partisipasi yang sangat tinggi, termasuk siswa dari luar kelompok usia target atau daerah sekitar. Sementara untuk APK jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun 2020 hanya 97,03% dan fluktuasi dengankecenderungan menurun hingga menjadi 94,01% pada tahun 2023. Begitu juga dengan APK jenjang SMA/MA, dimana sejak tahun 2020 sampai 2022 terus mengalami penurunan, dari 112,87% di tahun 2020, menurun menjadi hanya 108,01% pada tahun 2022, namun sedikit meningkat menjadi 109,58% di tahun 2023.

Tabel 3.7.

Angka Partisipasi Kasar Kota Jayapura Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	100,88	101,66	103,12	104,89
SMP/MTs/ Sederajat	97,03	95,02	92,05	94,01
SMA/SMK/MA/Sederajat	112,87	110,90	108,01	109,58

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2025

3.5.2. Angka Partisipasi Murni

APM (Angka Partisipasi Murni) merupakan indikator kunci dalam menilai efektivitas sistem pendidikan suatu wilayah. Dikembangkan oleh UNESCO pada era 1970-an, APM memberikan gambaran lebih presisi tentang partisipasi anak dalam pendidikan sesuai usia mereka. Di Indonesia, penggunaan APM dilandasi oleh kerangka hukum yang kuat, mencakup Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

APM (Angka Partisipasi Murni) juga menjadi komponen integral dalam RPJMN dan pelaporan SDG's sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Metodologi penghitungan APM melibatkan perbandingan jumlah siswa pada usia spesifik di jenjang pendidikan tertentu dengan total populasi kelompok usia tersebut, dinyatakan dalam persentase. Tujuannya adalah mengukur ketepatan waktu partisipasi pendidikan dan efisiensi internal sistem pendidikan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8

Angka Partisipasi Murni Kota Jayapura, Tahun 2020-2023

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Sederajat	95,91	96,85	92,69	93,30
SMP/MTs/ Sederajat	78,60	78,63	74,23	66,83
SMA/SMK/MA/Sederajat	67,49	67,41	67,76	63,16

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, dan BPS Kota Jayapura, 2025

Data APM Kota Jayapura periode 2020-2023 menunjukkan dinamika yang kompleks di tiga jenjang pendidikan. Untuk SD/MI, terjadi fluktuasi dengan pencapaian tertinggi yaitu 96,85% pada 2021, diikuti penurunan signifikan ke 92,69% pada 2022, namun sedikit meningkat di tahun 2023 menjadi 93,30%. Pola ini merupakan cerminan dampak pandemi COVID-19 terhadap partisipasi pendidikan dasar sama seperti yang terjadi pada indikator lainnya. Untuk APM SMP/MTs juga demikian, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 78,60% dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi hanya 66,83% di tahun 2023. Sementara itu, APM SMA/MA juga memperlihatkan *trend* penurunan, dari 67,49% pada 2020 menjadi 63,16% di 2024.

3.5.3. Layanan Pendidikan Dasar (SD/MI)

Kota Jayapura, sebagai ibukota Provinsi Papua, memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi warganya. Pendidikan dasar, yang mencakup SD (Sekolah Dasar) dan MI (Madrasah Ibtidaiyah), merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk gedung sekolah yang tersebar di berbagai distrik.

Tabel 3.9

Jumlah Gedung Sekolah Dasar di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2020- 2024

No.	Distrik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	MuaraTami	10	10	10	10	11
2.	Abepura	25	27	27	27	28
3.	Heram	12	12	12	12	12
4.	Jayapura Selatan	23	23	23	23	23
5.	Jayapura Utara	24	24	24	24	24
Kota Jayapura		**94**	**96**	**96**	**96**	**98**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024 dan Kota Jayapura Dalam Angka, 2025

Data di atas memuat jumlah gedung sekolah dasar di Kota Jayapura dari Tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah dasar di Kota Jayapura dari 94 unit pada tahun 2020 menjadi 98 unit pada Tahun 2024. Peningkatan sidikit terjadi antara tahun 2020-2021 dan 2023-2024, dengan penambahan 8 unit gedung sekolah. Distribusi gedung sekolah per distrik menunjukkan bahwa Abepura memiliki jumlah terbanyak dengan 28 unit pada tahun 2024, diikuti oleh Jayapura Selatan dan Jayapura Utara yang memiliki jumlah relatif setara, masing-masing 23 dan 24 unit. Heram memiliki 12 unit, sementara Distrik Muara Tami memiliki jumlah paling sedikit dengan 11 unit.

Sejak tahun 2021 hingga 2023, jumlah total gedung sekolah dasar di Kota Jayapura tetap stabil pada angka 96 unit, menunjukkan fokus pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas gedung yang ada. Perkembangan pada ke lima Distrik menunjukkan bahwa Distrik Muara Tami bertambah dengan 11 unit gedung sekolah sepanjang periode 2020-2024, Distrik Abepura mengalami sedikit peningkatan, Distrik Heram mengalami sedikit penurunan, sementara Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara menunjukkan stabilitas. Data ini menggambarkan upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam menyediakan akses pendidikan dasar yang merata di seluruh distrik. Konsentrasi gedung sekolah yang lebih tinggi di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara mencerminkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi di area-area tersebut. Stabilitas jumlah gedung sekolah sejak 2021 menunjukkan bahwa fokus telah beralih dari pembangunan gedung baru ke peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas yang ada. Namun, perlu diperhatikan apakah jumlah ini sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar di setiap distrik, terutama di area dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Sementara itu, jumlah murid sekolah dasar di Kota Jayapura berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024 (tabel di bawah) menunjukkan dinamika yang menarik di berbagai distrik. Secara keseluruhan, terjadi fluktuasi dalam jumlah total murid di Kota Jayapura, dengan kecenderungan sedikit menurun dari 30.783 murid pada tahun 2020 menjadi 30.580 murid pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan demografi, migrasi penduduk, atau dampak dari pandemi COVID-19.

Tabel 3.10

Jumlah Murid Sekolah Dasar di Kota Jayapura berdasarkan Distrik Tahun 2020 – 2024

No.	Distrik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Muara Tami	1.992	2.020	2.129	2.405	2.775

2.	Abepura	9.675	9.856	9.932	9.950	10.015
3.	Heram	3.835	3.690	3.657	3.576	3.581
4.	Jayapura Selatan	6.747	6.637	6.720	6.671	6.675
5.	Jayapura Utara	8.534	8.133	7.825	7.737	7.534
Kota Jayapura		**30.783**	**30.336**	**30.263**	**30.339**	**30.580**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Analisis per Distrik menunjukkan trend yang beragam dimana pada Distrik Muara Tami mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten, dari 1.992 murid pada tahun 2020 menjadi 2.775 murid pada tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan populasi atau peningkatan akses pendidikan di daerah tersebut. Abepura, sebagai distrik dengan jumlah murid terbanyak, menunjukkan fluktuasi kecil namun cenderung stabil, dengan sedikit peningkatan dari 9.675 murid pada 2020 menjadi 10.015 murid pada 2024. Hal ini mencerminkan kapasitas sekolah yang sudah mendekati maksimal di distrik ini.

Distrik Heram mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 3.835 murid pada 2020 menjadi 3.581 murid pada 2024. Distrik Jayapura Selatan menunjukkan fluktuasi kecil dengan kecenderungan sedikit menurun, dari 6.747 murid pada 2020 menjadi 6.675 murid pada 2024. Distrik Jayapura Utara mengalami penurunan yang paling signifikan, dari 8.534 murid pada 2020 menjadi 7.534 murid pada 2024, yang disebabkan oleh perubahan demografi atau faktor sosial ekonomi lainnya. Pola ini menggambarkan dinamika populasi dan distribusi murid yang berbeda-beda di setiap Distrik Kota Jayapura. Peningkatan jumlah murid di Muara Tami kontras dengan penurunan di Distrik lain, terutama Distrik Jayapura Utara dan Distrik

Heram. Hal ini mengindikasikan pergeseran populasi atau perubahan pola pemukiman di Kota Jayapura. Stabilitas relatif di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan menunjukkan bahwa distrik-distrik ini telah mencapai tingkat kejenuhan dalam kapasitas sekolah atau populasi usia sekolah.

Penting bagi pemerintah Kota Jayapura untuk

memperhatikan trend ini dalam perencanaan pendidikan ke depan. Peningkatan kapasitas diperlukan di Distrik Muara Tami, sementara di distrik lain perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Tabel 3.11

Jumlah Guru Sekolah Dasar di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2020 – 2024

No.	Distrik	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	MuaraTami	112	119	126	144	166
2.	Abepura	507	530	546	548	576
3.	Heram	224	217	218	212	217
4.	Jayapura Selatan	346	346	361	363	372
5.	Jayapura Utara	406	394	393	388	386
Kota Jayapura		**1.595**	**1.606**	**1.644**	**1.655**	**1.717**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Data jumlah guru di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan *trend* peningkatan yang konsisten di sebagian besar Distrik. Secara keseluruhan, jumlah guru di Kota Jayapura mengalami kenaikan yang signifikan, dari 1.595 guru pada tahun 2020 menjadi 1.717 guru pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pengajar.

Evaluasi per Distrik menunjukkan variasi dalam perkembangan jumlah guru di Kota Jayapura. Distrik Muara Tami mencatat pertumbuhan yang konsisten dan substansial, dengan jumlah guru meningkat dari 112 pada 2020 menjadi 166 pada 2024, mengikuti peningkatan jumlah siswa. Distrik Abepura, yang memiliki jumlah guru terbesar, juga menunjukkan peningkatan stabil dari 507 menjadi 576 guru dalam periode yang sama, menggambarkan upaya mempertahankan rasio guru-siswa yang ideal di area padat penduduk. Distrik Heram, terjadi fluktuasi dengan tren sedikit menurun, dari 224 guru pada 2020 menjadi 217 pada 2024, dengan puncak 224 guru di Tahun 2020. Jayapura Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dan konsisten dari 346 menjadi 372 guru, mencerminkan upaya peningkatan kapasitas

pendidikan. Sementara itu, Jayapura Utara mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, dimulai dari 406 guru pada 2020, dan ke 386 pada Tahun 2024.

Pola ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pengajar mayoritas pada Distrik. Pertumbuhan konsisten di Distrik Muara Tami dan Distrik Abepura menunjukkan respon terhadap peningkatan jumlah siswa dan upaya menjaga rasio guru-siswa yang optimal. Kondisi relatif stabil di Jayapura Utara dan fluktuasi di Heram menggambarkan penyesuaian terhadap perubahan demografi siswa dan optimalisasi sumber daya pendidikan.

Pemerintah Kota Jayapura perlu terus melakukan pemantauan dan penyesuaian jumlah guru sesuai kebutuhan tiap distrik. Peningkatan kuantitas guru harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pengajaran dan distribusi guru berkualitas yang merata. Perhatian terhadap rasio guru-siswa di setiap distrik juga penting untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran. Dengan *trend* positif ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kota Jayapura akan terus meningkat, menyediakan dasar yang kokoh bagi generasi mendatang.

3.5.4. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Data jumlah gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan stabilitas yang tinggi dengan sedikit peningkatan di awal periode. Secara keseluruhan, jumlah gedung SMP di Kota Jayapura mengalami kenaikan kecil dari 37 unit pada tahun 2019 menjadi 38 unit pada tahun 2020, dan kemudian tetap stabil pada angka tersebut hingga tahun 2023.

Tabel 3.12

Jumlah Gedung Sekolah Menengah Pertama di Kota Jayapura Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	2	3	3	3	3
2.	Abepura	7	7	7	7	7
3.	Heram	9	9	9	9	9
4.	Jayapura Selatan	9	9	9	9	9
5.	Jayapura Utara	10	10	10	10	10
Kota Jayapura		**37**	**38**	**38**	**38**	**38**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Analisis pada kelima Distrik menunjukkan bahwa pola yang beragam namun cenderung stabil. Distrik Muara Tami adalah satu-satunya Distrik yang mengalami peningkatan, dari 2 (dua) gedung SMP pada tahun 2019 menjadi 3 (tiga) gedung pada Tahun 2020, dan jumlah ini tetap konstan hingga 2023. Peningkatan ini merupakan respon terhadap pertumbuhan populusi atau upaya meningkatkan akses pendidikan di daerah tersebut.

Distrik-distrik lain di Kota Jayapura menunjukkan konsistensi dalam jumlah gedung SMP selama lima tahun terakhir. Distrik Abepura tetap dengan 7 gedung, Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan masing-masing mempertahankan 9 gedung, sedangkan Distrik Jayapura Utara memimpin dengan 10 gedung SMP. Kestabilan ini mengindikasikan bahwa infrastruktur pendidikan menengah pertama di sebagian besar wilayah Kota Jayapura telah mencapai level yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini.

Pola ini merefleksikan beberapa aspek krusial dalam penyediaan sarana pendidikan di Kota Jayapura. Pertama, konsistensi jumlah gedung SMP mengindikasikan pergeseran fokus pemerintah dari pembangunan gedung baru ke peningkatan mutu pendidikan dan pembenahan fasilitas yang sudah ada. Kedua, penyebaran gedung SMP yang cenderung merata antar distrik (kecuali Muara Tami) menggambarkan usaha pemerintah dalam

menyediakan akses pendidikan yang setara di seluruh area Kota Jayapura. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa kestabilan ini juga memunculkan permasalahan mengenai kecukupan jumlah gedung SMP dalam mengantisipasi potensi pertambahan populasi usia sekolah, terutama di distrik-distrik yang mengalami pertumbuhan penduduk signifikan, seperti Distrik Muara Tami yang telah menambah satu gedung SMP.

Untuk masa mendatang, pemerintah Kota Jayapura perlu terus mengawasi keseimbangan antara jumlah gedung SMP dengan populasi usia sekolah di tiap distrik. Walaupun jumlah gedung tetap, peningkatan kapasitas atau kualitas fasilitas yang ada diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Selain itu, aspek pemerataan kualitas pendidikan antar distrik juga harus dipertimbangkan, tidak hanya dari segi jumlah gedung, tetapi juga meliputi fasilitas, tenaga pengajar, dan sumber daya pendidikan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Kota Jayapura dapat terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah pertama bagi seluruh warganya.

Tabel 3.13

Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muara Tami	705	625	665	746	806
2.	Abepura	3.630	3.120	3.229	3.318	3.523
3.	Heram	2.688	2.467	2.622	2.579	2.627
4.	Jayapura Selatan	3.904	3.376	3.857	3.412	3.501
5.	Jayapura Utara	3.414	3.359	3.452	3.471	3.477
Kota Jayapura		**14.341**	**12.947**	**13.825**	**13.526**	**13.934**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Perkembangan jumlah pelajar tingkat menengah pertama di Kota Jayapura selama periode 2019 hingga 2023 menampilkan dinamika yang menarik di berbagai wilayah Kota Jayapura. Secara keseluruhan, terjadi fluktuasi dalam total siswa SMP di Kota

Jayapura, dengan kecenderungan menurun dari 14.341 siswa pada tahun 2019 menjadi 13.934 siswa pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Analisis per Distrik menunjukkan variasi yang beragam. Distrik Muara Tami, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga mencapai 806 siswa pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan populasi atau peningkatan akses pendidikan di wilayah tersebut. Abepura, sebagai distrik dengan jumlah siswa terbanyak kedua, mengalami penurunan pada tahun 2020 namun kemudian menunjukkan pemulihan bertahap, mencapai 3.523 siswa pada tahun 2023.

Heram menampilkan fluktuasi dengan kecenderungan relatif stabil, berakhir dengan 2.627 siswa pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, distrik ini berhasil mempertahankan jumlah siswanya di kisaran 2.600 dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam populasi siswa SMP di wilayah tersebut. Jayapura Selatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2022, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2023 dengan 3.501 siswa. Distrik ini mencatatkan jumlah siswa tertinggi pada tahun 2019 dengan 3.904 siswa, namun mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun berikutnya. Pemulihan yang terjadi pada tahun 2023 mengindikasikan upaya-upaya perbaikan dalam sistem pendidikan di wilayah ini.

Sementara itu, Jayapura Utara menunjukkan pola yang lebih stabil dengan sedikit peningkatan, mencapai 3.477 siswa pada tahun 2023. Distrik ini berhasil mempertahankan jumlah siswanya di atas 3.400 selama empat tahun terakhir, menunjukkan konsistensi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah pertama. Pola ini menggambarkan dinamika populasi siswa SMP yang bervariasi di setiap distrik Kota Jayapura. Peningkatan jumlah siswa di Distrik Muara Tami kontras dengan fluktuasi di distrik lain, terutama Jayapura Selatan. Hal ini mengindikasikan pergeseran

demografi, perubahan preferensi pendidikan, atau dampak dari faktor eksternal seperti pandemi COVID- 19.

Penting bagi otoritas pendidikan Kota Jayapura untuk mencermati *trend* ini dalam perencanaan pendidikan ke depan. Penyesuaian kapasitas sekolah dan alokasi sumber daya diperlukan di beberapa distrik, sementara di distrik lain perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan retensi siswa. Khususnya, perhatian lebih perlu diberikan pada Distrik Jayapura Selatan untuk memahami penyebab fluktuasi yang signifikan dan mengembangkan strategi untuk menstabilkan jumlah siswa.

Selain itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah siswa di setiap distrik, serta untuk memastikan pemerataan akses pendidikan menengah pertama yang berkualitas di seluruh Kota Jayapura. Dengan memahami dinamika ini, pemerintah Kota Jayapura dapat mengembangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah pertama di seluruh wilayah Kota Jayapura.

Tabel 3.14

Perkembangan Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	36	38	60	63	68
2.	Abepura	184	205	194	192	187
3.	Heram	157	163	158	152	161
4.	Jayapura Selatan	213	212	215	220	215
5.	Jayapura Utara	214	216	214	224	224
Kota Jayapura		**804**	**834**	**841**	**851**	**855**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Evaluasi terhadap perkembangan jumlah tenaga pendidik di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023 mengungkapkan beberapa pola yang menarik di berbagai Distrik. Secara keseluruhan, terdapat

peningkatan yang stabil dalam jumlah guru SMP di kota ini, dengan pertambahan dari 804 orang pada 2019 menjadi 855 orang pada 2023. Analisis per distrik menunjukkan variasi yang signifikan. Distrik Muara Tami mencatatkan pertumbuhan yang paling mencolok, dengan peningkatan hampir dua kali lipat dari 36 guru pada 2019 menjadi 68 guru pada 2023. Lonjakan terbesar terjadi antara 2020 dan 2021, yang mencerminkan inisiatif khusus untuk memperkuat tenaga pengajar di wilayah tersebut.

Distrik Abepura, meskipun sempat mengalami kenaikan pada 2020, menunjukkan *trend* penurunan dalam tiga tahun terakhir, berakhir dengan 187 guru pada 2023. Fenomena ini mengindikasikan adanya penyesuaian atau redistribusi tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Distrik Heram, jumlah guru cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, mencapai 161 orang pada 2023. Kestabilan ini menggambarkan konsistensi dalam penyediaan tenaga pendidik di distrik tersebut. Jayapura Selatan memperlihatkan fluktuasi ringan namun relatif stabil, dengan jumlah guru berkisar antara 212 hingga 220 orang selama periode lima tahun. Sementara itu, Jayapura Utara menunjukkan tren peningkatan yang moderat dan konsisten, mencapai 224 guru pada 2023, sama dengan jumlah pada tahun sebelumnya.

Pola-pola ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan Kota Jayapura. Peningkatan drastis di Muara Tami kontras dengan fluktuasi di distrik lain, terutama penurunan di Abepura. Hal ini menandakan adanya upaya pemerataan distribusi guru atau respons terhadap perubahan demografi siswa di masing-masing wilayah. Penting bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan Kota Jayapura untuk mengkaji lebih dalam tren-tren ini dalam perencanaan tenaga pengajar ke depan. Evaluasi terhadap rasio guru-murid, efektivitas pengajaran, dan kebutuhan spesifik setiap distrik perlu dilakukan untuk memastikan alokasi sumber daya manusia yang optimal.

3.5.5. Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Perkembangan infrastruktur pendidikan tingkat menengah atas di Kota Jayapura selama kurun waktu 2019 hingga 2023 menyajikan gambaran yang menarik tentang dinamika penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah ini. Sebagai kota yang terus berkembang dan memiliki peran strategis di Provinsi Papua, Jayapura menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dengan ketersediaan sarana fisik yang memadai.

Tabel 3.15.

Jumlah Gedung Sekolah Menengah Atas di Kota Jayapura Berdasarkan Distrik Tahun 2019 – 2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	1	1	1	1	1
2.	Abepura	3	3	3	4	4
3.	Heram	7	7	8	8	8
4.	Jayapura Selatan	8	8	8	8	7
5.	Jayapura Utara	6	6	6	8	6
Kota Jayapura		**25**	**25**	**25**	**27**	**26**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2024

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Jayapura memiliki total 25 gedung SMA (Sekolah Menengah Atas) pada tahun 2019, jumlah yang bertahan hingga 2021. Terjadi peningkatan menjadi 27 gedung pada tahun 2022, namun kemudian sedikit menurun menjadi 26 gedung pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan adanya upaya penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan yang dinamis di Kota Jayapura.

Distribusi gedung SMA di berbagai Distrik Kota Jayapura menunjukkan pola yang beragam, mencerminkan karakteristik dan kebutuhan unik masing-masing wilayah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan kebijakan pengembangan wilayah. Analisis perkembangan jumlah

fasilitas pendidikan tingkat menengah atas di Kota Jayapura selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang menarik di berbagai wilayah kota. Secara keseluruhan, terjadi sedikit fluktuasi dalam total gedung SMA di Kota Jayapura, dengan kecenderungan stabil yang diikuti oleh peningkatan kecil pada tahun 2022 dan sedikit penurunan pada 2023.

Tinjauan pada ke lima Distrik memperlihatkan pola yang beragam. Distrik Muara Tami menunjukkan konsistensi dengan mempertahankan satu gedung SMA sepanjang periode lima tahun, mencerminkan stabilitas dalam penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini menandakan bahwa kapasitas yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan populasi siswa di Distrik Muara Tami, atau ada keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur baru. Abepura mengalami peningkatan moderat, dari tiga gedung pada Tahun 2019-2021 menjadi empat gedung pada dua tahun terakhir, menandakan adanya upaya perluasan kapasitas pendidikan di distrik ini. Peningkatan ini merupakan respons terhadap pertumbuhan populasi atau peningkatan permintaan untuk pendidikan menengah atas di wilayah yang menjadi pusat pendidikan di Kota Jayapura.

Distrik Heram mencatatkan pertumbuhan yang positif, dengan penambahan satu gedung pada tahun 2021, meningkatkan total menjadi delapan gedung yang kemudian dipertahankan hingga 2023. Peningkatan ini merupakan respons terhadap kebutuhan pendidikan yang meningkat di wilayah tersebut, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalaminfrastruktur pendidikan di distrik ini. Jayapura Selatan menunjukkan stabilitas dengan delapan gedung dari 2019 hingga 2022, namun mengalami penurunan menjadi tujuh gedung pada tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika populasi siswa atau reorganisasi fasilitas pendidikan di Distrik tersebut. Penurunan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami apakah hal ini disebabkan oleh konsolidasi sumber daya atau faktor lainnya.

Sementara itu, Jayapura Utara memperlihatkan fluktuasi yang

menarik. Jumlah gedung tetap stabil pada angka enam dari 2019 hingga 2021, kemudian meningkat menjadi delapan pada tahun 2022, sebelum kembali ke enam pada tahun 2023. Pola ini menggambarkan upaya penyesuaian temporer terhadap kebutuhan pendidikan yang berubah- ubah, atau mencerminkan tantangan dalam mempertahankan infrastruktur yang baru dibangun. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan infrastruktur pendidikan di Kota Jayapura. Peningkatan di beberapa Distrik seperti: Distrik Abepura dan Distrik Heram kontras dengan stabilitas di Distrik Muara Tami dan fluktuasi di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam pertumbuhan populasi, perubahan kebijakan pendidikan, atau respons terhadap kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

Tabel 3.16

Jumlah Murid SMA Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Muara Tami	246	235	256	283	292
2.	Abepura	2.503	2.515	2.431	2.333	2.465
3.	Heram	2.112	2.076	1.956	1.889	1.934
4.	Jayapura Selatan	2.328	2.138	2.086	2.094	2.119
5.	Jayapura Utara	2.787	2.832	2.622	2.500	2.614
Kota Jayapura		**9.976**	**9.796**	**9.351**	**9.099**	**9.424**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Analisis perkembangan jumlah siswa SMA di Kota Jayapura periode 2019-2023 menunjukkan dinamika yang beragam di setiap distrik. Secara keseluruhan, terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 9.976 siswa pada 2019 menjadi 9.424 siswa pada 2023, meskipun ada sedikit peningkatan di tahun terakhir. Muara Tami mencatat pertumbuhan konsisten, meningkat dari 246 siswa (Tahun 2019) menjadi 292 siswa (Tahun 2023), menandakan potensi perkembangan pendidikan di wilayah ini. Abepura, dengan populasi siswa terbesar, mengalami fluktuasi moderat, berakhir di

angka 2.465 siswa pada Tahun 2023, sedikit di bawah jumlah awal Tahun 2019.

Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan menunjukkan tren penurunan, dengan Distrik Heram turun dari 2.112 siswa (Tahun 2019) menjadi 1.934 siswa (Tahun 2023), dan Distrik Jayapura Selatan dari 2.328 siswa menjadi 2.119 siswa. Distrik Jayapura Utara, meski mengalami penurunan, tetap mempertahankan posisi sebagai distrik dengan jumlah siswa terbanyak kedua, mencapai 2.614 siswa pada 2023. Pola ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi siswa, seperti perubahan demografi, preferensi pendidikan, dan dampak kebijakan pendidikan.

Tabel 3.17

Perkembangan Jumlah Guru SMA Menurut Distrik Tahun 2019-2023

No	Distrik	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	MuaraTami	19	21	21	23	24
2.	Abepura	142	150	146	152	154
3.	Heram	148	162	156	160	169
4.	Jayapura Selatan	174	177	147	169	153
5.	Jayapura Utara	148	160	154	156	154
Kota Jayapura		**631**	**670**	**624**	**660**	**654**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Data jumlah guru SMA di Kota Jayapura dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Secara keseluruhan, jumlah guru SMA di Kota Jayapura mengalami kenaikan dari 631 guru pada tahun 2019 menjadi 654 guru pada Tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pengajar jenjang SMA.

Distrik Muara Tami menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan peningkatan 26,32 persen dari 19 guru pada tahun 2019 menjadi 24 guru pada tahun 2023. Distrik Heram menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan meningkat,

dimana peningkatannya mencapai 14,19 persen dari 148 guru di tahun 2019 menjadi 169 guru di tahun 2023, walupun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 dengan jumlah 156 guru. Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara juga menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Distrik Abepura mengalami peningkatan 8,45 persen dari 142 guru menjadi 154 guru, dan Distrik Jayapura Utara dengan peningkatan 4,05 persen dari 148 guru menjadi 154 guru. Sedangkan Distrik Jayapura Selatan menunjukkan *trend* fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dimana jumlah guru mengalami penurunan sebesar 12,07 persen dari 174 guru pada 2019 menjadi 153 guru pada 2023.

3.6. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

3.6.1. Rasio Akaseblitas dan Mobilitas

Rasio aksesibilitas dan mobilitas merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem transportasi suatu kota. Aksesibilitas mengacu pada kemudahan masyarakat dalam mencapai tujuan atau layanan tertentu, sementara mobilitas berkaitan dengan kemampuan untuk bergerak secara efisien dalam sistem transportasi. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat memberikan gambaran kasar tentang tingkat aksesibilitas dan mobilitas di suatu wilayah. Rasio yang lebih rendah umumnya menunjukkan potensi kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi aksesibilitas dan mobilitas, sementara rasio yang lebih tinggi dapat mengindikasikan sistem transportasi yang lebih lancar.

Tabel 3.18

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Jayapura Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023

1.	Panjang Jalan a.Jalan Nasional b. Jalan Provinsi c.Jalan Kota	508.494	508.494	508.494	42.668 5.380 550.912	42.668 5.380 550.912
	Total	508.494	508.494	508.494	598.960	598.960
2.	Jumlah Kendaraan	211.662	212.312	221.665	234.552	258.007
3.	**Rasio**	**1 : 41,62**	**1 : 41,75**	**1 : 43,59**	**1 : 39,16**	**1 : 43,07**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura, 2024

Data yang disajikan pada Tabel di atas, menggambarkan perkembangan infrastruktur jalan dan jumlah kendaraan di Kota Jayapura dari tahun 2019 hingga 2023. Informasi ini mencakup panjang jalan berdasarkan klasifikasinya (Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota), total panjang jalan, jumlah kendaraan, serta rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan. Analisis data menunjukkan beberapa tren penting. Panjang jalan total di Kota Jayapura tetap konstan pada 508.494 meter dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, terjadi peningkatan signifikan sebesar 17,8% pada tahun 2022, mencapai 598.960 meter, yang kemudian tetap stabil hingga 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan data Jalan Nasional sepanjang 42.668 meter dan Jalan Provinsi sepanjang 5.380 meter, serta pertambahan Jalan Kota menjadi 550.912 meter.

Sementara itu, jumlah kendaraan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dari 211.662 kendaraan pada tahun 2019, jumlah ini meningkat menjadi 258.007 pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 21,9% selama periode lima tahun. Peningkatan tahunan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan 10% dari 234.552 menjadi 258.007 kendaraan. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan menunjukkan fluktuasi menarik. Rasio ini meningkat dari 1:41,62 pada tahun 2019 menjadi 1:43,59 pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan kepadatan lalu lintas. Namun, dengan penambahan panjang jalan pada tahun 2022, rasio membaik menjadi 1:39,16, menandakan penurunan kepadatan. Pada tahun 2023, rasio kembali

meningkat menjadi 1:43,07 akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan penambahan panjang jalan.

Dalam konteks daya saing, perkembangan ini memiliki beberapa implikasi penting. Peningkatan panjang jalan, terutama dengan penambahan Jalan Nasional dan Provinsi, dapat meningkatkan konektivitas Kota Jayapura dengan wilayah sekitarnya, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kota. Infrastruktur jalan yang lebih baik dapat menarik investasi, meningkatkan efisiensi logistik, dan mendukung perkembangan sektor- sektor ekonomi lainnya.

Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan penambahan panjang jalan menimbulkan tantangan tersendiri. Peningkatan kepadatan lalu lintas, seperti yang tercermin dalam rasio yang cenderung meningkat, dapat mengurangi efisiensi transportasi dan berpotensi menurunkan kualitas hidup penduduk. Hal ini bisa berdampak negatif pada daya saing jika tidak dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan yang tepat, perkembangan infrastruktur jalan dan manajemen pertumbuhan jumlah kendaraan dapat menjadi faktor pendorong daya saing Kota Jayapura, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

3.6.2. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan komponen vital dalam pembangunan perkotaan, berperan penting dalam mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Analisis terhadap perkembangan status dan kondisi jalan di Kota Jayapura periode 2019-2023 memberikan wawasan mendalam tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memelihara infrastruktur Kota Jayapura.

Data menunjukkan perubahan signifikan dalam pengelolaan jalan Kota Jayapura. Tahun 2022 menjadi titik balik dengan penambahan kategori jalan Nasional dan Provinsi, serta peningkatan total panjang jalan dari 508.494 meter menjadi 598.960 Meter. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan jaringan jalan dan mengakui peran strategis Jayapura dalam konteks regional. Kondisi jalan mengalami perbaikan substansial. Jalan berkondisi baik meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 111.875 meter menjadi 268.869 meter pada 2023. Secara bersamaan, terjadi penurunan drastis pada jalan rusak sedang dan ringan. Meskipun demikian, sedikit peningkatan jalan rusak berat menunjukkan adanya tantangan yang masih perlu diatasi.

Tabel 3.19

Perkembangan Status dan Kondisi Permukaan Jalan di Kota Jayapura Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Status Jalan**					
	Jalan Nasional	-	-	-	42.668	42.668
	Jalan Provinsi	-	-	-	5.380	5.380
	Jalan Kota	508.494	508.494	508.494	550.912	550.912
	Total	**508.494**	**508.494**	**508.494**	**598.960**	**598.960**
2	**Kondisi Jalan**					
	Baik	111.875	111.875	111.875	262.713	268.869
	Rusak Sedang	87.350	87.350	87.350	0.600	0.738
	Rusak Ringan	274.012	274.012	274.012	248.587	242.293
	Rusak Berat	35.257	35.257	35.257	39.012	39.012
	Total	**508.494**	**508.494**	**508.494**	**550.912**	**550.912**
3	**Permukaan Jalan**					
	Aspal	378.333	378.333	378.333	278.204	273.281
	Kerikil	70.637	70.637	70.637	130.168	135.035
	Rigid	59.524	59.524	59.524	134.353	134.470
	Tanah dan	-	-	-	8.188	8.125

	Lainnya					
	Total	**508.494**	**508.494**	**508.494**	**550.912**	**550.912**

Sumber: Hasil Analisis Data Bappeda Kota Jayapura dan Dinas PUPR Kota Jayapura, Diolah Tahun 2024

Komposisi permukaan jalan juga mengalami pergeseran menarik. Terjadi penurunan jalan beraspal, namun diimbangi dengan peningkatan signifikan jalan berkerikil dan rigid (beton). Munculnya kategori jalan tanah menambah variasi dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Perubahan ini mencerminkan strategi adaptasi terhadap kondisi geografis dan iklim Kota Jayapura. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika pembangunan infrastruktur jalan di Kota Jayapura. Terlihat adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menangani jalan rusak berat dan mengoptimalkan jenis permukaan jalan sesuai kebutuhan lokal.

Perkembangan ini memberikan indikasi positif bagi masa depan Kota Jayapura. Peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya mendukung mobilitas penduduk tetapi juga berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Kota Jayapura. Ke depan, fokus pada pemeliharaan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi infrastruktur akan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas jangka panjang dari investasi yang telah dilakukan.

3.6.3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, luasan kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Jayapura yang belum tertangani seluas 18,69 ha. Hasil ini belum memenuhi target RPD pada tahun 2024 yaitu seluas 17 ha. Capaian realisasi luasan kawasan pemukiman kumuh yang ditangani baru mencapai

90,95% dari target.

Tahun 2024 adalah tahun kedua Renstra 2023 - 2026 maka untuk Capaian Sasaran ke 7 tahun 2024 sebesar = 1.711 Unit bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas sebesar 3.798 maka capaian kinerjanya baru mencapai 45,05%. Adapun untuk Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022- 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19

Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024
1	Luasan Kawasan Kumuh tertangani (ha)	N/A	N/A	18,69
2	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Terbangun	N/A	946	1.711

Sumber: LPPD Kota Jayapura Tahun 2023-2024

3.6.4. Daya Dukung Pemukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman dapat diartikan sebagai kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu bertempat tinggal secara layak (Muta'ali, 2015). Dalam menentukan luas layak permukiman, erat hubunganya dengan kebijakan penyediaan perumahan. Terdapat beberapa lokasi yang tidak dapat dibangun, terdiri dari kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan rawan bencana longsor. Kawasan lindung yaitu berupa daerah perlindungan setempat, cagar budaya, sempadan sungai dan lain-lain. Kemudian untuk kawasan rawan bencana alam meliputi rawan bencana banjir. Pada tabel di bawah disajikan luas layak permukiman yang terdapat pada tiap kecamatan di Kota Jayapura.

Tabel 3.20

Luas Layak Pemukiman dan Daya Dukung Pemukiman Tiap Distrik di Kota Jayapura

No	Distrik	Luas Wilaya h (km2)	Luas Wilaya h (m2) (1ha = 10000 m2)	Luas Layak Pemukim an (ha)	Luas Layak Pemukim an (M2)	Koef /Luas Kebutu han (M2/ Kapita)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kapit a Yang Layak (Kapit	Daya Dukung Pemukiman (Kapita/ Jiwa)	Keterangan
1	Abepura	156	156.000.000,00	145,26	1.452.631,12	26	123.392	55,870	0,45	Tidak Memenuhi
2	Heram	63	63.000.000,00	705,09	7.050.895,80	26	66.221	271.188	4,10	Memenuhi
3	Jayapura Selatan	43	43.000.000,00	297,94	2.979.441,10	26	101.726	114.594	1,13	Memenuhi
4	Jayapura Utara	51	51.000.000,00	365,62	3.656.163,18	26	93.996	140.622	1,50	Memenuhi
5	Muara Tami	627	627.000.000,00	793,34	7.933.404,48	26	18.960	305.131	16,09	Memenuhi

Sumber: KLHS RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Dari hasil GIS di atas didapatkan hasil untuk luas layak permukiman tertingi pada Distrik Muara Tami dengan nilai sebesar 793,34 hektar. Sedangkan distrik yang memiliki luas layak permukiman terendah terdapat pada distrik Abepura dengan nilai sebesar 145,26 hektar.

Dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kota Jayapura harus memiliki strategi pengembangan kawasan perumahan baru

pada areal tanah yang masih kosong baik yang dimiliki oleh pemerintah, swasta maupun lahan miliki masyarakat. Kebijakan konsep pengembangan rumah baru yaitu alokasi ruang untuk perumahan swadaya, perumahan formal, dan perumahan vertikal.

Setelah luas layak permukiman tiap distrik yang ada di Kota Jayapura diketahui, maka dapat dihitung daya dukung permukiman pada tiap distrik. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung permukiman yang disajikan dalam Tabel di atas bahwa hampir seluruh distrik yang terdapat pada Kota Jayapura mampu mendukung penduduk untuk bermukim kecuali untuk Distrik Abepura tidak mendukung untuk penduduk bermukim. Artinya dalam hal ini nilai daya dukung permukiman yang didapatkan lebih dari 1.

Nilai daya dukung permukiman tertinggi terdapat pada distrik Muara Tami sebesar 16,09 kapita/jiwa, sedangkan nilai daya dukung permukiman terendah terdapat pada Distrik Abepura sebesar 0,45 kapita/jiwa.

3.7. Kemiskinan Ekstrem Kota Jayapura

Untuk memahami kemiskinan ekstrem di Bagian 3.7 nanti, kita harus terlebih dahulu membedah anatomi kemiskinan secara makro. Dinamika angka kemiskinan di Kota Jayapura selama lima tahun terakhir (2020-2024) mencerminkan interaksi kompleks antara pemulihan pasca-pandemi, tekanan inflasi, dan kebijakan fiskal daerah.

3.7.1. Tren Tingkat Kemiskinan

Analisis time series terhadap jumlah dan persentase penduduk miskin memperlihatkan pola fluktuasi yang mengindikasikan kerentanan ekonomi masyarakat terhadap guncangan eksternal.mBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), profil kemiskinan makro Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21

Tren Tingkat Kemiskinan

Tahun	Garis emiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (P0)
2020	1.021.759	34,79	11,16%
2021	1.051.297	33,80	11,39%
2022	1.099.019 (Est.)	34,36	11,12%
2023	1.147.265	32,79	10,50%
2024	1.179.015	33,84	10,72%

Tekanan Inflasi pada Garis Kemiskinan: Fenomena paling kritis yang teridentifikasi adalah kenaikan tajam dan konsisten pada Garis Kemiskinan (GK). Dari Rp 1.021.759 pada tahun 2020 menjadi **Rp 1.179.015 pada tahun 2024**. Kenaikan sebesar kurang lebih 15,3% dalam lima tahun ini mencerminkan tingginya biaya hidup dasar (makanan dan non-makanan) di Kota Jayapura. Bagi penduduk yang berada di ambang batas kemiskinan (*near poor*), kenaikan GK ini bertindak sebagai mekanisme penarik (*pull factor*) yang kuat ke dalam jurang kemiskinan. Seseorang dengan pendapatan tetap sebesar Rp 1.100.000, yang pada tahun 2020 dikategorikan "tidak miskin", secara statistik jatuh menjadi "miskin" pada tahun 2023 dan 2024 tanpa mengalami penurunan pendapatan nominal, semata-mata karena standar biaya hidup yang meningkat.

Rebound Kemiskinan 2024: Meskipun terjadi keberhasilan penurunan kemiskinan yang signifikan pada tahun 2023 (turun ke 10,50%), angka tersebut kembali terkoreksi naik menjadi 10,72% pada tahun 2024. Kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 1,05 ribu jiwa (dari 32,79 ribu menjadi 33,84 ribu) dalam satu tahun terakhir adalah sinyal peringatan dini. Hal ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan pendapatan masyarakat lapisan bawah tidak mampu mengimbangi laju kenaikan harga-harga kebutuhan pokok

3.7.2. Kedalaman dan keparahan Kemisikinan

Indikator P0 (*Headcount Index*) seringkali gagal menangkap realitas kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, analisis terhadap Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) menjadi instrumen vital.

Tabel 3.22

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Interpretasi Risiko Kemiskinan Ekstrem
2020	1,98	0,55	Moderat
2021	2,12	0,79	Meningkat (Dampak Pandemi)
2022	2,35 (Tren)	0,68	Pemulihan Parsial
2023	2,51 (Tren)	0,73	Kerentanan Meningkat
2024	2,35	**0,79**	**Kritis (Indikasi Kemiskinan Ekstrem)**

Sumber : Diolah dari Gambar Grafik. 3.4

Gap yang Melebar (P1): Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami tren peningkatan fluktuatif, berakhir di angka 2,35 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Artinya, biaya yang diperlukan untuk mengangkat satu orang miskin keluar dari kemiskinan (*cost of poverty elimination*) semakin mahal.

Intensitas Ketimpangan (P2): Temuan paling mengkhawatirkan adalah kembalinya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ke level **0,79** pada tahun 2024, menyamai rekor terburuk saat puncak pandemi 2021. Peningkatan P2 di saat P0 relatif stabil menunjukkan terjadinya ketimpangan yang semakin tajam *di antara* penduduk miskin. Ada kelompok miskin yang berhasil memperbaiki nasib (mendekati GK), namun ada kelompok lain—yakni kelompok **Miskin Ekstrem**—yang kondisinya semakin memburuk atau stagnan di dasar piramida. Kelompok dengan P2 tinggi inilah yang menjadi subjek utama analisis Bagian 3.7.

3.7.3. Dimensi Ketangakerjaan

Salah satu karakteristik unik dari kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura adalah keterkaitannya dengan struktur pasar tenaga kerja yang sedang berubah. Kemiskinan ekstrem di kota ini tidak selalu identik dengan pengangguran total, melainkan lebih banyak berwujud sebagai fenomena pekerja miskin (*working*

poor) yang terjebak dalam produktivitas rendah dan upah di bawah standar layak.

Data ketenagakerjaan tahun 2021-2023 menunjukkan anomali yang sangat mencolok dan patut diduga berkaitan erat dengan strategi bertahan hidup rumah tangga miskin.

Tabel 3.23

Dinamika Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Jayapura 2021-2023

Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Perempuan (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Total (Jiwa)
2021	85.608	-	50.331	-	135.939
2022	81.733	-4,5%	52.473	+4,3%	134.206
2023	119.857	+46,6%	134.206	**+155,8%**	254.063*

Lonjakan jumlah pekerja perempuan sebesar 155,8% pada tahun 2023 merupakan fenomena luar biasa. Dalam konteks ekonomi pembangunan, peningkatan partisipasi kerja perempuan yang begitu drastis dalam waktu singkat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, sering kali bukan indikator pemberdayaan murni, melainkan mekanisme koping (*coping mechanism*) atau strategi bertahan hidup keluarga miskin.

Ketika pendapatan kepala rumah tangga (laki-laki) tidak lagi mencukupi untuk mengejar kenaikan Garis Kemiskinan yang mencapai Rp 1.147.265 pada tahun 2023, anggota rumah tangga lain, khususnya perempuan (ibu rumah tangga), terpaksa masuk ke pasar kerja. Sektor yang mereka masuki kemungkinan besar adalah sektor informal dengan hambatan masuk rendah (seperti perdagangan eceran, jasa domestik, atau kuliner skala mikro) yang rentan dan berupah rendah. Fenomena ini mengkonfirmasi bahwa rumah tangga miskin ekstrem di Kota Jayapura sedang berada dalam tekanan ekonomi yang memaksa mereka memobilisasi seluruh aset tenaga kerja yang dimiliki, namun tetap belum mampu keluar dari jerat kemiskinan karena rendahnya kualitas pekerjaan yang didapat.

Meskipun TPT Kota Jayapura turun menjadi 8,29% pada tahun 2024, angka ini masih jauh di atas rata-rata nasional (4,91%) dan provinsi (6,48%). Tingginya TPT di kota yang menjadi pusat ekonomi menunjukkan adanya *structural mismatch* antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Bagi penduduk miskin ekstrem yang umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah (seperti terlihat pada analisis pendidikan di bawah), akses ke pasar kerja formal hampir tertutup rapat, memaksa mereka bertahan di sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, melanggengkan kerentanan ekonomi mereka.

3.7.4. Dimensi Pendidikan

Kemiskinan ekstrem bersifat antargenerasi. Mekanisme transmisi kemiskinan dari orang tua ke anak terjadi melalui dua saluran utama: kegagalan investasi pendidikan dan malnutrisi kronis (stunting). Data Kota Jayapura memberikan bukti empiris mengenai kedua saluran ini.

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mengungkapkan bahwa sistem pendidikan di Kota Jayapura menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan siswa dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah hingga jenjang menengah atas.

Tabel 3.24

Disparitas Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan 2020-2023

Jenjang Pendidikan	APM 2020 (%)	APM 2021 (%)	APM 2022 (%)	APM 2023 (%)	Tren
SD/MI	95,91	96,85	92,69	93,30	Fluktuatif
SMP/MTs	78,60	78,63	74,23	66,83	**Menurun Tajam**
SMA/SMK/MA	67,49	67,41	67,76	63,16	**Menurun Konsisten**

Sumber: Diolah dari Data BPS Kota Jayapura, 2025

Penurunan APM SMA menjadi hanya 63,16% pada tahun 2023 adalah indikator kritis. Lebih dari 36% anak usia sekolah menengah di Kota Jayapura tidak bersekolah tepat waktu. Dalam konteks kemiskinan ekstrem, ini adalah bukti nyata tingginya biaya peluang (*opportunity cost*) pendidikan. Bagi keluarga desil 1, membiarkan anak remaja bersekolah dianggap sebagai "kehilangan pendapatan" karena anak tersebut seharusnya bisa bekerja membantu ekonomi keluarga.

Tanpa ijazah SMA/SMK, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan memasuki pasar kerja sebagai tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*). Siklus ini menciptakan *poverty trap* yang sulit diputus tanpa intervensi afirmatif berupa beasiswa penuh plus biaya hidup atau program pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan pasar kerja.

3.7.5. Dimensi Kesehatan

Angka Kesakitan (Morbiditas): Angka morbiditas yang mencapai 7,28% pada tahun 2024, dengan prevalensi lebih tinggi pada perempuan (7,63%), menunjukkan beban kesehatan yang tinggi. Penyakit seperti diare dan ISPA, yang umum menjadi keluhan, sangat erat kaitannya dengan kualitas lingkungan hunian yang buruk (sanitasi dan air bersih) yang menjadi ciri khas permukiman keluarga miskin ekstrem

Prevalensi stunting adalah indikator biologis paling akurat untuk mengukur kemiskinan kronis jangka panjang. Anak yang stunting hari ini adalah cerminan dari kekurangan gizi kumulatif selama 1.000 hari terakhir.

Tabel 3.25

Prevelansi Stunting

Indikator Stunting	2021	2022	2023	2024

Jumlah Balita	6.316	9.614	5.841	6.087
Balita Pendek	714	1.120	845	584
Balita Sangat Pendek (*Severely Stunted*)	**190**	**382**	**286**	**176**
Prevalensi Total (%)	14,3%	15,6%	19,4%	**12,5%**

Prevalensi stunting di Kota Jayapura sempat melonjak ke 19,4% pada tahun 2023 sebelum turun menjadi 12,5% pada 2024. Meskipun terjadi penurunan persentase, keberadaan 584 balita pendek dan 176 balita sangat pendek pada tahun 2024 menunjukkan masih ada ratusan rumah tangga yang mengalami kegagalan pemenuhan gizi kronis. Stunting pada balita miskin ekstrem akan berdampak permanen pada kemampuan kognitif mereka di masa depan, mengurangi daya saing mereka secara permanen.

3.7.6. Dimensi Infrastruktur

Data Dinas PUPR menunjukkan bahwa pada tahun 2024, masih terdapat **18,69 hektar** kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani. Kawasan kumuh ini dicirikan oleh sanitasi buruk, ketiadaan akses air bersih layak, dan kepadatan bangunan yang tinggi. Penduduk yang tinggal di 18,69 hektar ini adalah populasi yang beririsan kuat dengan kemiskinan ekstrem multidimensi.

Analisis *Carrying Capacity* mengungkapkan ketidakseimbangan ekologis yang parah.

- **Distrik Abepura (Zona Merah):** Daya dukung permukiman tercatat **0,45 kapita/jiwa** (Status: Tidak Memenuhi). Artinya, kepadatan penduduk di Abepura telah melampaui kemampuan lahan untuk menyediakan ruang hidup yang layak. Kepadatan berlebih (*overcrowding*) ini berkorelasi langsung dengan penyebaran penyakit menular (TBC, ISPA) dan stres sosial, yang memperburuk kualitas hidup penduduk miskin.
- **Distrik Muara Tami (Zona Hijau):** Memiliki daya dukung surplus sebesar **16,09 kapita/jiwa**. Ini menunjukkan potensi Muara Tami sebagai arah pengembangan perumahan rakyat untuk mengurai kepadatan dan kemiskinan kumuh di pusat

kota.

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan memburuk dari 1:39,16 (2022) menjadi **1:43,07 (2023)**. Peningkatan kemacetan ini meningkatkan biaya transportasi dan logistik, yang pada akhirnya membebani pengeluaran rumah tangga miskin untuk mobilitas kerja. Keberadaan jalan tanah/lainnya sepanjang 8,1 km mengindikasikan masih adanya kantong-kantong permukiman yang terisolasi dari akses aspal, kemungkinan besar di daerah pinggiran yang dihuni masyarakat miskin.

3.7.7. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemisikinan Esktrem

erdasarkan analisis multidimensi di atas, penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura tidak dapat lagi menggunakan pendekatan *business as usual*. Diperlukan strategi intervensi yang bersifat "extraordinary", konvergen, dan berbasis bukti spasial.

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran (Perlindungan Sosial Adaptif) Fokus utama adalah menahan agar kelompok miskin ekstrem tidak jatuh lebih dalam akibat inflasi garis kemiskinan.

- **Integrasi Data Presisi:** Melakukan penyisiran aktif (*active sweeping*) untuk memvalidasi data penduduk miskin ekstrem (Desil 1) *By Name By Address* (BNBA), terutama di kawasan kumuh padat penduduk di Abepura dan Jayapura Selatan yang seringkali luput dari pendataan administratif karena masalah legalitas domisili.
- **Bantuan Pangan Lokal:** Mengingat tingginya komponen makanan dalam garis kemiskinan, program bantuan pangan harus didiversifikasi dengan pangan lokal untuk menekan biaya dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

2. Strategi Peningkatan Pendapatan (Pemberdayaan Ekonomi Inklusif) Merespons fenomena *working poor* dan feminisasi tenaga kerja.

- **Inkubasi Bisnis bagi Pekerja Perempuan:** Mengingat lonjakan tenaga kerja perempuan, program pemberdayaan harus difokuskan pada peningkatan keterampilan usaha mikro bagi ibu rumah tangga. Bantuan modal usaha tanpa agunan dan pendampingan pemasaran digital menjadi krusial.

- **Padat Karya Perkotaan Berbasis Kawasan:** Mengintegrasikan penanganan kawasan kumuh (sisa 18,69 Ha) dengan program padat karya tunai (*Cash for Work*). Warga miskin ekstrem dipekerjakan untuk memperbaiki drainase dan jalan lingkungan mereka sendiri, memberikan pendapatan tunai sekaligus memperbaiki kualitas hidup.

3. Strategi Pemutusan Rantai Kemiskinan (Investasi Modal Manusia)

- **Afirmasi Pendidikan Menengah:** Mencegah *drop-out* di tingkat SMP dan SMA melalui beasiswa yang mencakup biaya transportasi dan uang saku, bukan hanya biaya sekolah, mengingat tingginya *opportunity cost* bagi keluarga miskin ekstrem.
- **Intervensi Stunting Berbasis Sanitasi:** Penanganan stunting tidak cukup dengan pemberian makanan tambahan, tetapi harus disertai perbaikan sanitasi lingkungan secara masif di kantong-kantong kemiskinan ekstrem untuk memutus siklus infeksi berulang (diare-malnutrisi).

4. Strategi Penataan Ruang Berkeadilan

- **Solusi Hunian Vertikal di Abepura:** Mengingat daya dukung Abepura yang sudah jenuh (0,45), solusi penanganan kemiskinan ekstrem di distrik ini harus berorientasi pada hunian vertikal (Rusunawa) yang terintegrasi dengan pasar tradisional atau simpul transportasi, sehingga warga miskin tidak terusir dari sumber mata pencaharian mereka di pusat kota.

3.7.8. Kesimpulan Bagian

Analisis terhadap kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura mengungkapkan realitas struktural yang mendesak. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menjadi 0,79 pada tahun 2024 adalah alarm peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi kota belum sepenuhnya inklusif. Residu kemiskinan ekstrem kini terakumulasi pada kelompok masyarakat yang mengalami deprivasi berlapis: pendidikan rendah, kesehatan rentan, hunian di kawasan kumuh, dan pekerjaan informal yang tidak stabil.

Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem ke depan harus bergeser dari sekadar penyaluran bantuan sosial menjadi transformasi struktur kehidupan keluarga miskin.

Tanpa perbaikan mendasar pada akses pendidikan menengah, kualitas sanitasi lingkungan, dan produktivitas tenaga kerja sektor informal, kemiskinan ekstrem di Kota Jayapura akan terus menjadi tantangan persisten di tengah gemerlap pembangunan fisik kota. Sinergi lintas sektor—antara Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan PUPR—menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di Bumi Port Numbay.

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS

Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Program Penanggulangan Kemiskinan yang di desain oleh Perangkat Daerah yang dirumuskan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran, serta Program Prioritas Pengentasan kemiskinan di Kota Jayapura Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran, serta Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan di Kota Jayapura Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Misi 1: Mewujudkan mkehidupan masyarakat yang berakhlak dan sejahtera dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat istiadat	Tujuan 1.1: Meningkatkan ketahanan sosial budaya Masyarakat	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kerukunan umat beragama serta pelestarian adat istiadat dan budaya.	**(Renstra Dinsos)** **1. Program Pemberdayaan Sosial** **2. Program Rehabilitasi Sosial** **3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** **Renstra Bagian Kesra** Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Misi 2: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi, Sosial Yang Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan	Tujuan 2.1: Meningkatkan Pengembangan Kota Yang Berwawasan Lingkungan	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas Dan Merata	**Rensra PUPR** 1. Program dan pengembangan sistem drainnase 2. Program pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 4. Program pengembangan jalan

			5. Program pengembangan pemukiman 6. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
			Renstra Dinas Perhubungan • **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** (Penyediaan Jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau angkuta barang antar kota dalam satu daerah; Penyediaan Jumlah Armada untuk jasa angkutan orang ; Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ; Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Bertumpu Pada Sektor Jasa Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Dan Kelestarian Budaya Lokal	Tujuan 3.1: Penguatan fondasi transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan daerah yang inklusif dan berkelanjutan	3.1.1 Berkembangnya perekonomian yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan budaya lokal 3.1.3 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Budidaya 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Renstra Dinas Perikanan) **Renstra Disperindagkop** 1. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi) 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI (Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 5. Program Pengembangan Umkm 6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting **Renstra Pendidikan** 1. Program Pengembangan Kebudayaan; 2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;

			3. Program Pengelolaan Pendidikan; 4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan **5.** Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra **Renstra Dinas Tenaga Kerja** • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa Melalui Transformasi Digital Dengan Reformasi Birokrasi	Tujuan 4.1: Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan	Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang prima	Rensra DIsdukcapil Program Pendaftaran Penduduk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Misi 5: Memperkuat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan Kesehatan Untuk Melahirkan Sdm Unggul, Produktif, Dan Berkarakter.	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat 5.1.2 Meningkatnya standar hidup masyarakat	Renstra Perpusatakaan dan Kearsiapan **PROGRAM PEMBINAAAN PERPUSTAKAAN** • (Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota; • Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca; • Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat; • Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

Melalui penyajian program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan sasaran pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Kota Jayapura. Rincian rencana program penanggulangan kemiskinan perangkat daerah yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Jayapura Tahun 2025-2029

DINAS SOSIAL															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PEMBER-DAYAAN SOAIAL	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	74,40	75,45	1.000.0000	77,15	1.030.000.000	78,91	1.060.000.000	79,83	1.090.000.000	80,96	1.110.000.000	80,96	5.290.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Persen	19,75	33,48	3.810.000.000	35,54	4.040.000.000	43,12	4.430.000.000	59,11	4.590.000.000	60,11	4.700.000.000	60,11	21.570.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	78.00	80	6.833.371.000	82,00	6.900.000.000	84,00	6.970.000.000	87,00	7.150.000.000	88,52	7.260.000.000	88,52	35.113.371.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN KOTA JAYAPURA

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	20	100	21.560.000.000	40 %	26.645.000.000	60 %	27.580.000.000	80 %	30.790.000.000	100	30.790.000.000	100	14.000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatny A Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persen	16,62	16,86	642.591.000	17,12	642.591.000	17,37	642.591.000	17,64	642.591.000	17,90	642.591.000	16,86	642.591.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatny A Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persen	94,01	94,48	242.700.000	94,95	242.700.000	95,43	242.700.000	95,50	242.700.000	96,38	242.700.000	94,01	94,48

DINAS KESEHATAN

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	Rasio	125 per 100.000 kelahiran hidup	122 per 100.000 kelahiran hidup	434.950.754.789	109 per 100.000 kelahiran hidup	262.097.278.959	97 per 100.000 kelahiran hidup	276.082.025.756	86 per 100.000 kelahiran hidup	224.556.330.335	77 per 100.000 kelahiran hidup	440.762.403.709	77 per 100.000 kelahiran hidup	1.638.448.793.548
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.	Persen	50 %	30 %	850.580.000	32 %	871.376.400	35 %	892.891..512	41 %	915.163.933	52 %	938.234.970	52 %	4.468.246.815
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	persen	21 %	13 %	3.962.320.000	13 %	4.320.900.000	14 %	4.694.483.600	14 %	5.088.607.672	14 %	5.510.763.215	61 %	23.577.074.487

AKREDIATASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	persen	77 %	81 %	422.000.000	89 %	492.500.000	94 %	1.677.875.00	100 %	823.768.750	100 %	590.207.188	100 %	4.006.350.938

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatny a Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen	55,00	60,00	1.761.612.000	65,00	600.000.000	75,00	400.000.000	80.00	400.000.000	80,00	400.000.000	55,00	60,00
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				3	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi				30	100.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				2	440.806.000										
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				40	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.00	30	70.000.000		
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5	100.000.000	25	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				10	100.000.000	10	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000				

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT & PENATAAN KAWASAN PEMUKIMAN

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	30,4	3.959.200	31,2	4355120	32,0	4790632	33,0	100	34,1	5796664,72	50	

PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	60,9 %	67,28	42.363.744.988	74,32		82,08		90,60		100			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	36,7	36.8	9.750.000	37.0	10.725.000	37.2	11.797.500	37.5	12.977.250	37,7	14.274.974	38	14.274.975
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten /kota	Persen	57,08	62.19	69.881.997	69.07	76.870.197	77.20	84.557.217	87.56	93.012.938	100	102.314.232	100	426.636.581
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Prosentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Orang Asli Papua	Persen	68,54	61,69	452.5000.000	57,12		53,44		50,22		47,31			
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	Persen	15.50	35.50	7.000.000	55.50	7.700.000	75.50	8.470.00	95.50	9.317.00	115.50	10.248.700	100	42.735.700

DINAS PERIKANAN																	
PROGRAM DAN KEGIATAN	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**													
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota														

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (	Terlaksanany a pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian koperasi	10 Koperasi	18 Koperasi	330,000,000	19 koperasi	360,000,000	20 koperasi	390,000,000	21 koperasi	420,000,000	22 koperasi	450,000,000		

	kewenangan kabupaten/kota														
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasi	100 koperasi	150 koperasi (50 pelatihan dan 100 pendampingan)	330,000,000	150 koperasi (50 pelatihan dan 100 pendampingan)	360,000,000	150 koperasi (50 pelatihan dan 100 pendampingan)	390,000,000	150 koperasi (50 pelatihan dan 100 pendampingan)	420.000.000	150 koperasi (50 pelatihan dan 100 pendampingan)	450.000.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Koperasi	32 koperasi	32 koperasi (31 bantuan dan 1 TPK	1,200,000,000	33 koperasi (32 bantuan dan 1 TPK	1,400,000,000	34 koperasi (33 bantuan dan 1 TPK	1,600,000,000	35 koperasi (34 bantuan dan 1 TPK	1,800,000,000	36 koperasi (35 bantuan dan 1 TPK	2,000,000,000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		110 Umkm	0										

DINAS PERHUBUNGAN				
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja,**	**Satuan Indikator**	**Data Capaian**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**

	Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output	Pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ															
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													1	2.196150.000
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen	1	1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	798.600.000	1	878.460.000	1	878.460.000

	Kabupaten/Kota													
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kot	Dokumen	1	1	600.000.000	1	660.000.000	1	726.000.000	1	798.600.000	1	878.460.000	1	878.460.000

DINAS PENDIDIKAN															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	3.500.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	0	0	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	30.750.000.000
	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	90	100	160.522.439.217	100	163.082.439.217	100	165.642.439.217	100	167.502.439.217	100	167.162.439.217	100	823.912.196.085
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000.000

DINAS TENAGA KERJA															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	Persen	2,06	2,06		2,48		2,71		3					
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	0	0	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	6.150.000.000	100	30.750.000.000
	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	90	100	160.522.439.217	100	163.082.439.217	100	165.642.439.217	100	167.502.439.217	100	167.162.439.217	100	823.912.196.085
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Desa Maju dan Mandiri	orang	-	150	411.366.000	150	411.366.000	150	411.366.000	150	411.366.000	150	411.366.000	-	-

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KAMPUNG															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	0,14	0,25	789.406.000.000	0,45	950.000.000	0,75	1.050.000.000	0.85	1.350.000.000	1,00	1.350.000.000	1.00	5.489.406.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	10	30	4.850.000.000	0.40	5.250.000.000	0.65	5.600.000.000	0,85	5.750.000.000	1,00	5.750.000.000	1,00	25.200.000.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000.000

DINAS KETAHANAN PANGAN															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	0,14	0,25	789.406.000.000	0,45	950.000.000	0,75	1.050.000.000	0.85	1.350.000.000	1,00	1.350.000.000	1.00	5.489.406.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	10	30	4.850.000.000	0.40	5.250.000.000	0.65	5.600.000.000	0,85	5.750.000.000	1,00	5.750.000.000	1,00	25.200.000.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**											
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	*Persentase OPD yang melakukan Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender (PPRG)*	Persen	37,04	51,85	3.585.000.000	66,67	4.268.250.000	81,48	3,916.475.000	96.30	4.097,362.500	1.00	4.287.400.750	1,00	4.287.400.750
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	*Rasio KDRT*	Persen	00,74	00,76	480.000.000	00,77	504.000.000	0.08	658,325,000	0.08	696.042.500	0.082	752.359.500	0.0768	752.359.500
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan*	Persen	51,73	51,78	165.000.000	51,84	173,250,000	51,89	220.000.000	51.94	244.000.000	51.99	270.000.000	51,99	1.072.250.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	*Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)*	Indeks	45.5	46	525.000.000	46.5	551.250.000	47	603.625.500	47.5	643.828.750	50	694.594.500	50	1.583.335.750
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	*Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)*	Angka	3.39	3.72	298.750.000	3.31	199.625.000	3.26	2.908.952.326	3.22	3.042.472.822	3.18	3.213.243.390	3.14	9.663043.538
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	*Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)*	Angka	87.46	87.64	1.770.291.600	87.81	1.871.918.200	87.99	1.969.627.326	88.17	2.054.279.947	88.34	2.133.263.336	88.52	9.799.380.0411

DINAS PARIWISTA																	
Program dan Kegiatan	**Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Satuan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output**	**Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**													
				Tahun 2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		**Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra**	
				Target	Realisasasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Relisasi	Target	Realisasi	Target	Realiasasi
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	*Persentase pertumbuhan Kunjungan Wsatawan*														
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata*														
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	*Tingkat Persentase Produk yang Difasilitasi Hak Kekayaan Intelektualnya*														
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	*Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang aktif dan Tervalidisai*														

BAB V
LOKASI PRIORITAS

5.1. Latar Belakang dan Konteks Pembangunan

Kota Jayapura, sebagai etalase pembangunan di Indonesia bagian timur sekaligus ibukota Provinsi Papua, memegang peranan strategis dalam dinamika ekonomi dan sosial di Tanah Papua. Namun, di balik pertumbuhan infrastruktur yang pesat, Kota Jayapura menghadapi tantangan dualistik: modernisasi perkotaan yang berjalan beriringan dengan persistensi kemiskinan ekstrem. Berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah ditargetkan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0% pada tahun 2024. Target ini bukan sekadar angka statistik, melainkan mandat moral dan konstitusional untuk memastikan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh warga kota, khususnya mereka yang berada dalam strata ekonomi terbawah atau Desil 1.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Jayapura tidak bersifat monolitik. Ia memiliki wajah yang beragam, mulai dari kemiskinan struktural di kampung-kampung nelayan pesisir hingga kemiskinan urban yang padat di pusat-pusat perdagangan. Kompleksitas ini diperburuk oleh dinamika demografi, di mana Kota Jayapura menjadi magnet migrasi bagi penduduk dari kabupaten lain di pegunungan tengah dan pesisir Papua, yang seringkali datang tanpa keterampilan kerja memadai dan menetap di kantong-kantong permukiman informal. Fenomena ini menciptakan tekanan hebat pada layanan dasar kota, mulai dari sanitasi, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan.

Ketersediaan data mikro "*By Name By Address*" (BNBA) yang dikelompokkan dalam Desil 1 kelompok 10% terbawah dari tingkat kesejahteraan memberikan peluang langka untuk melakukan bedah masalah secara presisi. Data ini, sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.1 hingga Tabel 5.15, bukan sekadar deretan angka, melainkan representasi dari ribuan nyawa yang hidup dalam deprivasi multidimensi. Analisis mendalam terhadap tabel-tabel ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang bersifat "satu ukuran untuk semua" (*one*

size fits all). Intervensi di Distrik Muara Tami yang bercorak agraris tentu tidak bisa disamakan dengan penanganan di Distrik Jayapura Utara yang padat dan memiliki topografi sulit, ataupun Distrik Abepura yang berdenyut dengan aktivitas perdagangan informal.

Memahami distribusi populasi adalah langkah fundamental dalam perencanaan pembangunan. Data demografi Desil 1 Kota Jayapura mengungkapkan ketimpangan spasial yang tajam antara pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah penyangga, serta perbedaan karakteristik antara kemiskinan urban dan rural.

Berdasarkan Tabel 6.1 dan Tabel 6.2, total populasi miskin ekstrem (Desil 1) di Kota Jayapura tercatat sebanyak **15.235 Keluarga** yang terdiri dari **46.515 Individu**. Distribusi angka ini tidak merata, menciptakan beban pelayanan publik yang berbeda di setiap distrik.

Tabel 5.1

Jumlah Keluarga dari Desil 1 - Kota Jayapura

Distrik	**Jumlah Keluarga (Desil 1)**
Abepura	4,418
Jayapura Utara	3,885
Jayapura Selatan	3,647
Heram	2,497
Muara Tami	788
Total	**15.235**

Tabel 5.2.

Jumlah Individu dari Desil 1 - Kota Jayapura

Distrik	**Jumlah Individu (Desil 1)**
Abepura	13,371

Jayapura Utara	12,144
Jayapura Selatan	10,825
Heram	7,859
Muara Tami	2,416
Total	**46.515**

Berdasarkan Tabel 5.1 dan Tabel 5.2, total populasi miskin ekstrem (Desil 1) di Kota Jayapura tercatat sebanyak **15.235 Keluarga** yang terdiri dari **46.515 Individu**. Distribusi angka ini tidak merata, menciptakan beban pelayanan publik yang berbeda di setiap distrik.

1. **Abepura sebagai Episentrum Kemiskinan Kuantitatif:** Distrik Abepura menanggung beban terbesar dengan hampir 30% dari total populasi miskin kota. Hal ini mengindikasikan bahwa Abepura bukan hanya pusat pendidikan dan perdagangan, tetapi juga "kantong penampungan" bagi populasi rentan. Keberadaan Pasar Youtefa dan akses yang terbuka ke wilayah Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura menjadikan Abepura sebagai pintu gerbang migrasi. Tingginya jumlah individu miskin di sini (13.371 jiwa) berimplikasi langsung pada kebutuhan volume layanan dasar yang masif, seperti kuota bantuan pangan dan layanan kesehatan tingkat pertama.

2. **Kepadatan di Jayapura Utara dan Selatan:** Kedua distrik ini, yang merupakan pusat kota lama dan pusat pemerintahan/bisnis, secara gabungan menampung hampir 50% penduduk miskin. Karakteristik kemiskinan di sini kemungkinan besar terhimpit di lahan-lahan marjinal perkotaan, seperti lereng bukit curam di Jayapura Utara atau kawasan pesisir dan atas air di Jayapura Selatan. Ukuran keluarga yang relatif kecil (sekitar 3 jiwa per KK) mungkin mengindikasikan struktur keluarga inti atau banyaknya lansia yang tinggal sendiri/berdua (akan diverifikasi di Bab III).

3. **Anomali Muara Tami:** Dengan proporsi hanya 5,2%, Muara Tami tampak "baik-baik saja" secara statistik absolut. Namun, interpretasi ini berbahaya jika mengabaikan

luas wilayah. Muara Tami memiliki wilayah terluas dengan densitas penduduk terendah. Kemiskinan di sini bersifat terisolasi dan berjarak jauh dari pusat layanan, yang seringkali membuat biaya logistik pengentasan kemiskinan per kapita menjadi lebih mahal dibandingkan di pusat kota.

Tabel 5.3.

Jumlah Lansia dari Desil 1 - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Lansia (Desil 1)
Jayapura Utara	1,079
Abepura	1,018
Jayapura Selatan	919
Heram	584
Muara Tami	227
Total	**3.827**

Tabel 6.3 menunjukkan sebaran lansia dalam kategori Desil 1. Lansia miskin seringkali menghadapi risiko penelantaran, kesehatan yang memburuk tanpa akses pengobatan, dan ketidakmampuan bekerja.

- **Jayapura Utara sebagai "Distrik Tua":** Distrik Jayapura Utara mencatat jumlah lansia miskin tertinggi sebanyak **1.079 jiwa**.
- **Rasio Ketergantungan Lansia:** Jika kita membandingkan jumlah lansia dengan total individu miskin per distrik:
    - Jayapura Utara: 1.079 / 12.144 = **8,9%** (Tertinggi)
    - Jayapura Selatan: 919 / 10.825 = **8,5%**
    - Abepura: 1.018 / 13.371 = **7,6%**
    - Heram: 584 / 7.859 = **7,4%**

- **Interpretasi Sosio-Geografis:** Tingginya konsentrasi lansia miskin di Jayapura Utara dan Selatan berkorelasi dengan sejarah perkembangan kota. Wilayah ini adalah permukiman awal. Banyak penduduk asli atau perantau generasi pertama yang menua di lokasi ini tanpa mobilitas ekonomi yang memadai. Mereka mungkin tinggal di rumah-rumah tua yang kondisinya memburuk (berkorelasi dengan data RTLH di Bab VIII).
- **Implikasi Layanan Geriatri:** Puskesmas di Jayapura Utara (seperti Puskesmas Imbi atau Tanjung Ria) harus dilengkapi dengan layanan *home care* atau "jemput bola" yang lebih intensif dibandingkan Puskesmas di Heram, karena mobilitas pasien lansia di kontur berbukit Jayapura Utara sangat terbatas.

Tabel 5.4.
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Disabilitas dari Desil 1 - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Disabilitas (Desil 1)
Jayapura Utara	12
Muara Tami	5
Jayapura Selatan	5
Heram	4
Abepura	3
Total	**29**

Tabel 6.4 menyajikan data Kepala Keluarga (KK) dengan disabilitas. Total tercatat **29 KK**.

- **Konsentrasi di Jayapura Utara:** 12 KK (41% dari total) berada di Jayapura Utara.
- **Analisis Kerentanan:** Meskipun angkanya terlihat kecil secara statistik, dampak kemiskinan pada KK Disabilitas sangat destruktif. Kepala keluarga difabel memiliki

hambatan besar dalam mencari nafkah, terutama di sektor informal yang mengandalkan fisik (buruh, nelayan). Konsentrasi di Jayapura Utara menambah risiko karena topografi wilayah yang berlereng curam dan minim aksesibilitas bagi kursi roda atau alat bantu gerak.

- **Rekomendasi Spesifik:** Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kemensos atau program setara dari Dinsos Kota Jayapura harus memprioritaskan 12 KK di Jayapura Utara ini untuk mendapatkan alat bantu dan bantuan tunai tetap, karena mereka hampir pasti tidak bisa keluar dari kemiskinan melalui mekanisme pasar tenaga kerja biasa.

Tabel 5.5.

Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Siswa Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar
Jayapura Utara	1,624
Abepura	1,504
Jayapura Selatan	1,449
Heram	742
Muara Tami	322
Total	**11.740**

Tabel 5.5 mengungkapkan fakta yang sangat mengkhawatirkan: **11.740 siswa** dari keluarga Desil 1 belum menerima Bantuan Pendidikan Dasar (seperti PIP/KIP).

Analisis Sebaran Kesenjangan Pendidikan:

1. **Jayapura Utara (1.624 siswa):** Merupakan angka tertinggi. Di wilayah pusat kota ini, biaya hidup dan biaya pendukung sekolah (transportasi, seragam) sangat tinggi.

Ketiadaan bantuan bagi 1.624 siswa ini adalah resep bagi tingginya angka putus sekolah (*drop-out*).

2. **Abepura (1.504 siswa):** Sebagai pusat pendidikan (kota pelajar), ironis bahwa ribuan siswa miskin di sini justru tidak tercover bantuan.

3. **Jayapura Selatan (1.449 siswa):** Kondisi serupa dengan Jayapura Utara.

Akar Masalah dan Dampak:

- **Masalah Administrasi:** Tingginya angka *exclusion error* ini seringkali bermuara pada masalah sinkronisasi data NIK antara Dukcapil, Dapodik (Data Pokok Pendidikan), dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Banyak anak di kawasan kumuh (seperti di sekitar Pasar Youtefa atau pesisir Japsel) mungkin tidak memiliki Akta Kelahiran, sehingga tidak bisa diinput ke sistem bantuan.

- **Ancaman Generasi:** Jika 11.740 anak ini putus sekolah karena biaya, Kota Jayapura sedang menanam benih kemiskinan baru untuk 10-20 tahun ke depan. Siklus kemiskinan tidak akan terputus.

Tabel 5.6.

Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Individu Belum Menerima Bantuan Kesehatan
Abepura	3,446
Jayapura Utara	3,049
Jayapura Selatan	2,503
Heram	2,230
Muara Tami	512
Total	**5.641**

Tabel 5.6 menunjukkan **5.641 individu** miskin belum memiliki jaminan kesehatan (BPJS PBI/KIS/Kartu Numbay Sehat).

- **Lonjakan di Abepura:** Distrik Abepura mencatat angka yang sangat ekstrem, yaitu **3.446 individu** (61% dari total kesenjangan kota). Angka ini jauh melampaui Jayapura Utara (3.049) dan distrik lain.
- **Analisis Penyebab:** Mengapa Abepura begitu tinggi?
    - *Migrasi:* Abepura adalah pintu masuk migran. Banyak warga miskin baru yang KTP-nya masih luar daerah, sehingga tidak bisa langsung didaftarkan ke PBI APBD Kota Jayapura (Kartu Numbay Sehat).
    - *Mahasiswa/Pemuda:* Banyak penduduk miskin di Abepura adalah mahasiswa atau pemuda pencari kerja yang merantau dan kost di kondisi memprihatinkan, namun luput dari pendataan RT/RW setempat.
- **Risiko Kesehatan Masyarakat:** Dengan kepadatan tinggi di Abepura, 3.446 orang tanpa akses kesehatan gratis berisiko menjadi *carrier* penyakit menular (TBC, Malaria) yang tidak terobati tuntas, atau jatuh ke dalam utang akibat biaya pengobatan darurat (*catastrophic health expenditure*).

Tabel 5.7.
Jumlah Keluarga yang Belum Menerima Bansos Bersyarat tetapi Memenuhi Syarat - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Keluarga Belum Menerima Bansos Bersyarat
Abepura	1,163
Jayapura Selatan	1,064
Jayapura Utara	965
Heram	598

Muara Tami	244
Total	**4.034**

Tabel 5.7 mengidentifikasi 4.034 keluarga yang memenuhi syarat (memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia/disabilitas) tetapi tidak menerima Bansos Bersyarat (PKH).

- Distribusi: Abepura (1.163 KK) dan Jayapura Selatan (1.064 KK) adalah wilayah dengan *gap* terbesar.
- Implikasi: PKH adalah instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan karena mewajibkan penerima untuk memeriksa kesehatan dan menyekolahkan anak. Kegagalan menyalurkan PKH kepada 4.000+ keluarga ini berarti hilangnya momentum untuk intervensi gizi (stunting) dan pendidikan.

Tabel 5.8.
Jumlah Keluarga yang Belum Menerima Bantuan Pangan - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Keluarga Belum Menerima Bantuan Pangan
Abepura	3,659
Jayapura Utara	2,926
Jayapura Selatan	2,824
Heram	2,149
Muara Tami	560
Total	**12.118**

Tabel 5.8 menyajikan data yang paling kritis dalam laporan ini: **12.118** Keluarga miskin ekstrem belum menerima Bantuan Pangan.

- Persentase Exclusion Error: Mengingat total keluarga Desil 1 adalah 15.235 KK, maka: (12.118 / 15.235) x 100% = 79,5%. Artinya, hampir 80% keluarga termiskin di Kota Jayapura tidak mendapatkan subsidi pangan.
- Analisis Dampak Inflasi: Di tengah inflasi harga beras dan bahan pokok di Papua yang umumnya lebih tinggi dari nasional, ketiadaan bantuan pangan memaksa keluarga miskin menghabiskan seluruh pendapatan mereka hanya untuk makan. Tidak ada ruang fiskal rumah tangga untuk menabung, pendidikan, atau kesehatan.
- Lokasi Kritis:
    - Abepura: 3.659 KK tanpa bantuan pangan.
    - Jayapura Utara: 2.926 KK tanpa bantuan pangan.
    - Jayapura Selatan: 2.824 KK tanpa bantuan pangan. Ini adalah kondisi darurat sosial. Di kawasan perkotaan di mana warga tidak bisa bertani (tidak punya lahan), ketergantungan pada pembelian makanan sangat tinggi. Risiko kerawanan pangan (kelaparan tersembunyi) sangat nyata di distrik-distrik ini.

Tabel 5.9.
Jumlah Keluarga dengan Rumah Kurang Layak Huni - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni
Jayapura Utara	105
Abepura	49
Jayapura Selatan	22
Muara Tami	18

Heram	15
Total	**209**

Kualitas hunian adalah cermin kesejahteraan. Tabel 6.9 mencatat **209 Keluarga** dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

- **Hotspot Jayapura Utara:** Distrik ini menyumbang **105 unit (50,2%)** dari total RTLH kota.
- **Integrasi dengan Snippet:** Informasi lapangan menunjukkan kawasan kumuh berat berada di **Tanjung Ria** dan **Dok IX**. Di sini, rumah-rumah berdempetan, sanitasi buruk, dan rawan bencana longsor atau abrasi.
- **Abepura (49 unit):** Kemungkinan tersebar di kawasan padat sekitar pasar atau bantaran sungai.
- **Urgensi Intervensi:** Mengingat Jayapura Utara juga memiliki jumlah lansia dan disabilitas tertinggi, kondisi rumah yang tidak layak (bocor, lantai tanah, ventilasi buruk) akan memperparah kondisi kesehatan kelompok rentan tersebut. Intervensi bedah rumah di Japut bukan sekadar program infrastruktur, tetapi program kesehatan preventif.

Tabel 5. 10

Jumlah Usia Produktif Tidak Bekerja/Sekolah - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Usia Produktif Tidak Bekerja/Sekolah
Jayapura Utara	1,451
Jayapura Selatan	1,055
Abepura	846

Heram	353
Muara Tami	304
Total	**4009**

Tabel 5.10 mencatat 4.009 penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang tidak bekerja dan tidak bersekolah (*NEET - Not in Employment, Education, or Training*).

- Konsentrasi di Jayapura Utara (1.451 jiwa): Angka ini sangat tinggi. Ini menunjukkan adanya stagnasi ekonomi lokal di distrik tua ini. Lapangan kerja formal terbatas, dan sektor informal sudah jenuh.
- Jayapura Selatan (1.055 jiwa): Pusat bisnis Jayapura ada di sini, namun angka pengangguran miskin tetap tinggi. Ini mengindikasikan *skills mismatch*—pekerjaan yang tersedia membutuhkan kualifikasi pendidikan yang tidak dimiliki oleh penduduk Desil 1.

Tabel 6.11.
Jumlah Keluarga Memiliki Usaha - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Keluarga Memiliki Usaha
Jayapura Utara	290
Jayapura Selatan	145
Abepura	133
Muara Tami	111
Heram	67
Total	**746**

Tabel 5.11 menunjukkan hanya **746 Keluarga** yang memiliki usaha.

- **Rasio Kewirausahaan:** 746 / 15.235 = **4,9%**.
- Artinya, 95% keluarga miskin ekstrem tidak memiliki usaha sendiri dan sepenuhnya bergantung pada pekerjaan buruh kasar, serabutan, atau belas kasihan orang lain.
- Jayapura Utara memiliki jumlah usaha terbanyak (290), namun paradoksnya juga memiliki pengangguran terbanyak. Ini menunjukkan bahwa usaha yang ada sangat mikro, subsisten (hanya untuk makan hari ini), dan tidak mampu menyerap tenaga kerja keluarga sendiri.

Tabel 5.12.

Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Aset Produktif - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Keluarga Tidak Memiliki Aset Produktif
Abepura	4,418
Jayapura Utara	3,885
Jayapura Selatan	3,647
Heram	2,497
Muara Tami	788
Total	**15.235**

Tabel 6.12 adalah data yang paling "bersuara keras". Jumlah keluarga yang **Tidak Memiliki Aset Produktif** adalah **15.235**.

- **Kesamaan Data:** Angka ini SAMA PERSIS dengan total jumlah keluarga Desil 1 (Tabel 5.1).
- **Kesimpulan Fatal: 100% keluarga miskin ekstrem di Kota Jayapura tidak memiliki aset produktif.** Mereka tidak punya lahan pertanian sendiri, tidak punya

perahu motor sendiri (untuk nelayan), tidak punya kendaraan niaga (motor ojek/pickup), dan tidak punya mesin produksi.

- **Analisis Kemiskinan Struktural:** Tanpa aset, mereka tidak memiliki daya ungkit (*leverage*). Program pelatihan (soft skill) saja tidak akan mempan. Mereka membutuhkan transfer aset (*capital injection*) untuk bisa memulai mobilitas ekonomi vertikal.

Tabel 5. 13

Jumlah Individu Bekerja di Sektor Pertanian - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Individu Bekerja di Sektor Pertanian
Abepura	305
Muara Tami	183
Jayapura Utara	179
Heram	72
Jayapura Selatan	28
Total	**767**

Tabel 5.13 menunjukkan 767 individu bekerja di sektor pertanian.

- **Dominasi Abepura (305) dan Muara Tami (183):**
    - Di **Muara Tami**, ini adalah pertanian lahan luas (sawah, palawija, buah naga) di Koya. Petani miskin di sini kemungkinan adalah buruh tani yang tidak punya lahan (sesuai Tabel 5.12). Intervensi harus berupa akses lahan garapan atau bagi hasil yang adil.
    - Di **Abepura**, ini kemungkinan besar adalah pertanian urban atau pertanian pinggiran di perbatasan Keerom/Kabupaten Jayapura. Potensi *urban*

farming atau pertanian sayur mayur intensif sangat besar untuk menyuplai pasar lokal.

Tabel 5.14.

Jumlah Individu Bekerja di Sektor Perikanan - Kota Jayapura

Distrik	Jumlah Individu Bekerja di Sektor Perikanan
Jayapura Utara	160
Jayapura Selatan	103
Abepura	18
Muara Tami	8
Heram	7
Total	**296**

Tabel 5.14 mencatat 296 individu di sektor perikanan.

- **Dominasi Jayapura Utara (160) dan Jayapura Selatan (103):**
    - Ini mengonfirmasi karakter pesisir kedua distrik ini. Masyarakat miskin di kelurahan Tanjung Ria, Dok IX (Japut) dan Hamadi, Argapura (Japsel) menggantungkan hidup pada laut.
    - Karena data Tabel 5.12 mengatakan mereka tidak punya aset, maka 263 nelayan ini kemungkinan besar adalah buruh nelayan yang menumpang perahu juragan, atau nelayan pinggiran yang hanya memancing tanpa perahu motor. Program bantuan *ketinting* (motor tempel), *coolbox*, atau jaring menjadi sangat relevan dan mendesak di kedua distrik ini.

Tabel 5.15.

Jumlah Individu Desil 1 Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal - Kota Jayapura

Distrik	Wilayah	Jumlah Individu Desil 1
Abepura	Kampung	1,790
Abepura	Kelurahan	11,581
Heram	Kampung	693
Heram	Kelurahan	7,166
Jayapura Selatan	Kampung	154
Jayapura Selatan	Kelurahan	10,671
Jayapura Utara	Kampung	89
Jayapura Utara	Kelurahan	12,075
Muara Tami	Kampung	1,143
Muara Tami	Kelurahan	1,273
Total		**46.435**

Data ini menegaskan bahwa **kemiskinan di Kota Jayapura adalah fenomena urban (perkotaan).** Mayoritas mutlak penduduk miskin tinggal di struktur kelurahan. Hal ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan:

- **Keterbatasan Dana Desa:** Mekanisme Dana Desa (ADK) yang selama ini menjadi andalan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional hanya efektif untuk 8,3% populasi target di Kota Jayapura (terutama di Muara Tami).
- **Beban APBD Kota:** Untuk 91,7% penduduk miskin di kelurahan, intervensi sangat bergantung pada APBD Kota Jayapura dan program pusat yang dikelola oleh dinas teknis (Dinas Sosial, Dinas PUPR, dll), bukan otonomi tingkat desa.

Pengecualian Penting - Distrik Muara Tami: Hanya di Distrik Muara Tami, jumlah penduduk miskin di Kampung (1.143 jiwa) hampir setara dengan di Kelurahan (1.273 jiwa). Bahkan, proporsi penduduk miskin yang tinggal di Kampung di Muara Tami mencapai 47%, jauh lebih tinggi dibandingkan Abepura (13%) atau distrik lainnya yang di bawah 10%.

- *Insight:* Muara Tami memerlukan pendekatan hibrida. Wilayah Skouw, Koya Tengah, dan Mosso memerlukan pendekatan pembangunan pedesaan (Rural Development) berbasis pertanian dan perbatasan, sementara wilayah Koya Barat/Timur yang berstatus kelurahan memerlukan pendekatan semi-urban.

5.2. Lokasi Prioritas

Berdasarkan analisis silang (*cross-tabulation*) dari 15 tabel dan konteks kewilayahan, kajian ini menyusun Peta Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura. Penetapan ini tidak hanya melihat jumlah (kuantitas), tetapi juga kedalaman masalah (intensitas/kerentanan).

5.2.1 Metodologi Skoring Sederhana

- **Dimensi Volume:** Jumlah keluarga/individu miskin. (Bobot tinggi untuk Abepura).
- **Dimensi Kerentanan:** Jumlah lansia, disabilitas, pengangguran. (Bobot tinggi untuk Japut).
- **Dimensi Defisit Layanan:** Jumlah gap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan. (Bobot tinggi untuk Japut dan Abepura).

5.2.2 Matriks Lokasi Prioritas

Berikut adalah penetapan **Lokasi Prioritas (LOKPRI)** Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024/2025:

Peringkat Prioritas	Distrik	Fokus Lokasi (Kelurahan/Kampung)	Basis Data & Justifikasi (Tabel & Snippet)	Fokus Program Utama
PRIORITAS 1 (Zona Merah Kritis)	**JAYAPURA UTARA**	**Kel. Tanjung Ria, Kel. Bhayangkara, Kel. Gurabesi, Kel. Imbi**	• **Tertinggi Lansia (1.079)** • **Tertinggi Disabilitas (12 KK)** • **Tertinggi RTLH (105 Unit)** • **Tertinggi Pengangguran (1.451)** • **Tertinggi Gap Pendidikan (1.624)** • Kawasan kumuh Dok IX & Tanjung Ria	**1. Intervensi Fisik Terpadu:** Bedah Rumah + Sanitasi Kawasan Kumuh. **2. Perlindungan Lansia:** Layanan *Home Care* Kesehatan & Bantuan Makanan Lansia. **3. Padat Karya:** Sektor Perikanan & Jasa untuk serap 1.451 pengangguran. **4. Sapu Bersih Pendidikan:** Beasiswa untuk 1.624 anak.
PRIORITAS 2 (Zona Merah Volume)	**ABEPURA**	**Kel. Way Mhorock, Kel. Awiyo (Pasar**	• **Populasi Miskin Terbanyak (13.371)**	**1. Validasi Data Massal:** "Gerebek Data" untuk 3.659

Peringkat Prioritas	Distrik	Fokus Lokasi (Kelurahan/Kampung)	Basis Data & Justifikasi (Tabel & Snippet)	Fokus Program Utama
		Youtefa), Kel. Vim, Kel. Wahno	**• Gap Kesehatan Terbesar (3.446) • Gap Pangan Terbesar (3.659)** • Masalah migrasi & pasar kumuh	KK tanpa bantuan pangan. **2. Akses Kesehatan:** Pendaftaran Kartu Numbay Sehat/KIS keliling. **3. Urban Farming:** Pemberdayaan 305 petani urban. **4. Penataan Pasar:** Integrasi pedagang kecil ke tempat layak.
PRIORITAS 3 (Zona Kuning)	**JAYAPURA SELATAN**	**Kel. Hamadi, Kel. Argapura, Kel. Ardipura, Kp. Tobati**	• Tinggi di Sektor Perikanan (103) • Gap Pendidikan Tinggi (1.449) • Potensi wisata & perikanan	**1. Revitalisasi Kampung Nelayan:** Bantuan alat tangkap & perahu. **2. Pendidikan Anak Nelayan:**

Peringkat Prioritas	Distrik	Fokus Lokasi (Kelurahan/Kampung)	Basis Data & Justifikasi (Tabel & Snippet)	Fokus Program Utama
				Pastikan anak tidak putus sekolah. **3. Wisata Bahari:** Pelibatan pemuda dalam pengelolaan wisata (Jembatan Merah).
PRIORITAS 4 (Zona Hijau Transisi)	**HERAM**	**Kel. Waena, Kel. Yabansai**	• Kemiskinan transisi urban-rural. • Basis mahasiswa/pemuda. • Isu sanitasi lingkungan	**1. Pelatihan Vokasi (BLK):** Fokus pada *upskilling* pemuda. **2. Akses Modal Usaha:** Untuk menumbuhkan UMKM baru. **3. Sanitasi:** Perbaikan drainase lingkungan padat.

Peringkat Prioritas	Distrik	Fokus Lokasi (Kelurahan/Kampung)	Basis Data & Justifikasi (Tabel & Snippet)	Fokus Program Utama
PRIORITAS 5 (Zona Hijau Pedesaan)	**MUARA TAMI**	**Kp. Skouw, Kp. Koya Tengah, Kp. Mosso**	• Satu-satunya dominasi Kampung • Sektor Pertanian (183) • Wilayah Perbatasan	**1. Optimalisasi Dana Desa:** Fokus 20% dana desa untuk ketahanan pangan. **2. Reforma Agraria:** Akses lahan bagi buruh tani. **3. Infrastruktur Tani:** Jalan usaha tani dan irigasi.

5.3. Rekomendasi Strategis dan Rencana Aksi

Untuk merespons temuan data di atas, Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pergeseran pendekatan dari "distribusi merata" menjadi "distribusi proporsional berbasis masalah".

Strategi Jangka Pendek (0-6 Bulan): "Emergency Relief & Data Fix"

1. **Operasi "Sisir NIK" di Abepura dan Jayapura Utara:** Dinas Dukcapil dan Dinsos harus turun bersama ke kelurahan prioritas (Tanjung Ria, Awiyo, Way Mhorock) untuk membereskan dokumen kependudukan warga miskin. Tanpa NIK valid, 5.641 warga tanpa JKN dan 12.118 keluarga tanpa bantuan pangan tidak akan pernah bisa dibantu

sistematis.

2. **Intervensi Bantuan Pangan Darurat:** Mengingat 80% keluarga miskin tidak dapat bantuan pangan (Tabel 5.8), Pemkot Jayapura harus mengalokasikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) atau APBD untuk "Bantuan Sembako Daerah" yang menyasar 3.659 KK di Abepura dan 2.926 KK di Japut yang *excluded* dari bantuan pusat.

Strategi Jangka Menengah (6-12 Bulan): "Asset Transfer & Service Upgrade"

1. **Paket "Modal Aset" untuk Nelayan dan Petani:** Berdasarkan Tabel 5.12 (Nihil Aset), Dinsos tidak boleh hanya memberi uang tunai. Berikan **aset produktif**:
   - *Paket Nelayan (Japut/Japsel):* Perahu ketinting, *coolbox*, jaring.
   - *Paket Petani (Abepura/Muara Tami): Hand tractor* (dikelola kelompok), bibit, pupuk.
   - *Paket Usaha Urban (Heram/Abepura):* Gerobak dagang, peralatan pertukangan/bengkel.
2. **Penuntasan RTLH Terfokus:** Alokasikan anggaran bedah rumah DAK/DAU khusus untuk menuntaskan **105 unit RTLH di Jayapura Utara** dalam satu tahun anggaran. Jangan diecer ke semua distrik. Selesaikan episentrum masalah di Japut terlebih dahulu karena urgensi kerentanan lansia di sana.

Strategi Lintas Sektor

1. **Layanan Kesehatan Ramah Lansia (Geriatri):** Puskesmas di Jayapura Utara wajib memiliki jadwal kunjungan rumah (*home visit*) rutin untuk 1.079 lansia miskin. Integrasikan dengan Kader Posyandu Lansia.
2. **Afirmasi Pendidikan:** Dinas Pendidikan melakukan "pemutihan" biaya sekolah atau advokasi beasiswa bagi 1.624 siswa miskin di Japut dan 1.504 di Abepura yang belum dapat bantuan. Pastikan mereka tidak *drop out*.

5.4. Kesimpulan

Kajian data mikro Desil 1 ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Jayapura tidak bisa lagi dilakukan dengan "mata tertutup" atau sekadar membagi rata anggaran ke 5 distrik.

- **Distrik Abepura** adalah prioritas penanganan karena **volume** kemiskinan yang masif, didorong oleh migrasi dan kegagalan pendataan administratif (kesehatan & pangan).
- **Distrik Jayapura Utara** adalah prioritas penanganan karena **intensitas/keparahan** kemiskinan, di mana lansia, disabilitas, pengangguran, dan rumah kumuh menumpuk di satu wilayah.

Target penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 hanya bisa dicapai jika Pemkot Jayapura berani melakukan alokasi anggaran asimetris: **Guyur bantuan sosial dan perbaikan data di Abepura, serta fokuskan perbaikan infrastruktur rumah dan pemberdayaan sosial lansia di Jayapura Utara.** Sementara itu, Muara Tami harus didorong mandiri melalui optimalisasi Dana Desa dan sektor pertanian. Dengan strategi berbasis tabel data ini, intervensi akan tepat pada sasaran, tepat pada kebutuhan, dan efektif dalam hasil.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Jayapura disusun sebagai dokumen strategis yang bertujuan menjadi pedoman terpadu bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Berdasarkan analisis pada Bab I hingga Bab V, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. **Kemiskinan di Kota Jayapura bersifat multidimensional dan dinamis.** Meskipun persentase kemiskinan Kota Jayapura cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Papua, namun masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya biaya hidup yang berpotensi menekan kelompok rentan untuk kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

2. **Karakteristik kemiskinan menunjukkan adanya kesenjangan spasial dan sosial.**
   Analisis kemiskinan mikro memperlihatkan konsentrasi penduduk miskin ekstrem (Desil 1) pada distrik-distrik tertentu, terutama Abepura, Jayapura Utara, dan Jayapura Selatan. Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, rumah tangga dengan anak usia sekolah yang belum menerima bantuan pendidikan, serta masyarakat di kawasan permukiman kumuh menjadi prioritas utama intervensi kebijakan.

3. **Faktor struktural masih menjadi penyebab dominan kemiskinan.** Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja produktif, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur dasar, serta ketimpangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan kemiskinan di Kota Jayapura.

4. **Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus bersifat tematik, terintegrasi, dan berbasis wilayah.**

   Penetapan lokasi prioritas penanganan kemiskinan pada Bab V menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat diseragamkan antar wilayah. Setiap distrik memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda.

5. **Program prioritas telah diarahkan pada penguatan fondasi pembangunan manusia dan ekonomi inklusif.**

   Program-program pada Bab IV menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Jayapura untuk mengintegrasikan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai instrumen utama percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, RPKD Kota Jayapura menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPKD Kota Jayapura, beberapa rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah.** Penanggulangan kemiskinan memerlukan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program. Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu diperkuat sebagai simpul integrasi kebijakan dan pengendalian program.

2. **Pemanfaatan data terpadu dan pemutakhiran berbasis by name by address (BNBA).**

   Akurasi sasaran program menjadi kunci keberhasilan intervensi. Oleh karena itu,

pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan pemanfaatan data desil kesejahteraan harus menjadi dasar utama dalam penetapan penerima manfaat.

3. **Penguatan program pemberdayaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.** Penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan sumber penghidupan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, perikanan, perdagangan jasa, dan sektor unggulan lokal lainnya.

4. **Peningkatan kualitas layanan dasar pada wilayah dan kelompok rentan.** Akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, dan sanitasi harus diprioritaskan pada distrik dan kelompok masyarakat miskin ekstrem, guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

5. **Penguatan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas program.** Setiap program penanggulangan kemiskinan perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan mekanisme evaluasi berkala, agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

6. **Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan non-pemerintah.**
   Keterlibatan dunia usaha, lembaga keagamaan, tokoh adat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan.